



Pragmatisme Politik
Hampir dapat dipastikan Rancangan Undang-Undang Pemilu urung dibahas.
POLITIK & HUKUM/HLM 3



Kebutuhan Revisi UU ITE
Pengaturan yang supel dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi internet.
OPINI/HLM 6



Kamouflage Juventus
Juventus menunjukkan keseriusan mereka untuk menghadapi Porto.
OLAHRAGA/HLM 14

SELASA, 9 MARET 2021

www.kompas.id

@hariankompas @hariankompas @hariankompas

Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster melalui Bandara Juanda



Petugas memperlihatkan benih lobster yang berhasil digagalkan penyelundupannya di Kantor Bea dan Cukai Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (8/3/2021). Sebanyak 29.250 benih lobster senilai lebih dari Rp 2,9 miliar itu direncanakan dikirim ke Batam melalui kargo pesawat pada Senin (8/3) pagi.

Provokasi Konsumsi

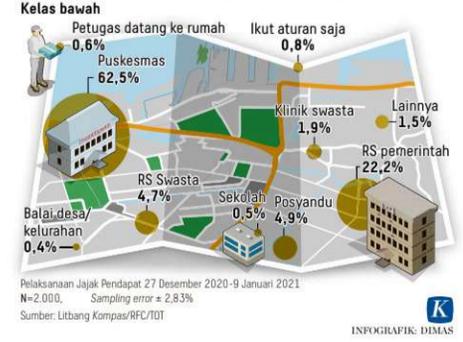
ANALISIS EKONOMI
ENNY SRI HARTATI
Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef)



Tidak dapat dimungkiri, konsumsi rumah tangga merupakan mesin penggerak utama perekonomian Indonesia. Lebih dari 56 persen pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh kegiatan konsumsi masyarakat. Maka, mestinya tidak terlalu sulit menjaga stabilitas perekonomian asalkan konsumsi rumah tangga terjaga. Sebaliknya, kebijakan stimulus ekonomi akan majal jika tidak mampu mendorong ketahanan konsumsi rumah tangga. Sayangnya, mendorong konsumsi rumah tangga tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Apalagi sekadar melalui imbauan cinta produk dalam negeri dan benci produk impor. Sebab, penentu utama untuk mendorong kemampuan konsumsi adalah daya beli masyarakat, yaitu kecukupan pendapatan yang siap dibelanjakan. Persoalannya, ketika menghadapi masa pandemi, siklus tersebut tidak lagi normal. Hampir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat terganggu, bahkan terjadi pemutusan

#lindungidiridansekitar

"Jika Anda berminat mendapat vaksinasi gratis, lokasi mana yang Anda pilih?"



INDEKS

Kecap Nomor Satu
Kecap manis adalah saus asli Indonesia, hasil akulturasi dengan kecap asin dari China. Bagi sebagian orang, kecap manis menjaga kekhasan cita rasa makanan.
KOMPAS.ID klik.kompas.id/kecap-manis

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH kompas.id

HAK ANAK

Pekerja Migran Perlu Pembekalan tentang Pengasuhan Anak

JAKARTA, KOMPAS — Pengetahuan pekerja migran Indonesia tentang pentingnya pengasuhan anak perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak anak mereka terpenuhi. Langkah tersebut bisa dimulai dengan pembekalan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) tentang berbagai pengetahuan pengasuhan anak. Pembekalan yang komprehensif harus diberikan sebelum mereka berangkat merantau ke luar negeri. "Jadi, mereka mendapat pengetahuan bagaimana pengasuhan anak tetap berjalan ketika mereka sudah berada di luar negeri sehingga tahu bagaimana membangun komunikasi dengan anak-anak di Indonesia. Pembekalan ini disertai panduan rinci apa yang harus dilakukan orangtua yang menjadi PMI," tutur Tyas Retno Wulan, pengajar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, ketika dihubungi, Senin (8/3/2021). Komunikasi intens antara anak pekerja migran (APM) dan orangtuanya di luar negeri menjadi kunci agar anak-anak tak kehilangan perhatian. Yang terjadi selama ini, ketika PMI bekerja di luar



negeri, anak-anak ditinggalkan kepada suami/istri ataupun kepada kakek/nenek ataupun saudara, setelah itu tak ada komunikasi. Pengasuhan anak pun tak berjalan. Minimnya pengasuhan dan perlindungan membuat sejumlah APM kekurangan gizi dan rentan jadi korban kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Selain tidak mendapat pendidikan dan kesehatan yang optimal, mereka juga kesulitan mengakses identitas kependudukan, seperti akta lahir, sehingga tidak bisa mengakses program pemerintah (Kompas, 8/3/2021). Tyas mengungkapkan, komunikasi dan pengasuhan jarak jauh oleh PMI terhadap anak-anaknya membutuhkan usaha khusus. Kini, hal tersebut memungkinkan dilakukan karena teknologi informasi telah berkembang. "PMI bisa memanfaatkan teknologi informasi. Mereka bisa melakukan telepon video kapan saja dengan anak-anak-

nya. Komunikasi itu akan memengaruhi situasi psikologi anaknya, setidaknya memberi kebanggaan kepada anak bahwa orangtuanya bekerja keras di luar negeri," tutur Tyas. Selain pembekalan pada PMI, pengasuhan APM berbasis komunitas juga bisa dilakukan sehingga ada perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap APM. Pemerintah desa yang memiliki APM bisa memetakan profilnya mulai dari usia, pendidikan, jenis kelamin, hingga persoalan mereka. Ketika sudah mengetahui persoalannya, akan lebih mudah untuk menanganinya. Namun, hal seperti itu jarang dilakukan di desa-desa. Meski ada desa yang memberikan perhatian kepada APM, itu dilakukan karena sudah ada intervensi program dari LSM ataupun pemerintah. Namun, APM yang belum tersentuh program jauh lebih banyak.

Sudah ada kebijakan

Dari sisi pemerintah, selain ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang (Bersambung ke him 15 kol 3-5) klik.kompas.id/berujungkecewa

HARI MUSIK NASIONAL

Rindu Konser, Rindu Penghasilan

Selama satu tahun pandemi Covid-19, kebisingan konser musik lenyap. Seiring dengan itu, penghasilan pelaku industri konser pun menguap. Mereka hanya bisa berharap roda industri konser bisa bergulir lagi.

duet Endah Widiastuti dan Rhesa Aditya kedatangan tamu di Earhouse, warung yang mereka kelola di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Tamu itu, antara lain, musisi Pamungkas dan manajernya, Dado Darmawan yang menjadi manajer Jason Ranti, dan Cak Hend dari tim trio Nonaria. Mereka saling melontarkan keluh kesah selama satu tahun bertahan hidup di tengah paceklik panggung akibat pandemi Covid-19. "Intinya, kami sama-sama rindu panggung, sama-sama gelisah kapan bisa panggung lagi. Di luar musik, ada banyak pekerja yang hidupnya terkait kon-

ser, misalnya pedagang makanan dan minuman, teknisi panggung, dan jasa sewa sound system," ujar Endah Widiastuti, Senin (8/3/2021). Artis ataupun musisi, kata Endah, masih bisa menikmati hasil dari pertunjukan virtual—meski bayarannya tak sebesar konser konvensional. Namun, pekerja industri musik belum tentu punya penghasilan. Obrolan pada malam itu menyepakati mereka harus mulai bergerak. Peringatan Hari Musik Nasional yang jatuh setiap 9 Maret dinilai sebagai momentum yang tepat untuk memulainya. Setelah Wendi Putranto, salah satu pendiri M Bloc, ikut-

Pilihan Vaksin Makin Beragam

Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca tiba di Indonesia. Ini membuat pilihan vaksin bagi masyarakat makin beragam.

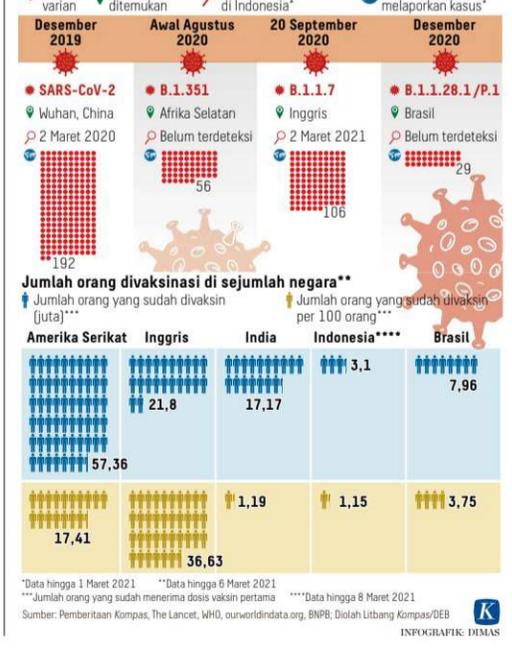
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 untuk Indonesia tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (8/3/2021). Jumlah itu merupakan pengiriman perdana vaksin buatan AstraZeneca dari jatah 11 juta dosis vaksin gelombang pertama melalui skema kerja sama multilateral, Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment atau Covax AMC.

>> BACA JUGA:
Varian Baru
Varian baru korona B.117 terdeteksi di empat provinsi di Tanah Air.
KOMPAS.ID
klik.kompas.id/varianbaru

Covax AMC merupakan instrumen pembiayaan inovatif yang mendukung partisipasi 92 negara berpendapatan menengah agar mampu mengakses vaksin Covid-19 dari pembiayaan donor. "Upaya multilateral membuahkan hasil. Mulai akhir Februari 2021, pengiriman pertama vaksin multilateral dilakukan. Indonesia menerima pengiriman pertama. Vaksin AstraZeneca 1.113.600 dosis vaksin jadi, dengan total berat 4,1 ton," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, kemarin. Jumlah itu bagian awal gelombang pertama pengiriman vaksin dari jalur multilateral. Dalam gelombang pertama, RI akan menerima 11.704.800 vak-

sin jadi, berlangsung mulai awal Maret hingga Mei 2021. Kedatangan vaksin dari jalur multilateral, menurut Retno, terwujud berkat kerja sama Kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Pengadaan vaksin itu juga melalui kerja sama dengan sejumlah pihak internasional, antara lain negara donor, Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Pandemi (CEPI), Aliansi Vaksin (GAVI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef). Perwakilan WHO untuk Indonesia, Paranietharan, menyatakan, pengiriman vaksin dari skema kerja sama Covax merupakan peristiwa bersejarah. Covax menargetkan menyediakan (Bersambung ke him 15 kol 1-2)

Varian Baru Virus Korona



INDONESIA

pemerintah besok (hari ini) ada keputusan langsung bahwa konser offline sudah bisa digelar. Kami siap menggelar konser dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Wendi. AAC dan M Bloc bahkan sudah memberi nama pertunjukannya itu, menyusun penampilannya, dan mengajukan izin untuk tanggal 26 Maret kepada pemerintah. Konsernya bakal bernama Grand Rapid Live dengan penonton berjarak satu sama lain. Tiket akan dijual dengan harga relatif mahal karena sudah termasuk biaya tes usap antigen di Rumah (Bersambung ke him 15 kol 1-5)

2 | Politik & Hukum



KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas menyemprotkan disinfektan pada berkas yang hendak diserahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin (8/3/2021). Berkas sebanyak dua kontainer plastik tersebut disebut sebagai bukti-bukti legalitas kepemimpinan Demokrat yang sah sesuai AD/ART yang telah disahkan pemerintah melalui Kemenkumham pada 2020. Berkas tersebut termasuk surat keputusan tentang status 34 ketua DPD dan 514 ketua DPC se-Indonesia yang sah. Penyerahan berkas ini dilakukan DPP Partai Demokrat untuk membuktikan Kongres Luar Biasa Demokrat yang mengukuhkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah tidak sah.

GEJOLAK PARTAI

Dari "Ngopi-ngopi" hingga "Memimpin"

Tak lama setelah surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono diterima Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (4/2/2021), Menteri Sekretaris Negara Pratikno langsung melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi tak terlalu terkejut. Presiden menganggap isi surat AHY itu urusan Partai Demokrat sehingga tak ingin menanggapi.

Pratikno pun diminta mengeluarkan pernyataan. "Kami rasa, kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah urusan internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," ujar Pratikno lewat Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi tak terkejut saat menerima laporan Pratikno karena sudah membaca berita terkait keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang disebut akan mengambil alih kepemimpinan Demokrat. "Waktu pertama baca beritanya, Presiden memang terkejut, tetapi tidak mau menanggapi," ujar peja-

bat di Istana Kepresidenan.

Pratikno yang dikonfirmasi menjawab singkat lewat Whatsapp, "Itu urusan internal, saya tak bisa berkomentar." Ia membenarkan bahwa Presiden menunjuk Moeldoko menjelaskan sendiri kepada publik apa yang terjadi.

"Telanjur basah"

Berita terkait kemelut internal Demokrat memang cukup mencolok. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra, Senin (1/2) malam, jelas menuding Moeldoko. "Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP (berita acara pemeriksaan) sejumlah (unsur) pimpinan tingkat pusat dan daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan dengan KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujarnya. Saat jumpa pers AHY juga menuding keterlibatan "pejabat penting di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo".

Informasi yang ditelusuri Kompas, selain Moeldoko, sejumlah pendiri Demokrat memang *roadshow* ke sejumlah

pejabat, di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan pejabat lainnya. Namun, tampaknya yang "mencontol" hanya Moeldoko. "Memang ada yang menemui Pak Luhut, tetapi tak ada urusan dengan partai," ujar Atmadiji Sumarkidjo, Staf Khusus Luhut.

Kini, tampaknya Moeldoko telanjur basah karena berbagai tuduhan. "Pak Moeldoko sekarang *ngamuk* jadi telanjur basah (memimpin)," ungkap pejabat di lingkungan Istana. Di awal, saat maraknya pemberitaan soal kisruh di Demokrat, Moeldoko disebutnya sudah melapor ke Presiden. "Presiden tak melarang, tetapi juga tak mendorong (mengambil alih) karena itu hak pribadi Pak Moeldoko," ujar pejabat itu.

Saat kunjungan kerja ke Serang, baru-baru ini, Moeldoko juga disebut telah melapor ke Presiden soal keseriusannya karena diminta kader dan pendiri Demokrat hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. "Presiden, lagi-lagi, tak melarang, tetapi juga tak mendorong. Karena Presiden tahu itu hak politik Pak Moeldoko, asalkan Pak

Moeldoko tak menggunakan fasilitas dan jabatannya," ujar pejabat itu.

Ketika ilmu keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan Demokrat dimunculkan pertama kali oleh kubu AHY, Moeldoko sempat menepisnya meskipun mengaku beberapa kali menerima kader dan eks kader Demokrat. "Mereka pada curhat, ya, *dengerin* saja saya. Sebenarnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," katanya (*Kompas*, 2/2).

Moeldoko lantas menampilkan *display picture* WA-nya. "Aku *ngopi-ngopi*, kenapa ada yang grogi."

Seusai KLB Demokrat, Senin (8/3), Moeldoko kepada Kompas menyatakan, "Dari awal saya katakan, tidak ada urusannya dengan Istana. Saya pernah sampaikan, 'jangan sedikit-sedikit selalu dituduh Istana (terlibat)' karena ini hak politik pribadi saya."

Sementara Pratikno menyatakan, "Presiden dan saya tidak tahu kalau ada KLB Demokrat. Presiden tidak dilapor, saya juga tidak." Lantas bagaimana solusinya? "Biarlah hukum yang menyelesaikannya," jawab Pratikno. (INA/HAR)

Uji KLB Demokrat dengan Obyektif

Obyektivitas Kemenkumham dalam memverifikasi KLB Partai Demokrat penting karena keputusan yang diambil bisa berimbas terhadap kepercayaan publik pada pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS —

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta mengambil keputusan yang obyektif dalam menyikapi hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Selain mesti berlandaskan pada Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat yang telah disahkan, kementerian hendaknya memverifikasi keabsahan dari pengurus Demokrat yang menyetujui KLB dan memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Apalagi kabar yang beredar, mereka yang hadir di KLB bukan pengurus asli.

"Jadi, fakta dan prosesnya diuji. Apakah fakta dan proses itu sesuai dengan AD/ART (Demokrat) dan UU Parpol? Jangan sekadar ada ajuan (pendaftaran kepemimpinan partai), langsung ditindaklanjuti atau diproses begitu saja," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Sebelumnya, salah satu pengagagas KLB, Hencky Luntungan, menyatakan akan menyerahkan dokumen hasil KLB ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk disahkan, minggu ini. Bahkan, sempat direncanakan diserahkan pada Senin (8/3), tetapi hingga petang tak terlihat kehadiran kubu KLB di Kemenkumham.

Di sisi lain, Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Kemenkumham untuk menyerahkan bukti bahwa mereka yang terlibat di KLB bukan pengurus yang sah. Agus yang hadir bersama pimpinan pengurus Demokrat di daerah sekaligus meminta agar Kemenkumham menolak pengesahan hasil KLB dan menyatakan KLB itu inkonstitusional.

Di tengah persetujuan kedua kubu yang saling klaim keabsahan ini, lanjut Asep, penting bagi pejabat di Kemenkumham untuk betul-betul menjadi pejabat publik. Mereka harus bersikap netral, obyektif, dan normatif sesuai perundang-undangan. "Jangan sampai pemerintah terseret oleh karena konflik ini, harus betul-betul obyektif supaya bisa memutuskan dengan adil. Tidak boleh ada keberpihakan," kata Asep.

Verifikasi peserta KLB

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, jika mengacu pada UU Partai Politik, khususnya Pasal 32 dan 33, KLB dilainnya tidak tepat, maka semestinya KLB dinyatakan tidak sah. Sesuai bunyi kedua pasal itu, jika ada perselisihan di internal parpol seharusnya diselesaikan di internal, yaitu melalui lembaga di partai yang menangani perselisihan seperti mahkamah partai. Jika tidak puas dengan putusan mahkamah itu, langkah selanjutnya diserahkan ke pengadilan.

"Jadi, UU Parpol sudah mengatur aturan mainnya. Bukan dengan langsung menggerek KLB," ujar Feri. KLB seharusnya mengikuti AD/ART Demokrat terakhir yang telah disahkan Kemenkumham, dalam hal ini AD/ART hasil Kongres Demokrat tahun 2020. Ini yang penting untuk dicermati Kemenkumham karena Demokrat kubu Agus menyatakan KLB tak sesuai AD/ART. Selain KLB belum ada persetujuan dari Majelis Tinggi Demokrat, peserta yang hadir juga dinyatakan bukan ketua DPD atau DPC Demokrat yang asli.

"Maka, Kemenkumham juga harus mengecek ketua DPC dan DPD Demokrat yang asli. Daftar kepemimpinan yang sah bisa dicek di KPU. Daftar di KPU harus jadi rujukan," katanya. Feri menekankan, obyektivitas Kemenkumham dalam persoalan Demokrat sangat penting karena keputusan Kemenkumham kelak bisa berimbas pada kepercayaan publik terhadap pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, yang diwawancara sesuai menerima dokumen yang diserahkan Agus, menyatakan akan menelaah laporan itu. Adapun terkait KLB Demokrat, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya me-

nyatakan, hasil KLB akan diverifikasi dengan berlandaskan pada UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat.

Mengenai peserta KLB Demokrat, sejumlah elite Demokrat di bawah kepemimpinan Agus berulang kali menyebut mereka bukanlah ketua DPC dan DPD Demokrat yang sah. Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Kotamobagu, Sulawesi Utara, Gerald Piter Runtuthomas, melalui video yang disiarkan dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (8/3), mengungkapkan, dirinya diiming-imingi uang Rp 100 juta untuk ikut KLB dan memilih Moeldoko. Saat itu Gerald menyadari tidak memiliki hak suara. Pemilik hak-suara sah adalah ketua DPC. Namun, ia mengaku tetap dipaksa hadir. Setelah KLB terlaksana dan Moeldoko terpilih, Gerald mengaku menerima Rp 5 juta.

Uang transportasi

Hencky Luntungan membantah iming-iming yang Rp 100 juta itu. Uang yang diberikan kepada peserta KLB dibebaskan sebagai uang transportasi dan akomodasi.

Ia juga membantah peserta KLB yang disebut bukan pemilik suara sah. "Siapa yang bilang abal-abal kalau kongres luar biasa? Kan, kongres luar biasa bukan berarti sesuatu yang tabu," ujarnya.

Mengenai kapan akan menyerahkan dokumen hasil KLB ke Kemenkumham, ia mengatakan saat ini masih tahap finalisasi. "Dalam minggu ini (diserahkan)," ujarnya.

Sementara itu, Marzuki Alie bersama lima orang lainnya yang dipecah oleh Demokrat di bawah kepemimpinan Agus, menggugat surat keputusan pemecatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Marzuki, langkah ini ditempuh karena hasil KLB Demokrat yang membatalkan pemecatan keanekaragaman Demokrat tersebut belum disahkan oleh Kemenkumham.

"Karena hasil KLB belum diakui Kemenkumham, kami posisinya masih dipecah. Karena itu, kami ajukan keberatan itu," ujarnya. (PDS/BOW)

KILAS POLITIK & HUKUM

Parpol Perlu Beri Dukungan untuk Perempuan

Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2021, Kaucus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) menggelar pameran foto dan rangkaian diskusi, 8-18 Maret 2021. Sebanyak 124 anggota DPR dan 42 anggota DPD perempuan memajang tiga potret diri yang menggambarkan kegiatan mereka masing-masing. Acara dibuka oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ketua Presidium KPP-RI Diah Pitaloka mengatakan, kegiatan untuk mengapresiasi anggota parlemen perempuan yang dengan segala kesulitannya dapat berkiprah di politik. Sekretaris Panitia Pameran Foto dan Diskusi KPP-RI Netty Prasetyani mengatakan, parpol perlu memberikan dukungan kepada perempuan, mulai dari pencalonan hingga bekal pendidikan politik. "Kalau kita di-biarkan bersaing bebas, akan banyak yang jatuh menjadi korban karena tidak mudah mengatasi keteringgalan lantaran titik mulainya sudah berbeda antara caleg (calon anggota legislatif) perempuan dan laki-laki," tuturnya. (REK)

Pengurus Peradi ke "Kompas"



KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yang dipimpin Ketua Harian Dwiwanto Prihantoro, berkunjung ke Redaksi Kompas, Senin (8/3/2021) malam. Rombongan advokat itu diterima Wakil Pemimpin Umum Kompas Budiman Tanurejdo dan membahas berbagai persoalan kemasyarakatan serta kebangsaan. Advokat dinilai perlu meningkatkan lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap masalah bangsa. Peradi dan Kompas pun bersepakat untuk lebih memperkuat kerja sama.

SENGKETA PILKADA

Sidang Sabu Raijua Bergulir, Hindari Proses Hukum Ganda

JAKARTA, KOMPAS — Dengan bergulirnya persidangan sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, di Mahkamah Konstitusi, Senin (8/3/2021), lembaga negara lain seyogyanya tak mengambil langkah hukum hingga persidangan tuntas. Hal ini untuk menghindari adanya proses hukum ganda terkait status kewarganegaraan asing bupati terpilih Sabu Raijua Orient Rivu Kore yang justru bisa mengganggu persidangan MK.

Dalam persidangan kemarin, dua pemohon berharap majelis hakim panel dapat mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan sengketa yang melampaui tenggat waktu pengajuan dan tidak memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara.

Majelis hakim panel MK yang memeriksa perkara itu diketuai Saldi Isra dengan hakim anggota Enny Nurbaningsih dan Suhartoyo.

Kuasa hukum pemohon perkara nomor 133/PHP.BUP.XIX/2021, Adhitya Nasution mengatakan, fakta bahwa bupati terpilih Sabu Raijua, Orient, merupakan warga negara asing di ketahu setelah penetapan pemenang Pilkada 2020. MK diminta untuk memahami kondisi tersebut.

Karena itu, aspek formil seperti aturan tenggat waktu yang diatur dalam Pasal 157 Ayat (5) dan ambang batas selisih perolehan suara di Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diminta untuk dikesampingkan.

Pemohon menyadari bahwa dalam sengketa hasil pilkada Sabu Raijua ini, ambang batas

perolehan suara cukup tinggi, yaitu 18,19 persen. Jika melihat ketentuan di UU Pilkada, selisih itu melebihi syarat ambang batas perolehan suara. Namun, pemohon berpendapat, tahap pencalonan adalah bagian yang fundamental dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Syarat calon adalah warga negara Indonesia.

"Pemohon mengetahui segala keterbatasan terkait ambang batas perolehan suara. Akan tetapi, terdapat fakta yang nyata dan tidak dapat diungkiri bahwa setelah penetapan pemenang bupati dan wakil bupati Sabu Raijua ternyata bupati terpilih merupakan warga negara asing," kata Adhitya.

Sementara itu, perkara nomor 134/PHP.BUP.XIX/2021 diajukan oleh pemantau pemilu, yaitu Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo). Kuasa hukum Amapedo, Yafet Rissy, mengatakan, pemohon tak semata mempersoalkan selisih penghitungan suara, tetapi isu konstitusionalitas dan hukum moral dari sejumlah keputusan KPU Sabu Raijua.

Tahapan pemilihan terutama pencalonan bupati Sabu Raijua dianggap cacat formil. Menurut dia, ada implikasi konstitusional, hukum, dan moral ketika diketahui calon bupati pasangan nomor urut 2, yakni Orient, dinyatakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, pada 1 Februari 2020, memegang kewarganegaraan AS.

Karena itu, pemohon meminta MK melakukan penemuan hukum demi mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum status kewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua. Me-

reka juga meminta MK membatalkan sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua terkait penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan hasil pemilihan, dan penetapan bupati/wakil bupati terpilih.

Ketua majelis panel Saldi Isra kemudian menerima perkara tersebut. Alat bukti yang dibawa pemohon disahkan. Selain itu, pemohonan untuk menjadi pihak terkait juga diterima. Agenda sidang berikutnya adalah jawaban termohon atau KPU, mendengarkan keterangan dari

Bawaslu, dan pemeriksaan pihak terkait. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Senin, 15 Maret 2021.

Hindari proses ganda

Peneliti Kode Inisiatif, Ihsan Maulana, berharap MK mampu menjadi lembaga yang memberikan jawaban atas problem di Pilkada Sabu Raijua. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat akan menjadi tumpuan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan elektoral.

Persoalan bupati terpilih ber-

kewarganegaraan asing itu dalam tahap penelitian di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

"Karena kasus sudah bergulir di MK, para pihak yang meneliti masalah hukum dalam perkara ini, yaitu Kemenkumham dan Kemendagri, harus bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keputusan yang menggangu penyelesaian sengketa pilkada di MK. Jangan sampai ada proses hukum ganda dan keputusan yang menggangu proses di MK," kata Ihsan. (DEA)

SEREMONIA

Kompas Talk, Bedah Buku "Menerangi Negeri: 75 Tahun PLN"

Pada Kamis (4/3/2021) Harian Kompas bersama PLN menyelenggarakan Kompas Talk, Bedah Buku *Menerangi Negeri: 75 Tahun PLN* yang berisikan cerita dan buku *Menerangi Indonesia Memajukan Bangsa* yang berisikan foto. Memperingati 75 tahun sejak masa berdirinya, PLN berdiskusi mengenai strategi PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan dapat dijangkau oleh lebih dari 270 juta penduduk dari Sabang sampai Merauke. Dengan moderator Tommy Tri Nugroho (Harian Kompas), Pascalis Iswari (Kompas TV),



Dok. Agung Ihsan/Djohan

dan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini selaku *keynote speech*, bedah buku yang dilaksanakan secara daring ini menyajikan narasumber Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, penulis buku *75 Tahun PLN*

Menerangi Negeri Tri Hariyono, kurator foto buku *Menerangi Indonesia Memajukan Bangsa* Arban Rameby, Kepala Pusat Studi Energi UGM Deendarlianto, serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana. [AYA]

RUU Pemilu dan Pragmatisme Politik

Hampir dapat dipastikan RUU Pemilu urung dibahas karena akan ditarik dari Prolegnas Prioritas 2021. Hal ini dinilai menandakan pragmatisme politik yang lebih dominan ketimbang ikhtiar memperbaiki sistem politik.

Rancangan Undang-undang Pemilu yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat hampir dapat dipastikan tidak akan dibahas pada tahun ini. Komisi II DPR selaku pengusung telah menarik usulan RUU Pemilu. Menurut rencana, Selasa (9/3/2021) ini, akan digelar rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya untuk mencabut RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

Di tengah keputusan politik tersebut, DPR juga sebenarnya menyadari realitas politik kekinian yang memerlukan respons melalui perbaikan regulasi pemilu sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem politik dan demokratisasi yang lebih baik. Tanpa revisi UU Pemilu, hal itu sulit dicapai.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung termasuk yang meyakini perubahan itu bagaimanapun akan dilakukan. Walaupun perubahan tidak terjadi tahun ini, paling tidak masih ada waktu tahun depan, dua tahun lagi, atau waktu yang tidak pasti. Menurut dia, saat ini hanya momentumnya saja yang belum tepat. Sejak awal Komisi II DPR menginginkan adanya perubahan UU Pemilu.

"Kami juga telah memetakan masalah-masalah yang harus diatasi di revisi. Intinya saya ingin kita semua, walaupun dalam beberapa bulan atau tahun ini tidak lakukan penyempurnaan, tetapi perbaikan ini jangan diurungkan. Penyempurnaan sistem politik dan demokrasi harus dilakukan," kata Doli dalam diskusi daring bertajuk "Quo Vadis RUU Pemilu," yang diadakan Sekretariat Jenderal DPR bersama dengan Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis pekan lalu.

Dalam kerangka Komisi II DPR, kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada dalam RUU

Pemilu adalah bagian dari paket UU Politik. Kodifikasi itu jadi langkah pertama dari penerapan sistem politik dan demokrasi melalui berbagai revisi UU. Ada delapan revisi UU di politik yang ditargetkan dapat diselesaikan DPR hingga 2024. Delapan UU itu ialah UU Pemilu; UU Pilkada; UU Partai Politik; UU Pemerintahan Daerah; UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD2); UU DPRD; UU Pemerintah Desa; serta UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

DPR berharap dapat menyelesaikan delapan UU paket politik itu dalam satu periode DPR (2019-2024). Dengan demikian, setelah 2024, Indonesia dapat memiliki sistem politik yang lebih baik. Revisi UU Pemilu dianggap sebagai pintu masuk memulai perbaikan sistem politik dan demokrasi di Tanah Air. Namun, pada kenyataannya pembahasan RUU Pemilu terkendala di awal.

Padahal, RUU Pemilu juga diharapkan bisa memangkas praktik buruk dalam sistem politik dan pemilu Indonesia, seperti politik uang dan politik biaya mahal. Namun, dalam realitas politik, persoalan eksistensi parpol menjadi pertimbangan pragmatis yang cukup kuat. Sebab, revisi UU Pemilu sudah pasti akan berpengaruh terhadap eksistensi parpol. Sebagai contoh, wacana kenaikan ambang batas raihan suara untuk dapat diikutkan dalam penghitungan kursi parlemen (*parliamentary threshold*). Di RUU Pemilu, ambang batas itu dinaikkan menjadi 5 persen untuk tingkat pusat, 4 persen di tingkat provinsi, dan 3 persen untuk tingkat kabupaten/kota. Adapun di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ambang batas parlemen hanya untuk tingkat pusat, yakni 4 persen.

Selain kepentingan terkait

dengan eksistensi parpol, perdebatan mengenai RUU Pemilu juga sangat dipengaruhi kepentingan pemerintah. Sebab, dalam rencana pembahasan RUU Pemilu ini, pemerintah adalah pihak yang menolak pembahasan. Alasan yang digunakan ialah karena pemerintah ingin semua pihak fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Alasan ini dipertanyakan masyarakat sipil karena berkebalikan dengan logika yang digunakan pemerintah ketika menginginkan Pilkada 2020 tetap digelar. Saat itu banyak pihak menginginkan pemerintah tidak meneruskan penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Alasannya pandemi yang berkecamuk. Namun, pemerintah meneruskannya dengan alasan itu adalah bagian dari agenda ketatanegaraan yang harus dilakukan. Bahkan, pilkada disebut sebagai sarana untuk menghidupkan perekonomian di daerah.

Kini, sebaliknya, dalam pembahasan RUU Pemilu, pemerintah meminta agar ditunda dengan alasan semua pihak fokus dalam mengatasi dampak pandemi. Sementara sebelumnya RUU (kini menjadi UU) Cipta Kerja dibahas dengan kilat selama enam bulan oleh DPR, juga di masa pandemi. Padahal, secara risiko, dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembahasan RUU Cipta Kerja ketika itu lebih nyata lantaran memantik protes dari berbagai kalangan.

Jadwal pilkada

Di sisi lain, parpol berargumentasi agar jadwal pilkada tidak perlu dinormalisasi. Sebelumnya, dengan UU No 10/2016, pilkada serentak nasional diatur untuk dilakukan pada 2024, diselaraskan dengan tahun yang sama dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ketentuan di UU Pilkada itu disebut belum dilak-



Petugas memeriksa kelengkapan logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di GOR Wujil, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 4 Desember 2020. Setelah pilkada pada 2020, pilkada serentak selanjutnya akan digelar pada 2024. Pada tahun yang sama, akan digelar pula pemilu presiden dan pemilu legislatif.

sanakan sehingga sebaiknya dilaksanakan dulu sebelum direvisi. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh pemerintah. Sementara di RUU Pemilu diatur agar pilkada dilakukan pada 2022 dan 2023 sehingga tidak berbenturan dengan Pemilu 2024.

"Memang sejak awal sudah diperkirakan bahwa hal ini akan menjadi titik tarik menarik di antara parpol. Namun, seharusnya DPR sebagai pengusul tidak begitu saja berbalik menolak suatu RUU yang sejak awal mereka inisiasi. Perubahan sikap ini menunjukkan inkonsistensi DPR," ujar Lu-

cius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.

Mudiyati Rahmatunissa, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Unpad memprotes pragmatisme sikap DPR ini. Menurut dia, jika mau berbasis pertimbangan rasional, RUU Pemilu dapat diteruskan sepanjang memperhitungkan *cost-benefit analysis*. Namun, sayangnya, menurut Mudiyati, nuansa pragmatisme lebih kental daripada pertimbangan rasional perlunya UU Pemilu itu direvisi.

Ia juga mengkritik fokus parpol yang menyoroti enam

isu krusial semata yang berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Enam isu itu adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu, mekanisme konversi suara, dan keserentakan pemilu. Padahal, banyak isu lain yang juga sangat penting, seperti penataan kelembagaan penyelenggara pemilu serta akses pada pemilu bagi kelompok minoritas dan difabel.

Anggota Dewan Pengawas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengingatkan, tidak adanya

revisi UU Pemilu memberi beban berat kepada penyelenggara pemilu. Tanpa revisi UU Pemilu, sejumlah kelemahan pada Pemilu 2019 tidak dapat dievaluasi, seperti petugas yang kelelahan, hasil pemilu yang lama diketahui, tenggelamnya isu lokal, dominasi isu pilpres, dan banyaknya suara rakyat yang tak sah.

Selain itu, kata dia, risiko penyelenggaraan pemilu yang kurang berkualitas juga semakin besar karena dalam tahun yang sama akan dilakukan tiga jenis pemilihan sekaligus, yaitu pilpres, pileg, dan pilkada.

(RINI KUSTIASIH)

Pembukaan Masa Sidang IV DPR RI



Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun 2020-2021 DPR seusi reses diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna itu dihadiri 86 anggota DPR secara fisik dan 260 anggota secara virtual. Rapat dihadiri Ketua DPR Puan Maharani beserta para Wakil Ketua DPR, yaitu Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel.

PEMILU 2024

KPU Tetap Butuh Revisi UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul rencana pencabutan Rancangan Undang-Undang Pemilu dari Program Legislasi Nasional 2021 pada Selasa (9/3/2021), Komisi Pemilihan Umum kembali menyuarakan pentingnya regulasi setingkat undang-undang guna meringankan beban dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Pasalnya hal itu tak bisa diatur dengan peraturan KPU.

"Memang ada beberapa hal yang dapat kami atur dengan perubahan PKPU, tetapi ada yang tetap memerlukan payung hukum lebih tinggi. Dalam konteks itu, walaupun RUU Pemilu dicabut dari Prolegnas, kami meminta agar ada kemungkinan bagi kami untuk mengusulkan beberapa poin revisi terbatas terhadap UU Pemilu atau dibuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang)," kata anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, saat dihubungi, Senin (8/3).

Fokus dari revisi terbatas atau perppu yang diusulkan itu terutama menyangkut pemberian ruang bagi KPU

untuk memodifikasi pelaksanaan tahapan. Ini agar tahapan pemilu dan pilkada lebih ringan sehingga lebih memungkinkan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Revisi terbatas tersebut, antara lain, kemungkinan menghilangkan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, pendaftaran partai politik dengan Sistem Informasi Parpol (Sipol), dan penggunaan rekapitulasi elektronik (e-rekap). Di luar itu, KPU masih mengkaji hal-hal di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang perlu direvisi untuk meringankan beban penyelenggara pemilu. Kajian ini menyerap pula masukan dari seluruh ketua KPU di daerah.

Nantinya hasil kajian berikut usulan revisi terbatas UU Pemilu akan diserahkan kepada pemerintah dan DPR saat rapat konsultasi.

RUU Pemilu dicabut

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi (Balag) DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan, Komisi II DPR sebagai pengusung RUU Pemilu telah menarik usulan RUU Pemilu. Hasil rapat Badan Musywa-

rah (Bamus) DPR juga telah menyepakati agar dilakukan rapat kerja (raker) Balag DPR bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mengeluarkan RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Menurut rencana, raker akan digelar Selasa ini.

Mengenai permintaan KPU, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim mendukungnya. Ini terutama untuk penggunaan teknologi informasi sehingga dapat meringankan beban penyelenggara pemilu.

Namun, menurut dia, permintaan KPU itu hanya bisa dipenuhi jika pemerintah berubah sikap. Sebab, sejauh ini pemerintah menolak revisi UU Pemilu karena menilai UU yang berlaku sekarang masih relevan digunakan di 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa mendorong KPU agar terlebih dulu mengkaji serta membuat simulasi pemilu dan pilkada pada 2024. Dari hal itu, KPU dapat mengajukan usulan mengenai dukungan regulasi apa saja yang dibutuhkan. (REK)

STRATEGI PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN

Minggu, 21 Maret 2021 | Pukul 13.00 – 16.30 WIB

Zoom icon

Mohamad Andoko, MM, QWP®, CFP®, AEPP
Perencana Keuangan Independen dan Co Founder OneShildt Financial Planning, CEO PT Cerdas Keuangan Indonesia

Sutrisno, M.Ak, CPA, CLI, CFP
Tax Planner OneShildt Financial Planning dan Partner KAP Sukardi Hasan dan Rekan

Juanda Setiawan
Moderator

Biaya Investasi
Rp 500.000
sudah termasuk PPN

Early Bird
sd 15 Maret

Rp 300.000
kode kupon: webinarpajak

PENDAFTARAN & PEMBAYARAN:
22 Februari – 20 Maret 2021
institute.kompas.id

KOMPAS 021 25676000 0812-9005-0800

@kompas_institute | kompasinstitute | kompasinstitute

4 | Internasional

Satu Dekade Perang yang Mengubah Timur Tengah

Sudah 10 tahun perang melanda Suriah, tak ada tanda-tanda bakal segera berakhir. Berbagai upaya mencari solusi telah dilakukan, tetapi selalu kandas. Mengapa bisa demikian?

Musthafa Abd Rahman
dari Kairo, Mesir

Pada Maret ini, genap 10 tahun perang saudara berkecamuk di Suriah. Setelah 10 tahun perang saudara, banyak kisah pilu terekam di negeri berpenduduk sekitar 17,5 juta jiwa itu. Perang saudara bermula dari hanya gerakan protes sejumlah pemuda di kota kecil Daraa, Suriah selatan, terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad pada 6 Maret 2011. Protes itu lalu meluas ke beberapa kota di Suriah pada 15 Maret 2011.

Gerakan protes itu ternyata tidak hanya mengubah peta Suriah, tetapi juga mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Profil negeri Suriah yang seksi memang cukup menggiurkan kekuatan regional dan internasional untuk melakukan intervensi militer secara langsung di negeri itu. Bagi kekuatan-kekuatan tersebut, Suriah jadi pijakan untuk menyelamatkan kepentingan mereka, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di Timur Tengah.

Suriah memiliki semua nilai strategis dalam konteks kacamata geopolitik. Negeri itu bertepi ke Laut Tengah yang menjadi tepian negara-negara pusat peradaban Yunani, Romawi, dan Islam. Laut Tengah bagian timur juga diperkirakan menyimpan 120 triliun meter kubik gas yang kini menjadi perebutan negara-negara yang bertepi ke Laut Tengah timur.

Negeri Suriah secara geografis berbatasan langsung dengan Israel, membuat Suriah menjadi sangat penting dalam kacamata konflik Arab-Israel. Dalam konteks dunia Arab, Suriah berbatasan dengan Lebanon di sebelah barat, dan Irak di sebelah timur, serta Jordania di sebelah selatan. Dalam konteks peta Timur Tengah, negara itu berbatasan dengan Turki di sebelah utara.

Adapun dalam peta politik kekuasaan di Suriah, situasinya juga cukup sensitif. Kaum minoritas Syiah Alawite, yakni mazhab yang dianut keluarga besar Assad, berkuasa di

Pengungsi akibat Perang di Suriah

Lebih dari 5,58 juta pengungsi dan 6,7 juta warga telantar yang terdaftar PBB sejak 2011.

Per 17 Februari 2021



Sumber: UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi)/Reliefweb, SOHR, angka berdasarkan kategori hingga 9 Des 2020

tingkah mayoritas penduduk Sunni di negeri itu sejak 1969. Ideologi nasionalisme Arab, yang dominan di kancah peta politik dan ideologi di Suriah, berandil besar mengantarkan keluarga besar Assad berkuasa sangat lama di negeri itu.

Saat musim Arab 2010-2011 meletus dari Tunisia, lalu merambat ke sejumlah negara Arab, termasuk Suriah, semua nilai strategis yang dimiliki Suriah segera menjadi rebutan kekuatan regional dan internasional. Inilah mengapa krisis Suriah, meskipun sudah 10 tahun berkecamuk, makin rumit dan belum ada tanda-tanda berakhir dalam waktu dekat.

Benturan kepentingan

Kini sudah terlalu mendalam kaki kekuatan regional dan internasional menginjak bumi Suriah, menghadirkan peta politik baru di negeri itu.

Tentu tidak mudah mereka bersedia meninggalkan bumi Suriah tanpa ada jaminan bahwa kepentingan mereka dilindungi di negeri itu. Kepentingan mereka satu sama lain berseberangan sehingga tak mudah—untuk tidak mengatakan mustahil—mencari titik temu.

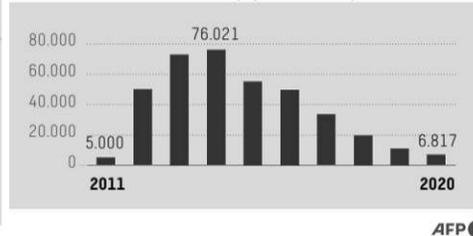
Iran dan loyalisnya, terutama Hezbollah, yang mengirimkan kekuatan militer ke Suriah sejak awal tahun 2013, kini bercokol di sekitar kota Damaskus, khususnya Distrik Sayyidah Zainab, selatan Damaskus, serta di Provinsi Deir El Zor, Suriah timur yang berbatasan dengan Irak. Teheran memandang rezim Assad dan bumi Suriah sebagai akses langsung dalam membangun perlawanan terhadap Israel. Iran juga melihat Suriah, sebagai kekuatan Syiah, bisa membantu terwujudnya impian bulan sabit Syiah yang

Lebih dari 385.000 Korban Tewas dalam 10 Tahun

Pengamat Suriah untuk hak asasi manusia mencatat 387.000 orang tewas, tetapi perkiraan sebenarnya adalah 593.000 korban tewas.

Sipil		Hezbollah	Pasukan pro-rezim
Anak-anak	22.149	52.391	
Wanita	13.804		
Laki-laki	80.952	Milisi Suriah	
		Tentara	
		68.049	
		Milisi lainnya	
		67.923	
		Jihad	
		67.923	
		Pasukan anti-rezim	
		Tidak teridentifikasi	
		428	
		Pemberontak	
		68.409	
		Alliansi Arab-Kurdi	

Jumlah Kematian Per Tahun (sejak Maret 2011)



membentang dari Teheran, Baghdad, Damaskus, hingga Beirut. Karena itu, Iran akan mempertahankan keberadaannya di Suriah dengan harga berapa pun, dengan cara apa pun.

Rusia memasok kekuatan militernya langsung ke Suriah sejak September 2015 dengan dalih menyelamatkan rezim Assad. Mereka telah mendapat imbalan keberadaan secara permanen di Pelabuhan Tartus dan Pangkalan Udara Khmeimim, Provinsi Latakia. Bagi Rusia, kehadiran mereka kembali di Suriah sejak ambruknya Uni Soviet tahun 1989 membuka pintu dan peluang hidupnya kembali pengaruh Rusia tidak hanya di Suriah, tetapi juga Timur Tengah dan Laut Tengah.

Turki pun dengan dalih melindungi keamanan nasionalnya di perbatasan selatan dengan Suriah ikut bercokol di Provinsi Idlib dan wilayah Su-

riah utara lainnya. Kepentingan terbesar Turki di Suriah adalah meredam gerakan milisi Kurdi dari Unit Pelindung Rakyat (YPG) dan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), serta terhentinya arus pengungsi Suriah.

Israel turut masuk ke Suriah lewat serangan udara rutin atas sasaran Iran dan loyalisnya di Suriah. AS juga turut dalam intervensi militer di Suriah dengan menempatkan pasukan daratnya sejak akhir 2015. Misi utama AS adalah memerangi NIIS dan membantu YPG melawan NIIS.

Pertarungan kekuatan regional dan internasional itu, sangat menghambat misi PBB yang ingin mencari solusi politik di Suriah. Hal ini juga membuat rakyat Suriah semakin menjadi korban dan memperparah bencana kemanusiaan dahsyat di negara itu.

KOTA UR

Tempat Nabi Ibrahim dan Peradaban Lahir

Menyembah Tuhan dan mencintai sesama. Demikian antara lain pesan sekaligus perwujudan pertemuan Paus Fransiskus dengan tokoh lintas agama yang digelar di kota Ur, Irak selatan, Sabtu (6/3/2021). Dari kota tempat lahirnya peradaban dan bapak agama-agama Abrahamik itu Sri Paus menekankan agar hadirin menjauhkan permusuhan, bekerja sama memajukan perdamaian dan persatuan umat manusia dari aneka latar belakang.

"Semuanya dimulai dari sini," kata Sri Paus kepada para semua yang hadir dalam ibadah lintas agama di Ur. "Tempat yang diberkati ini membawa kita kembali ke asalnya. Kita telah kembali ke rumah." Dengan saksama Sri Paus mendengar perkataan para perwakilan komunitas iman di Irak yang beragama. Mereka mencoba menyatukan tekad untuk membina kerukunan dalam semangat kebersamaan.

Dalam lawatan apostoliknnya ke Irak, 5-8 Maret, Paus mendarat di beberapa tempat dan berjumpa dengan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang. Sebelum ke Ur, ia bertemu pemimpin spiritual Syiah Irak, Ayatollah Ali al-Sistani di kota suci Najaf. Kunjungan itu menandai momen penting dalam sejarah agama modern dan tonggak sejarah dalam upaya Paus memperdalam dialog dengan agama lain.

Kota kuno Ur terletak di Provinsi Dhi Qar, sekitar 300 kilometer di selatan ibu kota Baghdad. Di Kota itu Abraham atau Nabi Ibrahim diyakini lahir pada 2000 tahun sebelum Masehi (SM). Kota itu terletak di Mesopotamia kuno, salah satu tempat lahirnya peradaban manusia.

The Times of Israel menggambarkan Ur sebagai ibu kota terakhir dinasti Kerajaan Sumeria yang peradabannya berkembang 4.000-5.000 tahun yang lalu. Juga dianggap sebagai kota suci Dewa Bulan Sin dalam agama Sumeria. Khaldea, Sumeria, Akkadia, dan Babilonia semuanya ada di Ur. Situs itu adalah ibu kota kerajaan Sumeria pada milenium keempat dan ketiga SM.

Tempat kelahiran Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Semua agama menganggapnya bapak spiritual mereka.

Masa kejayaan

Para arkeolog memperkirakan kota itu pernah ditinggali orang hingga sebanyak setengah juta orang. Puncak keemasan kota itu diperkirakan berada di bawah pemerintahan Raja Ur-Nammu yang diyakini memerintah pada tahun 2112-2095 SM dan penerusnya. Kota Ur diperkirakan mulai ditinggalkan sekitar 500 SM.

Kota Ur dipercaya sebagai tempat pertama kalinya roda ditemukan. Media Al Jazeera menyebutkan pula kota itu menjadi tempat ditetapkannya undang-undang atau aturan hukum Hammurabi dan tempat minyak pertama kali dibakar sebagai sumber energi. Pada Juli 2016, UNESCO menempatkan Ur dalam daftar Warisan Dunia, bersama beberapa kawasan lain di Irak selatan lain dan situs lainnya, seperti Eridu dan Al-Warka.

Penggalian pada awal 1900-an di Ur menunjukkan, penduduknya menjalani kehidupan mewah karena kota itu makmur dalam penanaman dan perdagangan gandum dan jelai. Penggalian berlanjut hingga hari ini karena masih ada harta karun yang belum ditemukan. Proses itu yakni akan memberikan wawasan lebih jauh tentang salah satu kota progresif pertama di dunia itu.

Selama beberapa dekade, penggalian arkeologi dilarang karena konflik dan masalah keamanan. Namun, para peneliti Irak dan AS mulai melanjutkan penggalian di daerah itu beberapa tahun setelah jatuhnya diktator Saddam Hussein. "Selama musim penggalian tahun 2007 di kota kuno Ur, kami menemukan sekitar 100 artefak yang mencakup teks-teks kuno yang penting," kata Mustafa al-Hussaini, arkeolog yang berbasis di Nasiriyah, Irak.

Amer Abdulrazzaq, Kepala Museum Peradaban Nasiriyah, menjelaskan alasan Ur dinilai penting bagi umat Kristen, Yahudi, dan Muslim. "Tempat kelahiran Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Semua agama menganggapnya bapak spiritual mereka. Itu alasannya, mengunjungi tanah kelahirannya dianggap sebagai salah satu ritual keagamaan terpenting dalam ziarah Kristen," katanya.

Sri Paus menyerukan persaudaraan dari kota istimewa itu. Yahudi, Kristen, dan Islam tidak seharusnya berseteru, tetapi membangun dialog dan toleransi. "Dari tempat ini, di mana iman kita lahir, dari negeri bapak kita Abraham, mari kita tegakkan, Tuhan itu penyayang. Penghujatan terbesar ialah mencemarkan nama-Nya dengan membenci saudara-saudari kita lainnya," kata Paus. "Permusuhan, ekstremisme, dan kekerasan tidak lahir dari hati yang religius, tetapi adalah bentuk pengkhianatan terhadap agama." (AFP/AP/BEN)

KILAS LUAR NEGERI

Kabel Listrik Bawah Laut Terpanjang Dibangun

Siprus, Yunani, dan Israel pada Senin (8/3/2021) menandatangani perjanjian awal untuk membangun kabel listrik bawah laut terpanjang (1.500 km) dan terdalam (2.700 meter) di dunia. Jaringan kabel tersebut akan melintasi dasar laut Mediterania dengan biaya sekitar 900 juta dollar AS atau sekitar Rp 12,9 triliun dan menghubungkan jaringan listrik ketiga negara itu. "Proyek yang disebut Interkoneksi Euro-Asia itu akan menyediakan sumber daya listrik cadangan pada saat-saat kondisi darurat," kata Menteri Energi Israel Yuval Steinitz, yang berada di Nikosia, Siprus, untuk menandatangani nota kesepahaman dengan mitranya. Jaringan itu akan menyediakan kapasitas 1.000-2.000 megawatt dan proyek rampung pada 2024. (REUTERS/CAL)

KILASAN KAWAT SEDUNIA



Hanoi

Siapa sangka berpose yang pas saat berfoto untuk diunggah di media sosial sangat penting. Selain agar hasilnya menarik, foto indah akan membuat lebih percaya diri dan menunjang usaha daring. AFP, Senin (8/3/2021), melaporkan, seorang pemengaruh di Hanoi, Vietnam, Pham Kieu Ly yang memiliki ratusan ribu pengikut di Instagram dan Tiktok membuat kursus berfoto seharga 130 dollar AS. Dalam paket kursus 1,5 hari, Ly mengajari cara tersenyum, di mana meletakkan tangan yang pas, dan ke mana wajah harus menghadap. Ia juga mengajari fotografer pemula cara berswafoto yang bisa menghasilkan gambar bagus. Banyak orang di kelasnya ingin belajar berpose dan mengambil foto untuk pekerjaan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri. Sejak dibuka pertama kali pada September 2020, kelas Ly telah menarik sekitar 500 pengikut dari berbagai jenis pekerjaan, termasuk pedagang daring dan agen properti. (AFP/ADHD)



KELUARGA KERAJAAN INGGRIS

Rasisme Mendorong Harry-Meghan Keluar

LOS ANGELES, SENIN — Hidup sebagai pangeran dan putri di istana Kerajaan Inggris tak seindah cerita dongeng, bahkan bagaikan mimpi buruk. Rasisme, kekerasan verbal, terancamnya kesehatan mental, dan bayangan tragis nasib ibunya membuat Pangeran Harry dan istrinya, Megan Markle, meninggalkan keluarga kerajaan. Pengalaman buruk paling dirasakan Meghan (39) setelah menikah membuat Harry, tiga tahun lalu. Ia sempat mengalami krisis kesehatan mental sampai ingin bunuh diri, tetapi tidak ada satu pun anggota keluarga kerajaan yang peduli. Semua pengalaman itu diceritakan Meghan saat diwawancarai produser dan pembawa acara televisi ternama AS, Oprah Winfrey, selama dua jam di stasiun CBS, AS, Minggu (7/3/2021) malam atau Senin pagi WIB. Meghan juga menuding keluarga Kerajaan Inggris rasisme karena pernah mengutarakan kekawatiran akan seberapa gelap warna kulit anak mereka, Archie (1), nanti.

Meghan mendapat cerita obrolan keluarga Kerajaan Inggris itu dari Pangeran Harry saat ia masih hamil tiga bulan. Karena khawatir dengan warna kulitnya, Archie tidak akan mendapatkan gelar pangeran. Meghan sebenarnya tidak mempermasalahkannya gelar pangeran Archie. Namun, gelar pangeran itu rupanya diikuti dengan segala jaminan perlindungan dan keamanan dari istana. "Saya hanya ingin Archie terlindungi dan bisa hidup dengan aman," kata Meghan yang kini tengah hamil keduanya, diperkirakan anak perempuan.

Rasisme

Meghan menggambarkan kehidupan di lingkungan Kerajaan Inggris itu sangat tidak menyenangkan bahkan setelah tiga tahun menikah. Ada beberapa anggota keluarga kerajaan yang rasisme tetapi Meghan tak mau menyebutkan nama. Pada kesempatan itu ia menceritakan Kate Middleton, istri Pangeran William, membuatnya menanggung sebelum upacara pernikahannya karena Kate mengkritik pedas gaun yang dipakai Putri Charlotte, yang akan membawa bunga saat pernikahannya dengan Harry. "Tetapi, cerita yang dimuat surat kabar dibalik. Saya yang dituduh membuat Kate menanggung. Semua orang di istana tahu itu tidak benar. Ini jelas membunuh karakter saya. Saya baru sadar, saya tidak dilindungi dan bahkan keluarga kerajaan akan berbohong demi melindungi sesama anggota keluarganya yang lain," kata Meghan.

Harry dan Meghan sama sekali tidak menyinggung Ratu Elizabeth karena masih menghormatinya. Namun, Meghan mengaku ia sengaja dibungkam oleh kerajaan karena saat ia mengadu menerima perlakuan rasisme, tidak ada satu pun yang datang menolong. "Waktu itu saya sudah merasa tidak mau hidup lagi. Itu pikiran yang menakutkan. Saya ingat Harry waktu itu memeluk saya," kata Meghan sambil menghapus air matanya di depan Oprah.

Dalam wawancara itu, Harry (36) juga sempat bercerita bahwa ia tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan dari keluarganya sejak keluar dari istana dan mundur dari tugas serta tanggung jawab kerajaan. Pangeran Charles, ayahnya, pernah satu waktu tidak mau menerima telepon anaknya itu.

Pengumuman Harry dan Meghan untuk mundur dari tugas dan tanggung jawab Kerajaan Inggris pada Januari 2020 memicu krisis di keluarga kerajaan. Istana Buckingham, bulan lalu, membenarkan keputusan pasangan itu yang ingin hidup mandiri di AS. Harry mundur dari tugas dan tanggung jawab kerajaan karena ti-

dak paham urusan itu.

Harry juga mengaku khawatir sejarah akan berulang. Ia tidak mau apa yang terjadi pada ibunya, Putri Diana, terulang lagi. Putri Diana tewas terbunuh dalam kecelakaan pada tahun 1997 saat mobilnya melaju kencang karena dikejar paparazzi. "Kalau ibu saya tahu apa yang terjadi sekarang, dia pasti akan sangat sedih dan marah," kata Pangeran Harry.

Naif

Ketika berbicara soal hubungannya dengan Pangeran Charles dan Pangeran William, Harry merasa kecewa dengan ayahnya. Padahal, Harry berharap ayahnya akan mengerti mengingat ayahnya pun pernah mengalami tekanan serupa dari istana ketika mendiang ibunya masih hidup.

"Ayah dan kakak saya terjebak pada monarki dan tidak bisa meninggalkan kerajaan. Meski begitu saya tetap mencintai mereka," kata Harry. Pangeran Harry mengaku, dirinya dan Meghan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan di dalam keluarga kerajaan. Walau telah berusaha keras untuk bertahan, tidak juga berhasil. "Saya sedih karena ini harus terjadi," ujarnya.

Dalam wawancara itu, Harry dan Meghan juga sempat menunjukkan kehidupan mereka sekarang sebagai warga biasa di kawasan permukiman pinggir pantai, Montecito, California, AS. "Kehidupan kami sekarang sudah seperti dongeng yang berakhir dengan cerita bahagia. Malah jauh lebih indah ketimbang dongeng yang biasa kita dengar," kata Meghan.

Sampai semalam pukul 22.00 WIB, belum ada komentar resmi dari Istana Buckingham terkait masalah itu. Surat kabar Sunday Times Inggris, mengutip sumber anonim, melaporkan, ratu tidak mau menentongnya. (REUTERS/AFP/AP/LUK)



Paus Fransiskus melambaikan tangan saat ia tiba untuk merayakan misa di udara terbuka stadion olahraga di Irbil, Irak, Minggu (7/3/2021). Ribuan orang hadir pada misa di hari ketiga rangkaian lawatannya ke Irak. (AFP PHOTO/HADI MIZBAN)



Perempuan pedagang kaki lima menonton aksi menyambut Hari Perempuan Sedunia di kawasan Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Senin (8/3/2021). Mereka menyuarakan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia, di antaranya masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan serta ketidaksetaraan dalam berbagai hal.

Perempuan Punya Kesempatan yang Setara

Peringatan Hari Perempuan Internasional 2021 menjadi momen untuk merefleksikan kembali pencapaian perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak kerja yang layak.

JAKARTA, KOMPAS — Di berbagai bidang pekerjaan, perempuan kerap kali mendapatkan diskriminasi hak bekerja. Norma sosial dan budaya patriarki menjadi penyebab.

Director of Origin Artistic Brunei Darussalam Siti Kamaruddin mengatakan, sebelum berkecimpung sebagai sutradara, dia menjadi penulis skenario untuk seri televisi. Kebanyakan orang di sekitarnya menyangkal profesi itu, perempuan dianggap lebih cocok tampil di layar televisi.

Oleh karena itu, sekitar 20 tahun lalu, Siti sempat menjadi presenter televisi meski dia kemudian merasa pilihannya itu tidak sesuai dengan hasrat. Memasuki usia 30, Siti memutuskan mengikuti kata hatinya.

"Saya tidak mempunyai latar pendidikan perfilman sama sekali, tetapi saya mencintai film sejak kecil. Orang tua menyekolahkan saya ke Inggris untuk studi Ilmu Kimia dan sempat mengajar bidang ilmu itu. Meski ditentang, kecintaan saya terhadap film tetap besar," ujarnya dalam webinar "International Women Day Mentoring" yang digelar Mission of Canada to ASEAN, Senin (8/3/2021), di Ja-

karta. Siti belajar perfilman ke beberapa negara tetangga. Hingga akhirnya, dia mendapat sebutan perempuan sutradara pertama asal Brunei Darussalam.

Anggota Staf Kantor Kerja Sama Luar Negeri Lembaga Ketahanan Nasional RI, Letkol Sus Ratih Pusparini, menceritakan, tantangan terbesar ketika ia memutuskan menjadi tentara datang dari orangtua. "Budaya agama di lingkungan masyarakat saya juga memandang sebelah mata profesi ini," ujar Ratih yang pernah menjadi perempuan pertama TNI dalam misi perdamaian PBB di Kongo tahun 2008.

Penugasan militer di daerah rawan perang pernah dia jalani. Misalnya, pada 2012 dia diberangkatkan ke misi perdamaian PBB di Lebanon. Dia membuktikan bahwa perempuan bisa berperan di garis terdepan.

Tidak kaku

Kuasa Usaha ad interim Misi Amerika Serikat untuk ASEAN, Melissa A Brown, mengatakan, pencapaiannya seperti sekarang tak mudah dilalui. Sebagai diplomat, dia harus melalui jenjang dan struktur karier panjang.

Di antara sesama perempuan diplomat, dia mengamati, sering terjadi persaingan tidak sehat. Sistem komando penugasan juga terkesan kaku untuk perempuan pekerja.

"Atasan saya hampir selalu laki-laki. Baru lima tahun terakhir, saya mempunyai atasan seorang perempuan," ujarnya.

Associate Professor of Journalism University of Philippines Yvone Chua mengatakan, sudah 40 tahun menjadi jurnalis. Pada awal kariernya, dia pernah berhadapan dengan pandangan misogini masyarakat dan lingkungan kantor tempatnya bekerja.

"Jumlah wartawan perempuan masih sedikit. Mungkin hanya sepertiga dari total. Apalagi, jumlah perempuan menduduki jabatan struktural," ujar dia.

Namun, situasi itu bukan berarti membuat kerja jurnalistik menurun. Menurut dia, dalam setiap rapat redaksi, dia berusaha agar isu kesetaraan jender tetap punya ruang.

Executive Director of Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IB-CWE) Maya Juwita menceritakan, di korporasi, masih ada

manajemen perusahaan yang tidak ramah terhadap perempuan. Karyawan perempuan, misalnya, tidak diberikan peluang duduk di struktural. Mereka tidak diberi kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan.

"Padahal, perempuan berhak menjadi pemimpin. Kalau pun jadi pemimpin, mereka tetap bisa menampilkan sisi feminin dan kehangatan untuk organisasi. Mereka tidak harus bersikap dan berpenampilan seperti laki-laki," ujarnya.

Suarakan kesetaraan

Peringatan Hari Perempuan Internasional juga digelar di sejumlah daerah. Di Banda Aceh, Provinsi Aceh, puluhan anak muda mengkampanyekan perlindungan, keadilan, dan melawan segala bentuk kekerasan pada perempuan.

Aktivitas perempuan dari Institute Ungu Faiza Mardzoeki mengatakan, anak muda, terutama perempuan harus memiliki pengetahuan tentang hak perempuan. "Mereka adalah calon-calon pemikir dan penggerak isu perlindungan dan pemenuhan hak perempuan," kata Faiza.

Desakan juga disuarakan aktivis perempuan di Sumatera Barat yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Pengesahan RUU PKS itu mendesak karena tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk di Sumbang.

"Sebenarnya hati dan pikiran kami berteriak, tapi kami diam karena merasa sudah sangat kecewa. Pemerintah menganggap kekerasan seksual sangat sepele. Mereka lupa kekerasan seksual itu adalah persoalan sangat rumit. Ketika korban tidak pernah dipulihkan, ia tidak akan menemukan titik terang dalam kehidupan, seperti lingkaran setan," kata Direktur Women Crisis Center Nurani Perempuan Rahmi Meri Yenti.

Sementara itu, aksi demonstrasi Hari Perempuan Internasional yang digelar di depan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta justru dibubarkan oleh sekelompok orang. Sejumlah peserta aksi mengalami kekerasan berupa pemukulan dan penghalauan. (MED/AIN/JOL/HRS)

BAHASA

EKO ENDARMOKO

Penyusun Tesamoko, Tesaurus Bahasa Indonesia

Om Senang Tante Girang

Judul tulisan ini bisa kita duga tidak akan terlampaui menggoda pembaca menafsirnya sebagai kalimat pernyataan. Jelas itu gabungan dua kata majemuk: *om senang* dan *tante girang*. Keduanya ungkapan lama yang tak kunjung lapuk hingga hari ini.

Setidaknya ada dua kombinasi ungkapan itu yang mungkin terbaca sebagai kalimat, (1) "Tante girang om senang" dan (2) "Om senang tante girang". Dua kalimat ini punya arti berbeda. Konstruksi (1) memberikan informasi, ada dua orang merasakan hal kurang lebih sama. Yang satu, tante, sedang girang, sementara lainnya, om, sedang senang. Di sisi lain, konstruksi (2) menyertakan satu informasi yang tak ada pada konstruksi (1), yaitu bahwa si om senang pada si tante. Tak ada petunjuk pada (1) bahwa si tante menyukai si om. Paling-paling kita bisa parafrasakan begini: "Tante girang setelah melihat om senang dan tidak bersedih lagi".

Persis dari titik inilah kita dapat lebih leluasa meninjau medan makna dua kata sifat di situ yang bersinonim, *senang* dan *girang*.

Orang gampang saja mengatakan *senang* dan *girang* bersinonim atau punya kesamaan makna. Padahal, kesamaan itu, seperti sinonimi pada umumnya, tidak bersifat mutlak. Keduanya merujuk pada perasaan lega, puas. Di satu titik, *senang* dan *girang* dapat saling menggantikan (tanpa mengubah makna secara signifikan) dalam, misalnya, "Bu Lutfi senang/girang anaknya yang baru lepas kuliah diterima bekerja di satu perusahaan dengan gaji memadai." Kualitas kepuasan dalam *senang* dan *girang* di sini gradual, terbedakan dalam gradasi *puas-senang-girang-bahagia*. *Senang* punya kedekatan makna dengan *lega*, *aman*, *nyaman*, *puas*. Sementara *girang* adalah rasa senang dengan kadar lebih. Ia mendekati ke *gembira*, *riang*. Ekspresi rasa senang tampak pada wajah ceria, sering ditambah senyum di bibir. Girang lebih ekspresif, tak jarang diikuti laku melonjak-lonjak atau bahkan sampai menangis.

Itu salah satu penjelasan mengapa bentuk *tante girang* dan *om senang*-lah yang masih kita kenal dan pakai hingga hari ini, bukan *tante senang* dan *om girang*. Seolah-olah kata *girang* punya peragai seperti perempuan dan *senang* itu berperagai maskulin. Sudah tentu ada penjelasan lain, tapi nantilah kita bicarakan lebih jauh.

Dibaca sebagai kalimat, "Om senang tante girang" dapat bermakna si om anu senang pada tante girang itu. Atau, malah mungkin saja, si om menggemari tante girang. Tapi, tampaknya data di lapangan tidak bicara seperti itu. Om senang biasanya lebih suka pada perempuan muda daripada tante-tante berumur. Tak ada lema *om senang*, begini kamus besar kita merumuskan *tante girang*: "wanita setengah baya yang suka bersenang-senang dengan pemuda". Dalam kalimat berbeda, si om dan si tante senang pada lawan jenis yang lebih muda dari mereka. Jarang om senang yang suka pada tante girang, sama jarangnya dengan tante girang yang suka pada om senang. Namun, uraian di atas belum, persisnya tidak bermaksud, menjawab soal mengapa ungkapan "om senang" dan "tante girang" tak kunjung lapuk hingga sekarang.

LANGKAN

Pelantikan Pamong Budaya dan Perancang UU

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid melantik Pamong Budaya dan Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jumat (5/3/2021), di Jakarta. Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing dan Pemberian Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Terdapat 30 aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik. Dari 30 ASN tersebut, dua di antaranya adalah ASN Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hilmar menekankan pentingnya peranan Pamong Budaya dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam upaya pemajuan kebudayaan secara menyeluruh. Para pamong budaya akan ditugaskan di sejumlah museum, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, serta Balai Konservasi. (*/ABK)

PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI

Dunia Bersiap Membuka Sekolah

Vaksinasi Covid-19 secara masif kepada masyarakat memberikan harapan sekolah dapat dibuka kembali dengan lebih aman. Didukung penurunan kasus Covid-19, sejumlah negara pun mulai membuka sekolah.

Pembukaan sekolah diharapkan mencegah kerugian yang lebih besar lagi akibat penutupan sekolah dan memperbaiki kerugiannya selama pandemi ini. Meskipun begitu, sekolah tidak akan bisa normal kembali seperti sebelum pandemi, pembukaan sekolah tetap mengacu protokol kesehatan yang ketat.

Inggris, misalnya, membuka kembali sekolah dan kampus secara nasional mulai Senin (8/3/2021). Siswa, guru, dan orangtua akan rutin dites Covid-19 guna memastikan pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan aman.

Sekretaris Negara Pendidikan Inggris Gabin Williamson, sebagaimana dikutip BBC pada Minggu (7/3), mengatakan, pemerintah mempertimbangkan memperpanjang jam sekolah dan memperpendek libur sekolah untuk membantu siswa mengatasi keterlambatan belajar. Pemerintah mengalokasikan 700 juta poundsterling untuk membantu siswa mengatasi keterlambatan belajar. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Ame-

rika Serikat (SDC) juga merekomendasikan sekolah dapat dibuka kembali dengan aman. Hal ini seiring vakonisasi Covid-19 yang terus meningkat dan penurunan kasus Covid-19 di AS.

Namun, berbeda dengan pemerintah, kalangan guru, baik di Inggris maupun di AS mengkhawatirkan pembukaan sekolah saat ini akan memicu merebaknya kasus Covid-19. Meski menurun, kasus Covid-19 masih tinggi.

Selain itu, guru di AS bukan termasuk sasaran prioritas vaksin Covid-19. Karena itu, guru-guru di Chicago, misalnya, memilih tetap tidak datang ke sekolah dengan alasan belum ada jaminan keamanan dari paparan Covid-19.

Persatuan Pendidikan Nasional (NEU) Inggris pun menyarankan pembukaan kembali sekolah secara bertahap. Aliansi serikat guru dan kepala sekolah memperingatkan bahwa masuknya kembali 10 juta anak dan staf sekolah pada saat yang sama ke sekolah berisiko memicu gelombang baru kasus Covid-19. Sebagaimana di Amerika, guru di Inggris juga tidak masuk prioritas mendapatkan vaksin Covid-19.

Perdebatan

Terkait keamanan jika sekolah dibuka kembali di tengah kasus Covid-19 terus



Seorang guru menerima suntikan vaksin Covid-19 di RSGM Soelastris, Surakarta, Jawa Tengah, Senin (8/3/2021). Sebanyak 78 guru telah disuntik vaksin Covid-19 di rumah sakit tersebut. Sebanyak 1.300 guru ditargetkan memperoleh vaksin Covid-19 melalui 10 fasilitas kesehatan di Kota Surakarta kemarin. Pemerintah Kota Surakarta mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi kalangan guru sebagai persiapan melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka yang, menurut rencana, akan dilaksanakan pada Juli 2021.

menjadi perdebatan. Mengutip penelitian yang dipublikasi di Jurnal JAMA, peneliti CDC sebagaimana dikutip NBCNews pada 28 Januari 2021 mengatakan, sekolah tidak berkontribusi dalam penyebaran kasus Covid-19 di masyarakat sehingga aman dibuka kembali.

Di Inggris, Kantor Statistik Nasional pun menunjukkan bahwa guru tidak memiliki ri-

siko infeksi yang lebih tinggi daripada orang-orang usia kerja lainnya. Seusai karantina wilayah (*lock down*) nasional kedua di Inggris pada November 2020 pun, kasus Covid-19 turun sekalipun sekolah dibuka.

Namun, pemodelan pasca-varian baru Covid-19 dari Inggris menunjukkan, membuka kembali sekolah dapat meningkatkan angka reproduksi

(R) Covid-19 dari 0,8 menjadi 1,1-1,5. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 mulai tumbuh dan kemungkinan akan meningkat.

Para peneliti di London School of Hygiene and Tropical Medicine dalam publikasi mereka pada 15 Februari 2021 menyebutkan, pembukaan kembali sekolah sebagian, yaitu hanya sekolah dasar atau sekolah me-

nengah akan menghasilkan kenaikan angka R yang lebih rendah. Meskipun begitu, sekolah tetap berpeluang untuk menularkan virus korona baru.

Di Indonesia, kalangan guru meminta pemerintah tidak terburu-buru membuka kembali sekolah pada tahun ajaran 2021/2022 Juli mendatang. Kasus Covid-19 masih tinggi, vaksinasi untuk guru pun belum merata bahkan banyak guru yang belum mendapatkan informasi bagaimana caranya mendapatkan vaksin tersebut.

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mendapatkan banyak keluhan dari guru-guru di daerah. Guru-guru dari Kabupaten Kepulauan Simeulue, Aceh; Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, menyatakan belum ada guru yang divaksin Covid-19. Bahkan, di Simeulue, para guru belum mendapatkan informasi resmi terkait vaksinasi ini.

Di DKI Jakarta pun, menurut Ketua P2G DKI Jakarta Fandi Fuji Hariansih, vaksinasi Covid-19 untuk guru masih lambat. Fandi juga tak tahu harus ke mana untuk mendapatkan vaksin Covid-19 karena hingga kini belum ada sosialisasi soal itu.

Protokol kesehatan

Secara terpisah, Komisi-

ner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listiyarti mengatakan, kalaupun semua guru telah mendapatkan vaksin, itu tidak menjamin sekolah aman dibuka kembali. Kekebalan kelompok belum terbentuk karena siswa belum mendapatkan vaksin, padahal jumlah siswa lebih dari 10 kali jumlah guru.

Karena itu, infrastruktur dan standar operasional prosedur protokol kesehatan menjadi syarat mutlak jika sekolah hendak dibuka lagi, berdasarkan pemantauan KPPI, masih ada sekolah yang belum memenuhi persyaratan tersebut meski pemerintah telah menganjurkan melalui surat kesepakatan bersama empat menteri pada November 2020.

Retno mengatakan, ada sekolah yang infrastruktur kesehatannya masih minim, misalnya tempat cuci tangan masih terbatas, petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan protokol kesehatan juga masih minim. Sekolah tersebut juga belum menyosialisasikan protokol kesehatan ke siswa dan orangtua siswa. Pemerintah menetapkan ada 15 indikator atau daftar periksa yang harus dipenuhi sekolah sebelum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. (YOVITA ARIKA)

TAJUK RENCANA

Memenuhi Janji Vaksinasi

Sungguh menggembirakan melihat antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19. Ini momentum pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya.

Di pelbagai fasilitas kesehatan, warga berbondong-bondong datang. Menurut Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, hingga Jumat (5/3/2021) sudah 2,4 juta penduduk Indonesia mendapat vaksinasi dosis pertama (*Kompas*, 7/3/2021).

Total ada tujuh juta vaksin yang sudah didistribusikan dan 70 juta lagi sedang dalam perjalanan. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen difokuskan untuk Jawa dan Bali.

Memang, dibandingkan dengan India yang berhasil memvaksinasi satu juta penduduk per hari, Indonesia masih jauh tertinggal. Namun, di kawasan Asia Tenggara, cakupan vaksinasi di Indonesia hanya kalah dari Singapura yang negara dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil.

Oleh karena itu, sambutan baik warga harus menjadi momentum positif. Tidak hanya untuk segera mencapai target kekebalan kelompok dan terbebas dari pandemi, tetapi yang terpenting adalah untuk kembali menyatukan harapan rakyat bahwa bersama kita bisa bangkit dari keterpurukan.

Pengalaman menunjukkan, selama hampir dua bulan vaksinasi berlangsung, kita mampu menyelenggarakan suatu program yang bersifat massal, serentak, dengan tetap menaati protokol kesehatan. Hal ini menjadi modal agar target kekebalan kelompok segera tercapai. Untuk itu, sedikitnya 181,5 juta orang harus mendapatkan vaksinasi. Kalau 2,4 juta sudah mendapat vaksinasi tahap pertama, maka masih 179,1 juta orang lagi yang harus divaksinasi. Tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil untuk diwujudkan.

Pemerintah memang sudah menggandeng pelbagai sektor swasta untuk melancarkan program ini, tetapi upaya Pemerintah India melibatkan fasilitas kesehatan swasta—sekalipun ada biaya—bisa menjadi pertimbangan.

Di sisi lain, kemampuan tersebut tentunya harus disertai sosialisasi dan informasi, kemudahan pendaftaran, pengaturan distribusi vaksin, dan pemerataan hingga di daerah yang paling terpencil sekalipun. Saat ini, meskipun di atas kertas sekitar 329 juta vaksin dapat diperoleh Pemerintah Indonesia, jumlah riilnya masih jauh dari mencukupi. Dengan demikian, pemerintah harus bijak mengatur prioritas.

Masyarakat pun perlu percaya kepada pemerintah, akan tiba saatnya mendapat vaksinasi. Sementara menunggu giliran, ada baiknya masyarakat menjaga kesehatan, asupan yang bergizi, dan cukup istirahat. Dengan demikian, ketika tiba saatnya vaksinasi, efek samping bisa diminimalkan.

Kita bersyukur sudah ada Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPD). Alangkah baiknya jika Komnas KIPD juga membuat layanan *hotline* (saluran siaga) yang memudahkan masyarakat berkomunikasi jika ada masalah.

Semoga dengan begitu pandemi bisa segera diatasi. Namun, yang lebih penting lagi, bangsa Indonesia kembali memiliki *trust* (kepercayaan): modal sosial membangun kesejahteraan.

Di Balik Pertumbuhan China

Ketika *Kompas* meliput khusus perekonomian China pada 2010, hal yang mengkilat adalah kecepatan. Semua proses perizinan, misalnya, serba mudah.

Jadilah China *darling*-nya investor global. Negara tirai bambu ini dikenal sebagai dapur manufaktur global. Dan jadilah investasi, satu komponen produk domestik bruto (PDB) sebagai pilar kuat pertumbuhan.

Investasi, hanya salah satu pilar yang masuk dalam perencanaan saksama dalam perekonomian China. Perencanaan ini pada awal Orde Baru juga sangat santer terdengar di telinga kita, yakni rencana pembangunan lima tahun (repelita).

Pada repelita di era Presiden Hu Jintao, China memasuki fase perbaikan kualitas pertumbuhan. Postulat Simon Kuznets, peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1971, berisikan bahwa pembangunan awal melahirkan gangguan sosial karena ketimpangan. Hal ini mendorong perbaikan dalam kualitas pembangunan, dalam hal ini termasuk pemerataan.

Efeknya, era Hu Jintao melahirkan China dengan perekonomian yang ditopang warga sebagai kelas menengah, kini berjumlah paling tidak 400 juta jiwa. Warga inilah yang menjadikan China sebagai pasar mengguruk bagi investor dengan produk terancang sejat. Warga menjadi pilar, mengubah China sebagai negara yang tumbuh karena ekspor.

Presiden Xi Jinping mempertajam hingga mendongkrak kaum papa di pegunungan yang paling tertinggal untuk masuk ke dalam deru pembangunan. Di era Xi, penajaman suprastruktur ekonomi politik sangat nyata. Para pejabat dan keluarganya yang menguntungkan diri dan keluarga menjadi sasaran. Pemberantasan Bo Xilai (Menteri Perdagangan) dan jajaran pejabat lainnya pada 2013, yang dituntut memperkaya diri, menjadi pelajaran. Negara relatif tertib secara keuangan dan membuat China menjadi negara terkaya dari segi kas. Setelah warnanya kaya, pemerintahnya juga turut kaya. Inilah yang membuat China mampu memberi stimulus ekonomi.

Target repelita demi repelita terutama sejak 1978 tercapai dan 2021 menjadi awal repelita ke-14, dengan sasaran perburuan teknologi canggih. Ini makin menjauhkan China dari potensi *middle income trap*, sebutan bagi yang mandek pertumbuhan sebab lesu inovasi, sumber penting pertumbuhan.

Jadi, tidak perlu diragukan jika China menargetkan pertumbuhan di atas 6 persen pada 2021. Ada konsumsi, investasi, pemerintahan kaya sebagai pilar kuat. Status China yang terbaik di dunia sebagai basis jaringan produksi membuat negara ini tetap jadi basis produksi dan transit bagi produksi terancang bidang elektronik dan kecerdasan buatan.

Inilah hasil repelita, disusun bukan demi target pemilu (*Xinhua*, 15 Desember 2018). Devosi partai pada rakyat, bukan kekayaan pribadi para petingginya menjadi penentu, kata Zhang Chengfu, Profesor Administrasi Publik Universitas Renmin. "Di banyak negara, kata dan karya politisi sering berbeda, tidak demikian di China," kata Carl Fey, profesor dari Aalto University School of Business, Finlandia.

Kebutuhan Revisi UU ITE

Wahyudi Djafar

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta

Peluang merevisi kembali Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuka Presiden Joko Widodo telah mendapatkan respons beragam di masyarakat.

Sementara Indonesia, meski dalam inisiatif pemanfaatan teknologi internet lebih awal dibandingkan negara ASEAN lain, dalam pembentukan hukum dan legislasi yang mengatur teknologi ini cenderung terlambat (Djafar, 2013).



Problem mendasar

Membaca norma dan mengobservasi implementasi UU ITE saat ini, kita dapat mengidentifikasi sejumlah problem mendasarnya, selain problem umum yang dijelaskan di atas. Pertama yang paling banyak mendapatkan sorotan publik adalah terkait dengan norma-norma kejahatan siber, khususnya Pasal 27 Ayat (3) tentang larangan fitnah dan pencemaran nama baik, dan Pasal 28 Ayat (2) tentang larangan ujaran kebencian. Kedua pasal itu, meski telah beberapa kali diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, dan putusannya menyatakan normanya konstitusional, secara konsep sesungguhnya ada problem dalam rumusannya.

Kedua pasal itu, dan juga ketentuan larangan lain yang dirumuskan dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, kualifikasinya adalah kejahatan konvensional yang ekstensifikasi menggunakan teknologi komputer (*cyber-enabled crime*), atau dalam Budapest Convention on Cyber Crime 2001 masuk kategori sebagai *content-related offences*.

Kejahatan tersebut berbeda dengan *cyber-dependent crime*, sebagai kejahatan yang muncul dan hanya mungkin dilakukan karena adanya jaringan komputer, seperti *phishing*, serangan *distributed denial of service* (DDOS), *denial of service* (DoS), *illegal access* (McGuire dan Dowling, 2013). Dalam UU ITE sendiri kejahatan yang masuk kategori *computer related offences* itu telah diatur dalam Pasal 30-35, dan relatif tidak ada permasalahan dalam implementasinya.

Dengan perbedaan konsep ini, mestinya dalam perumusan normanya juga berbeda karena kejahatan yang diatur Pasal 27, 28, 29 UU ITE sesungguhnya juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena itu, untuk bisa membuktikan setiap unsurnya, baik *actus reus* (per-

buatan) dan *mens rea* (niat jahat), yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, sepenuhnya harus merujuk pada KUHP.

Masalah mendasar berikutnya terkait pengaturan konten internet, yang selama ini lebih menekankan pada aspek pembatasan, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 Ayat (2)b UU ITE. Ketentuan ini memberikan wewenang bagi pemerintah untuk membatasi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan (*illegal content*).

Sayangnya, dalam pengaturan itu belum secara jelas disebutkan jenis-jenis konten yang melanggar UU. Selain itu, UU ITE juga belum mengatur prosedur di dalam melakukan pembatasan, termasuk peluang untuk melakukan pengujian terhadap tindakan pembatasan tersebut (*judicial oversight*).

Mengacu pada prinsip dan instrumen HAM, setiap tindakan pembatasan terhadap hak, termasuk di dalamnya hak atas informasi, setidaknya harus memenuhi tiga hal: diatur oleh hukum (*prescribed by law*), untuk suatu tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan betul-betul mendesak dilakukan (*necessity*), selain tindakannya harus proporsional. Prinsip-prinsip pembatasan inilah yang semestinya dirumuskan secara baik dan ketat di UU ITE, termasuk dalam prosedur pembatasannya, guna menghindari praktik pembatasan konten (*blocking and filtering*) sewenang-wenang.

Pengaturan konten ini juga terkait erat dengan respons terhadap maraknya penyebaran disinformasi di internet, yang belum diatur secara memadai dalam hukum Indonesia. Revisi UU ITE semestinya dapat merumuskan pengaturan mengenai larangan penyebaran konten disinformasi, termasuk langkah administrasi dan teknologi yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Pendekatan demokratis dalam penanganan konten disinformatif, seperti diterapkan

Pemerintah Jerman melalui The Network Enforcement Act 2017, dapat jadi rujukan dalam perumusan aturan ini.

Lebih jauh dari itu, UU ITE juga belum mampu menjadi rujukan dalam pengaturan platform digital mengingat beragam model bisnisnya, seperti *aggregation platforms*, *social platform*, dan *mobilization platforms*. Situasi ini yang kerap memunculkan perdebatan sektoralisme pengaturan, yang dapat berujung pada kerugian pengguna (konsumen), untuk dapat menikmati secara penuh hak atas informasi.

Arah dan model pengaturan

Dalam pengaturan platform digital, prinsip netralitas jaringan (*net-neutrality*) harus menjadi elemen penting yang diperhatikan. Secara sederhana, prinsip ini menekankan tentang jalan bagi pengguna internet, dan tentang hubungan antara pemilik jalan—jaringan (*intermediaries*)—dengan penggunaannya. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kebebasan berpendapat di internet, termasuk menghindari penyensoran internet (Lessig dan McChesney, 2006).

Dengan beberapa catatan ini, kebutuhan amandemen UU ITE mestinya bisa dibuka seluas-luasnya, tak semata-mata pada masalah pemidanaan. Namun, mengingat perkembangan saat ini, penting bagi pemerintah dan DPR untuk terlebih dahulu merumuskan arah dan model politik hukum pengaturan teknologi internet ke depan. Apakah tetap dengan model penyatu-aturan melalui UU ITE, atau mengembangkan model dan pendekatan yang lain, dengan tetap mempertimbangkan aspek konvergensi dari teknologinya?

Tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan pemanfaatan teknologi internet ialah selau tertinggalnya hukum dari inovasi teknologinya. Karena itu, internet membutuhkan pengaturan yang supel untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan interoperabilitasnya (Kulesza, 2012). Guna menjamin hal itu, harus dipastikan aturan yang dirumuskan tidak kaku sehingga selalu mampu memberikan ruang bagi inovasi teknologi, serta dapat secara baik memfasilitasi pengembangan setiap kreasi dan inovasi berbasis internet.

Asesmen Nasional

Doni Koesoema A

Pemerhati Pendidikan, Anggota BSNP Periode 2019-2023

Ketidakadilan, standarisasi manusia, reduksi proses pendidikan. Inilah tiga residu yang masih tersisa akibat kebijakan ujian nasional. Apakah asesmen nasional mampu menjawab tiga persoalan ini?

Ujian nasional (UN) tidak adil karena disparitas kualitas guru dan sarana prasarana antara daerah dan sekolah yang berbeda-beda. Ketimpangan kualitas guru dan sarana belajar membedakan pengalaman belajar tiap siswa dalam mempelajari kurikulum nasional.

Dalam kondisi seperti ini, melaksanakan ujian standar yang bersifat nasional melahirkan ketidakadilan. UN yang berpretensi menstandarkan individu melalui pengetahuan pada mata pelajaran tertentu mengabaikan dimensi inteligensi ganda (*multiple intelligences*) yang ada dalam diri manusia (Gardner, 1983).

Padahal, inteligensi ganda adalah sebuah fakta.

Paradigma standarisasi juga melecehkan harkat dan martabat manusia. Padahal, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah salah satu cara untuk memberikan nilai-nilai kebajikan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan (KHD, 2011, 344). Pemberian nilai-nilai kebajikan ini tidak terjadi melalui mekanisme UN.

Reduksi atas proses pendidikan menjadi persoalan utama dalam kebijakan UN. Guru dan siswa cenderung belajar untuk ujian. Hasil UN yang secara implisit memeringkat sekolah dan keberhasilan pendidikan daerah menjadi sumber manipulasi dan kecurangan.

Kebijakan UN harus dihapus karena mendistorsi konsep manusia sebagai pembelajar unik. UN menolak keunikan individu dan fakta kecerdasan ganda yang jadi kodrat bagi berkembangnya harkat dan martabat individu melalui pendidikan. Reduksi atas proses pendidikan mempermisskin gairah belajar dan menjadikan anak instrumen keberhasilan pihak lain.

Nadiem Makarim juga teragap-agap saat hendak memperbaiki kebijakan UN. Ini terlihat dari inkonsistensi dalam berbagai penjelasannya. Awalnya, ia memperkenalkan istilah asesmen kompetensi minimum (AKM) sebagai pengganti UN. Namun, setelah itu direvisi,

AKM bukan untuk menggantikan UN.

Lalu muncul istilah baru asesmen nasional (AN), yang di dalamnya terdapat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AN inilah yang nanti akan menggantikan kebijakan UN. Bagi saya, tidak pentinglah apa nama kebijakannya. Yang penting adalah apakah esensi kebijakan baru ini dapat menjawab tiga residu kebijakan UN yang telah merusak pendidikan kita selama dua dekade ini?

Otonomi guru

Kebijakan Merdeka Belajar ala Nadiem memperkuat kembali otonomi guru dan sekolah dalam menilai hasil belajar, menentukan kenaikan, dan kelulusan peserta didik. Amanat ini sangat jelas dalam UU Sisdiknas Pasal 58 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan".

Dalam konsep sistem evaluasi pendidikan di Indonesia, satu-satunya pelaku dalam ekosistem pendidikan yang memiliki hak untuk menilai hasil belajar peserta didik adalah guru (pendidik) dan sekolah. Alasan yang jelas. Guru dan sekolahlah yang paling memahami dinamika dan proses belajar peserta didik. Guru dan sekolahlah yang paling mengerti siapa peserta didik yang sedang didampingi dalam proses belajar. Maka, mengembalikan kepercayaan dan mandat secara total kepada para guru dan sekolah merupakan kebijakan tepat.

Berpihak kepada anak

Kelebihan AN dibandingkan UN adalah kebijakan ini lebih berpihak kepada anak. AN tidak membuat anak tertekan karena yang dievaluasi adalah sistem pendidikan dan iklim yang melingkupi kegiatan belajar. Bahkan, AN tidak dilakukan pada akhir tahun pelajaran.

Hasil AN akan menjadi rapor sekolah atau profil sekolah. Kumpulan profil sekolah ini akan jadi gambaran profil pendidikan daerah. Profil pendidikan daerah menjadi dasar bagi pemda mengevaluasi kebijakan pendidikan demi perbaikan. Melalui kebijakan berbasis fakta dan data ini, diharapkan ke depan terjadi transformasi

pendidikan yang sinergis antara pemerintah pusat, pemda, satuan pendidikan, masyarakat.

Begitulah kira-kira logika transformasi pendidikan melalui kebijakan AN. Bahwa AN tidak menilai hasil belajar peserta didik tidak berarti otomatiskan AN berpihak kepada anak. AN hanya sekedar tidak membebani siswa saja, tetapi belum secara eksplisit berpihak kepada anak karena AN merupakan sebuah asesmen untuk menilai kualitas sistem pendidikan.

Sebagai alat evaluasi sistem, dampak final pada peserta didik terjadi ketika ada intervensi lanjutan terhadap para guru yang mengajar dan perbaikan lingkungan sekolah berdasarkan hasil asesmen. Siswa sebenarnya tidak secara langsung memperoleh manfaat dari AN.

Lebih dari itu, hasil AN tidak mencerminkan apa yang dibutuhkan individu per individu siswa sehingga tidak dapat menunjukkan intervensi khas apa yang dibutuhkan peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya.

Paradoks asesmen

Sebuah asesmen dikatakan berpihak kepada anak apabila asesmen tak dikaitkan dengan kepentingan dan tujuan lain, selain demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Di sinilah kebijakan AN mengalami paradoks. Di satu sisi, ia tak membebani anak karena tak menilai hasil belajar individu per individu. Namun, di lain sisi, hasil AN akan menjadi rapor sekolah dan rapor pendidikan daerah.

Kebijakan AN akan berdampak tinggi pada persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah dan pandangan publik terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan kepala daerah. Padahal, pertaruhan seperti inilah yang selama ini terjadi melalui kebijakan UN sehingga melahirkan banyak kecurangan, manipulasi, distorsi, dan reduksi proses pendidikan. Jika ke-

bidangan AN memiliki dampak tinggi pada kualitas sekolah, apalagi jika hal ini juga nanti akan dikaitkan dengan akreditasi sekolah, dan kebijakan pendidikan di daerah, potensi manipulasi akan terjadi.

Pertaruhan AN adalah guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemerintah daerah. Bagi sekolah swasta, hasil AN memengaruhi persepsi masyarakat yang berdampak pada penerimaan siswa baru. Ini berarti pertaruhan keberlangsungan sekolah di masa depan.

Distorsi tujuan AN sangat potensial. Sekolah akan berlatih mempersiapkan soal-soal AKM. Kepala sekolah, guru, dan pengawas akan bersinergi agar hasil AN menjadi baik apa pun caranya. Survei karakter pun juga berpotensi dimanipulasi. Siswa akan dilatih menjawab yang baik sehingga pertanyaan terkait lingkungan belajar akan dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya baik.

Fenomena ini yang saat ini terjadi. Saat kebijakan AN belum dimulai pun sudah muncul berbagai macam buku kiat-kiat sukses mengerjakan AKM. Bahkan ada sekolah yang sudah merencanakan mempelajari dan mempersiapkan siswa terkait soal-soal survei karakter. Akhirnya, pendidikan kita akan kembali lagi ke titik nol!

Belajar bermakna

Kualitas pendidikan nasional sangat tergantung dari kualitas pembelajaran. Kualitas belajar sangat tergantung dari bagaimana guru memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Di sini, pembelajaran kontekstual berbasis pemecahan masalah melalui umpan balik langsung dari guru terhadap hasil belajar dapat mendorong kemajuan belajar (Hattie, 2009).

Pengalaman belajar bermakna akan tergantung dari sejauh mana proses belajar yang difasilitasi guru menghargai keunikan individu dan memberi ruang bagi berkembangnya berbagai macam kecerdasan dalam diri peserta didik. UN dan ranangan AN sama-sama tak memiliki kaitan langsung dengan prinsip kemajuan belajar ini. Padahal, prinsip pembelajaran kontekstual terindividualisasi inilah yang melahirkan pengalaman belajar otentik yang mendorong kemajuan belajar.

KOMPAS
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum: Lilik Octama
Wakil Pemimpin Umum: Budiman Tanurejdo
Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Sutta Dharmasaputra
Wakil Pemimpin Redaksi: P. Tri Agung Kristanto
Redaktur Senior: Ninok Leksono, Rikard Bagun, Ninuk Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana: Adi Prinantyo
Wakil Redaktur Pelaksana: Marcellus Hermowo, Antonius Tomy Tringroho, Haryo Damarsono
Sekretaris Redaksi: Subur Tjahjono, Itham Khoiri

POJOK

Konflik parpol bisa mengganggu atasi pandemi. *Eggak yakin partai itu mikirin pandemi....*

Anak pekerja migran luput dari perhatian. *Nasib jadi anak titipan di kakek-neneknya.*

Golkar akan dongkrak elektabilitas Airlangga. *Biar layak "dijual", ya?*

Mang Ubil



SURAT KEPADA REDAKSI

Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opini@kompas.id atau ke Redaksi Kompas Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

Bansos Covid-19

Saya merupakan penerima bansos yang terdaftar di Kemensos dengan nomor (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) DTKS 1273040005000359.

Sejak tahun 2017 saya telah pindah dari Kota Pematang Siantar ke Desa Sigodang Barat di Kabupaten Simalungun. Saya telah mendapat KK dan KTP baru dari Kabupaten Simalungun.

Ketika ada program penerima bansos Covid-19, pemerintah mengirim undangan kepada saya, di kemudian saya yang lama, di Pematang Siantar. Saya mendapatkan uang tunai bantuan terkait Covid-19 di Kantor Pos Besar Pematang Siantar pada 13 Mei 2020.

Pada kesempatan itu saya menyampaikan bahwa saya telah memiliki KK dan KTP baru di domisili baru. Petugas yang meladeni mengatakan bahwa saya tetap berhak menerima karena, meskipun sudah pindah alamat, nomor induk kependudukan (NIK) saya tidak berubah.

Menurut Permensos Nomor 5 Tahun 2019, jika pindah alamat, harus lapor kepada desa/kelurahan. Laporan kemudian akan diteruskan kepada kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya ke Kementerian Sosial supaya yang bersangkutan tetap dapat menerima bantuan pemerintah.

Saya telah melapor ke desa dan dijawab laporan sudah diteruskan ke Jakarta. Namun, hingga kini saya belum lagi mendapat bantuan sosial yang masih menjadi hak saya.

Untuk itu, saya mohon perhatian kepada Ibu Menteri Sosial yang budiman, juga pihak-pihak terkait, agar saya kembali mendapat bantuan.

BINAWAN LINGGA
Persatuan Baru, Desa Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun

Visi Indonesia 2045

Seandainya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro tidak menulis dan dimuat Kompas (Rabu, 24/2/2021), tidak banyak yang tahu bahwa kita sudah memiliki Visi Indonesia 2045. Visi itu atas prakarsa Presiden Joko Widodo.

Negara kita diproyeksikan menjadi negara maju dan masuk sebagai kekuatan ekonomi lima besar dunia dengan kualitas manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian visi Indonesia pada 2045, satu abad setelah kemerdekaan.

Visi tersebut sangat optimistis; spesifik dan terukur untuk dapat dicapai sesuai target. George T Doran (1981) menyebutnya kaidah SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based. Kita dapat merealisasikan dengan komitmen kuat dan konsistensi.

Sudah terbukti banyak negara tetangga menjadi jauh lebih maju, melompat ekonominya, karena visinya jelas. Negara ibarat kapal besar dengan banyak penumpang. Maka, kepala negara sebagai nahkoda harus satu pandangan dengan kru tentang tujuan akhir perjalanan.

Sebaliknya, semua penumpang juga harus tahu, termasuk jika ada gelombang besar ataupun perubahan persinggahan yang akan dilewati. Penumpang dan juga kru yang kegiatannya dapat membahayakan keselamatan kapal dan seisinya wajib mendapat sanksi.

Agar Indonesia benar-benar masuk kekuatan ekonomi lima besar dunia pada 2045, visi tersebut harus ditetapkan menjadi keputusan politik nasional, tidak berubah meskipun kepemimpinan negara berganti.

Selanjutnya harus ada langkah konkret dalam bentuk rencana kerja berkesinambungan dengan target terukur yang senantiasa dievaluasi. Semua program di daerah, hingga tingkat desa atau kelurahan, boleh berinovasi, tetapi tetap harus mengacu pencapaian visi nasional.

Negara kita adalah negara kesatuan dengan pemerintahan republik yang memiliki sumber daya alam banyak dan lengkap, dengan jumlah penduduk 270 juta, dan berideologi Pancasila. Ini semua menjadi modal dan kekuatan untuk kemajuan dan kepentingan bangsa.

Indonesia harus bisa menjadi negara maju, keluar dari lingkup negara menengah ke bawah seperti selama ini.

PANGERAN TOBA P HASIBUAN
Sei Bengawan, Medan 20121

Pengecambahan sains dan teknologi adalah unsur pembangunan jiwa, negara, dan bangsa yang berkelanjutan kebangsaannya.

Kita ingat universitas, seperti halnya gedung parlemen dan katedral, merupakan hasil karya abad pertengahan, peninggalan Roma dan Yunani. Padahal, masyarakat Yunani dan Romawi purba tidak mengenal universitas seperti sekarang. Pada waktu itu pelajar datang mencari guru.

Instruksi pendidikan, misalkan ilmu hukum dan falsafah, tidak terstruktur dalam kelembagaan seperti fakultas atau jurusan. Mereka bersimpul mendengarkan ajaran sang guru.

Sokrates tidak pernah memberi diploma, tetapi muridnya datang dari segala penjuru "dunia". Mereka berdialog, bertukar pikiran, tidak hanya menghafal. Kalau Sokrates puas, pencari ilmu itu dipercaya untuk mandiri dan menumbuhkan pusat pemikiran baru.

Penanda legitimasi

Legitimasi tidak ditandai dengan diploma, tetapi dari pancaran wibawa, kecakapan, dan wawasan pembaruan dalam alam pikir novice itu.

Tradisi itu pernah ada ketika para pemuda dari penjuru Nusantara datang menemui "pendito" untuk mencantrik. Tali-temali intelektual pendito-cantrik itu begitu indah dan menghasilkan, pada waktunya membuat Bandung (kemudian ITB) disebut sebagai pusat-pusat pengecambahan pemikiran dan kepribadian. Kepercayaan sistem terbentuk oleh kemampuan novice membesarkan pusat unggulan, menegenakkan pemikiran dan kajian.

Bambang Hidayat

Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Konsep dasar menuju ke puncak piramida kekuatan keilmuan, bukan kekuasaan, tertata menurut jenjang pertanggungjawaban keilmuan sesuai standar keunggulan. Postur itu memperoleh pengakuan karena pancaran jiwa dan disiplin individu yang bijaksana.

Kemudian, lahirlah organisasi terstruktur untuk memberikan pengajaran, menandai atribut universitas yang kita kenal. Dalam batas tertentu, universitas kita adalah ahli waris Paris dan Bologna, atau Leiden dan Amsterdam, bukan Athena atau Alexandria.

Sebagian warisan itu masih tampak, tetapi sebagian lagi terkikis pertumbuhan kebudayaan setempat. Satu hal yang patut kita cermati, universitas abad pertengahan itu tidak mengenal "himpunan mahasiswa" karena universitas sudah built of men. Universitas adalah "masyarakat mahasiswa", "University itself was fundamentally a society of students".

Menurut De Conde (1971), sebuah masyarakat yang mempunyai hak khusus, tetapi terhormat dan berat tanggung jawabnya. Hal lain yang menarik ialah mahasiswa memasuki gerbang universitas karena dia mencari guru, mencari orang arif, bukan program studi atau fakultas (begitu seharusnya). Tradisi ini masih bisa dipertahankan di beberapa sentra pendidikan tinggi abad ke-20.

Mahasiswa berpindah dari satu mazhab pendidik ke mazhab lain hanya karena "mencari" guru atau mengikuti "leermeester" yang berpindah. Kehidupan kemahasiswaan—kita baca kepebudayaan—mengkilat rangkaian warisan, turun-temurun dibawa ke Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan lain kota universitas. Warisan yang terbentuk selama 700 tahun adalah militansi. Mahasiswa adalah agen terpercaya melawan ketidakadilan.

Peran mengkritik mereka merupakan aset istimewa dalam struktur sosial yang tertindas, tetapi harus mencerminkan pembaruan budaya bangsanya. Dengan mempergunakan universitas sebagai tempat berteduh (atau berlindung?), mereka merupakan kelompok dalam tatanan otoritarian yang masih dapat berdebat, mengkritik, dan berjuang membesarkan kebangsaannya.

Gerakan mahasiswa mencatut berbagai daya guna di negara berkembang sehingga lahir adagium, untuk mengerti struktur politik suatu negara (berkembang), harus mengerti peran mahasiswa. Pemimpin pemerintahan seharusnya peka dan mampu memanfaatkan kekuatan mahasiswa (Marx, 1999).

Dalam perjalanan hidup kepebudayaan atau kemahasiswaan selalu diperoleh pengejawantahan jati diri. Sering kita temui pengelompokan yang dapat memicu permusuhan dari luar karena selalu ada kelompok yang sadar dan berani melawan kebiasaan dan tabiat tidak terpuji di lingkungannya.

Jiwa zaman yang tumbuh dari kemelut sosial dan budaya sewaktu memberi warna khas tiap lapisan. Gerak mahasiswa tahun 1965 berbeda dengan gerakan tahun 1998, dan berbeda pula dengan motif 2008.

Tiada tujuan lain dari gerakan mahasiswa kecuali mengubah keadaan menjadi baik. Memang hal itu penting, tetapi yang terpenting adalah membangun pasca-gerakan. Bersama dengan proses pengubahan itu seharusnya lahir pula upaya pengekangan keseimbangan moral antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara kekhasan dan nilai universal.

Kekhasan Indonesia tidak boleh hanya dilihat sebagai batasan, tetapi sebagai nilai tambah. Hak istimewa generasi muda yang terhimpun dalam suatu universitas itu patut disyukuri. Namun, berbarengan dengan hak itu, ada sederet kewajiban. Dalam himpunan yang membentuk "kelas" dengan pagar etik dan norma, gerakan itu harus mempunyai vektor, menuju arah perbaikan bersama.

Definisi grup biasanya dibungkus oleh selimut kebersamaan informasi, rasa, dan tidak kurang pentingnya, tujuan. Sementara grup itu membangun ruang wadiah spasial yang memang vital, dia tidak boleh melupakan tantangan lingkungan dan janji awal untuk melegitimasi grup itu.

Kini kita hidup dalam masa "reformasi" terus-menerus. Dengan etos pembaruan yang tidak boleh melumer ketika masa reformasi berubah menjadi masa transisi tanpa batas waktu. Ini karena nilai dan interest yang mengecambah pada tahun sebelumnya belum sempat memperoleh perhatian.

Kita tidak hanya belum sempat mengubah nilai dan etika internal, tetapi juga tidak mengubah nilai eksternal yang harus dan perlu diperbaiki. Di luar kelompok kepebudayaan atau kemahasiswaan, masih hidup dengan kelompok lain dengan beragam norma dan etika.

Berita dominan dalam media massa dewasa ini berupa tingkah laku menyimpang banyak pemimpin. Dilihat melalui kaca pembesar, hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat kita mengalami krisis "moral".

Melihat kembali sejarah pendidikan moral, semenjak "Republik"-nya Plato dan "Politik"-nya Aristoteles pun kita melihat moralitas memang harus selalu menjadi perhatian. Membentuk organisasi kemasyarakatan harus berawal dari moralitas kokoh.

Legalisasi Ijazah

Pada 17 Februari 2021 saya mengirim pesan ke akun Twitter Ditjen Dikti @ditjendikti untuk mencari informasi legalisasi fotokopi penyeteraan ijazah dan transkrip luar negeri. Admin akun tersebut menginformasikan bahwa legalisasi hanya bisa dengan datang ke kantor Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud yang berlokasi di Gedung D.

Pada 1 Maret 2021 saya datang ke ULT Kemendikbud untuk memasukkan berkas fotokopi kedua dokumen. Tapi, petugas memberi tahu bahwa hasil legalisasi baru dapat diambil Jumat, 5 Maret 2021.

Setelah saya desak, petugas tersebut akhirnya mengakui bahwa waktu yang dijanjikan pun waktu tercapat kemungkinan hasil legalisasi siap. Artinya, hasil bisa saja baru ada setelah 5 Maret 2021.

Petugas mengatakan bahwa hal ini terjadi karena petugas berwenang bergantian bekerja (sif). Padahal, pada kuitansi pengajuan tertulis hasil legalisasi maksimal empat hari dari sejak diajukan.

Saat pandemi Covid-19, proses legalisasi ini justru mengharuskan pemohon hadir. Sungguh berisiko, apalagi kalau dari luar kota. Selain itu, ada ketidakjelasan waktu pasti, kapan hasil dapat diterima.

Saya membayangkan bagaimana nasib pemohon dari luar Jawa, terbatas waktu dan uang, dan tidak ada kerabat yang bisa mendapat kuasa mengurus legalisasi.

Saya mengusulkan supaya proses legalisasi ijazah dan transkrip luar negeri menggunakan mekanisme daring. Pengajuan dapat dilakukan dengan mengupload berkas elektronik (soft files) terlebih dahulu, seiring dengan pengiriman fotokopi berkas ke ULT Kemendikbud.

ULT Kemendikbud mengirim berkas kembali ke pemohon menggunakan Pos Indonesia, misalnya. Semua biaya ditanggung pemohon.

ULT Kemendikbud sebaiknya mampu menunjang inisiatif terobosan sebagai pelopor pendidikan, termasuk dalam hal administratif.

YOHANES IVAN, SIP, MA
Bumi Wana Mukti, Semarang

Selamat "Kompas"

Harian Kompas meraih lima penghargaan Indonesia Print Media Awards 2021 dan penghargaan Indonesia Young Re-

aders Awards 2021 dari Serikat Perusahaan Pers.

Di tengah tugasnya, insan pers harus berjuang menghadapi segala keterbatasan dalam masa pandemi ini. Mereka bekerja keras menyajikan foto dan berita terbaik bagi pembaca, tentu dengan menaati protokol kesehatan.

Selamat, Kompas. Semoga para awak media tetap sehat.

VITA PRIYAMBADA
Kompleks Perhubungan, Jatiwaringin, Jakarta 13620

Demokrasi Indonesia

Ada seseorang, entah benar pakar, dipakar-parkarkan, atau memakarkan diri, menilai dirinya boleh dan wajar melontarkan cemoohan kepada orang lain, bahkan presiden.

Kata dia, Presiden Jokowi tidak mengerti arti Pancasila dan demokrasi. Bukan main! Cara mengutarakan pikirannya saja sudah mengabaikan kesantunan, apalagi ini ditujukan kepada tokoh hasil pilihan rakyat yang sah. Apakah ia paham yang ia bicarakan?

Dengan gayanya, ia mungkin merasa lebih pantas menjadi presiden. Jangan-jangan ia malah curi start mau "nyalon". Bukankah dia lebih "pakar" daripada Jokowi?

Jokowi memang berasal dari kota kecil, bukan doktor, apalagi profesor. Tetapi, ia yang pernah tak dipandang sebelah mata menunjukkan hal yang berbeda.

Sang "pakar" yang berasal dari kultur anti-berantah merasa boleh bicara sesuka hatinya. Kita tidak perlu marah dan ikut mengumpat. Bukankah kita juga tak terusik dengan seseorang yang bicara dan tertawa-tawa sendiri di tepi jalan, menghujat dan mencari maki pengguna jalan yang lalu lalang?

Namun, ihwal Pancasila patut kita perhatikan. Pahamkah kita semua akan makna Pancasila yang sesungguhnya? Apa perwujudannya dalam keseharian? Apakah "demokrasi" yang kita pertontonkan sesuai harapan?

Ataukah Pancasila hanya sebuah konsep abstrak, sulit dicerna dan dimengerti?

Saya tidak berpretensi sudah paham dan dapat menerapkannya. Tetapi, dengan itikad baik, saya berusaha memahami dengan terus belajar dan mengajawantahkan yang saya pahami. Bagi saya, kehidupan bersama yang ber-

keserasian sangat penting dan kita butuh pegangan untuk mempertahankannya.

Acuannya sederhana saja. Tap MPR No I/MPR/2003 (memuat 45 butir nilai, sikap, dan laku Pancasila). Juga ada upaya menelusuri sejarah pembentukan dan pengembangan Pancasila untuk memahami esensinya.

Misalnya, sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (10 butir). Sila ini erat hubungannya dengan praktik demokrasi di negeri kita.

Ada tertulis, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; musyawarah dan mufakat diliputi semangat kekeluargaan; menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah; beritikad baik dan bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Kita boleh kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan, tetapi tentunya juga kritis terhadap kegiatan berbagai pihak yang menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah.

Kritik harus ada untuk memantapkan kualitas gagasan maupun keputusan yang dibuat, sekaligus mengendalikan timbulnya dampak buruk. Tetapi ada hal-hal yang harus diluruskan lebih dulu.

Pertama, apakah para wakil rakyat yang ada memang merupakan representasi rakyat yang sesungguhnya? Apakah keputusan sidang-sidang DPR/DPRD dibuat berdasarkan musyawarah/mufakat, bukan pemaksaan kehendak melalui kekuatan jumlah (pengambilan suara)?

Kepentingan siapakah yang diutamakan, rakyat, partai, atau koalisi partai? Nyatanya banyak wakil rakyat yang terjerat hukum karena terlibat korupsi. Jika tidak setuju mendapat sidang, bolehkah para wakil ini absen atau meninggalkan ruangan?

Sila ke-4 dan sila-sila lain yang saling topang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sang pakar, tokoh utama kita, mungkin perlu ditanya, demokrasi macam apa lagi yang ia harapkan?

ZAINOEL B. BRAN
Ciputat Timur, Tangerang Selatan

acara hari ini
Selasa, 9 Maret 2021

Table with 6 columns of TV channel schedules: JAKTV, tvone, BERITA SATU TV, TR NS 7, KOMPAS TV, TVRI, SCTV, GTV, TRANSTV. Each column lists program names and times.

Resensi

PUSTAKA
Garin Nugroho/ Adam, Hawa, dan Durian
Adam, Hawa, dan Durian menawarkan cara lain untuk melacak jejak-jejak pengalaman juga kegelisahan Garin Nugroho sepanjang berkisah dalam kebudayaan. Dibingkai dalam tema cinta, puisi-puisi dalam buku ini berbicara mengenai berbagai hal penting dalam hidup.

NADA
The Panturas/ Tafsir Mistik
Jelang perilis album kedua, The Panturas mengeluarkan lagu berjudul "Tafsir Mistik" pada Jumat (5/3/2021). Pencipta lagu ini, Abyan Zaki Nabillo, mengangkat fenomena munculnya kelompok pemikir karbitan di media sosial, yang belakangan kian menjamur dan menjadi tren.



8 | Sains, Lingkungan & Kesehatan

KILAS IPTEK

Perubahan Pesisir Perburuk Kondisi Banjir

Hasil riset University of Central Florida pada jurnal *Science Advances*, 5 Maret 2021, menunjukkan kisaran pasang surut lokal yang lebih tinggi, kemungkinan besar dari perubahan manusia ke daerah pesisir dan muara, telah meningkatkan jumlah hari banjir yang mengganggu di banyak lokasi pesisir di Amerika Serikat. Yang dimaksud banjir di sini berupa banjir kecil dari laut seperti genangan di jalan serta sistem air hujan yang kelebihan air sehingga menjadi habitat bagi bakteri dan nyamuk. Studi menemukan pada 40 lokasi pengukur pasang surut dari NOAA, hampir setengahnya lebih banyak hari banjir yang mengganggu karena rentang pasang surut lokal yang lebih tinggi. Dengan data yang mencakup setidaknya selama 70 tahun, para peneliti menganalisis lokasi-lokasi ini. (ICH)

Sel Telur Berukuran Besar Berisi Nutrien

Sel telur merupakan sel terbesar yang diproduksi oleh sebagian besar organisme. Pada manusia, mereka beberapa kali lebih besar dari sel tubuh pada umumnya dan sekitar 10.000 kali lebih besar dari sel sperma. Sel telur atau oosit yang sedemikian besar sebagai tempat mengumpulkan nutrisi bagi pertumbuhan embrio. Untuk memahaminya, dalam situs Massachusetts Institute of Technology (MIT), 4 Maret 2021, tim peneliti setempat melakukan riset pada lalat buah. Hasilnya, proses oosit tumbuh secara signifikan dan cepat sebelum pematangan bergantung pada fenomena fisik yang serupa dengan pertukaran gas antara balon dan ukuran berbeda. Bahwa "sel perawat" yang mengelilingi oosit mengalirkan isinya ke dalam sel oosit yang lebih besar. Hasil riset ini dipublikasikan di *Proceedings of the National Academy of Sciences*. (ICH)

Asteroid "Iblis" dan Bumi 2029

Pada 2029 memberi kesempatan kepada para astronom untuk mengenal Apophis atau asteroid "iblis" lebih lengkap. Ada juga harapan agar tak terjadi tabrakan antara Apophis dan Bumi.

M Zaid Wahyudi

Asteroid Apophis telah melintas di dekat Bumi dengan aman, Sabtu (6/3/2021). Namun, astronom masih berhitung simpangan asteroid itu dengan Bumi pada 2029 tak akan menimbulkan petaka di Bumi.

Saat Apophis berpapasan dengan Bumi pada Sabtu pukul 08.15 WIB itu, kedua benda langit ini dipisahkan jarak 16,8 juta kilometer atau 44 kali jarak Bumi-Bulan. Jarak yang sangat aman bagi Bumi terhindar dari potensi tabrakan dengan sang asteroid.

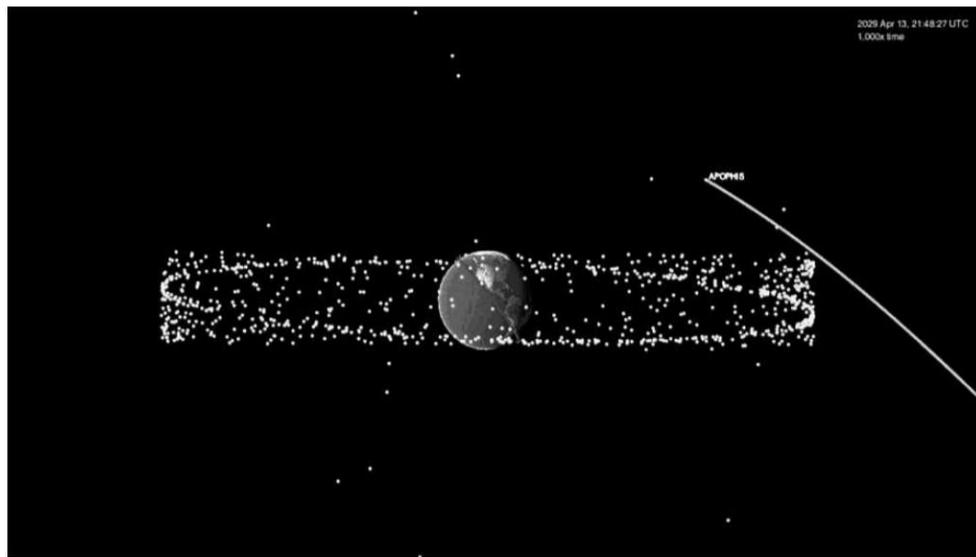
Simpangan Bumi dengan Apophis itu menjadi geladi resiko terakhir bagi astronom sebelum asteroid itu mencapai titik terdekatnya dengan Bumi pada 13 April 2029. Saat itu, Apophis berada pada jarak 31.860 kilometer dari Bumi atau lebih dekat dibanding posisi satelit geostasioner di ketinggian 36.000 kilometer.

Dengan jarak sedekat itu, Apophis yang berdiameter 370 meter bisa tertarik gravitasi Bumi. Jika itu terjadi, situasinya bisa menjadi runyam. Bahkan, sebagian astronom memprediksi ada potensi 3 persen bagi Apophis untuk menabrak Bumi pada 2029.

Namun, dengan penghitungan dan pengamatan lain, sebagian astronom yakin Apophis tidak akan menabrak Bumi pada 2029. Karena itu, masyarakat tak perlu panik, cemas atau khawatir dengan peristiwa tersebut.

Meski melintasnya asteroid di dekat Bumi pada jarak sedekat itu wajar dan berlangsung setiap saat, umumnya ukuran asteroid yang melintas hanya berukuran 5-10 meter. Asteroid setinggi Autograph Tower di Kompleks Thamrin Nine, Jakarta Pusat itu, sangat jarang terjadi.

"Peluang melintasnya asteroid sebesar itu di dekat Bumi



Animasi menunjukkan posisi asteroid Apophis saat mendekati Bumi pada 13 April 2029. Saat itu, Apophis dan Bumi hanya terputus jarak 31.860 kilometer atau lebih rendah daripada posisi satelit geostasioner di ketinggian 36.000 kilometer dari Bumi. Titik-titik menunjukkan satelit-satelit buatan manusia yang mengelilingi Bumi dan garis menunjukkan lintasan Apophis.

sekitar satu kali setiap 1.000 tahun," kata ilmuwan radar di Laboratorium Propulsi Jet, NASA, Marina Brozovic kepada *Space*, 11 Februari 2021.

Pada 13 April 2029 itu, dikutip dari NASA, Apophis bisa diamati dengan mata telanjang dan terlihat seperti titik cahaya mirip bintang yang bergerak dari timur ke barat. Apophis mulai terlihat di awal malam dari belahan Bumi selatan yang dimulai dari Australia menyebarkan Samudra Hindia, ke utara khatulistiwa Afrika dan mencapai titik terdekatnya dengan Bumi di atas Samudra Atlantik.

Penemuan

Asteroid bernama lengkap 99942 Apophis ini pertama kali ditemukan Roy Tucker,

David Tholen, dan Fabrizio Bernardi dari Observatorium Nasional Kitt Peak di Tucson, Arizona, AS pada 19 Juni 2004. Temuan ini bagian dari program pemantauan asteroid dekat Bumi yang berpotensi membahayakan Bumi.

Sejak itu, Apophis sudah menimbulkan kegemparan di kalangan astronom. Berbagai penghitungan menunjukkan adanya potensi asteroid itu menabrak Bumi meski sangat kecil. Namun, dalam setiap penghitungan ada rentang ketidakpastian dengan konsekuensinya.

Karakter ini yang membuatnya dinamai Apophis sebagai perlambang ancaman kekacauan yang ditimbulkannya. Apophis adalah nama dewa kegelapan, kejahatan, dan ke-

kacauan dalam mitologi Mesir kuno yang disimbolkan sebagai ular air.

Namun, para astronom percaya diri peluang papasan Apophis akan berdampak ke Bumi pada 2029 sangat kecil, kurang dari 1 per 100.000 dalam beberapa dekade mendatang. Artinya, potensi Bumi selamat dari tabrakan dengan Apophis akibat simpangan itu jauh lebih besar.

Dalam sejarah manusia, Bumi memang tidak pernah aman dari tabrakan dengan asteroid dan benda langit sejenis. Air dan kehidupan di Bumi saat ini diperkirakan berasal dari material asteroid yang menumbuk Bumi di masa lalu. Namun, tabrakan asteroid pula yang membuat dinosaurus punah.

Di era modern, sekitar satu abad terakhir, setidaknya tercatat dua kali masuknya asteroid ke Bumi hingga berdampak pada kehidupan di atasnya. Dikutip dari *Live Science*, 29 Mei 2020, asteroid jatuh di wilayah Tunguska, Siberia, Rusia pada 1908 yang membakar 2.000 kilometer persegi hutan dan menghancurkan 80 juta pohon.

Pada 15 Februari 2013, sebuah asteroid melintas dan meledak di Chelyabinsk, Rusia hingga menyebabkan lebih 1.200 orang terluka serta menghancurkan kaca-kaca jendela di lebih 4.000 gedung di wilayah tersebut (*Kompas*, 18 Februari 2013).

Namun, itu semua tidak sebanding dengan Apophis. "Apophis 300 kali lebih masif

dari asteroid di Tunguska dan 5.000 kali lebih masif dibanding asteroid di Chelyabinsk," kata ahli keplanetan di Institut Teknologi Massachusetts, AS, Richard Binzel.

Meski kemungkinan besar papasan Apophis dengan Bumi pada 2029 tidak akan menabrak Bumi, semua itu akan sangat bergantung pada bagaimana pola interaksi Bumi dan Apophis nantinya.

Sayangnya, sifat Apophis mungkin tidak akan pernah sama setiap kali berpapasan dengan Bumi akibat pengaruh gravitasi obyek lain selama asteroid itu memutar Matahari. Situasi itulah yang menimbulkan ketidakpastian dalam papasan Bumi-Apophis pada 2029.

Gravitasi Bumi bisa saja menarik Apophis untuk lebih dekat dengan Bumi atau menarik batuan yang ada di permukaan Apophis hingga tersebar ke lingkungan sekitar. Bahkan, gravitasi Bumi juga bisa memulurkan Apophis hingga ukurannya berubah.

Ketidaktelitian ini pernah dialami pada 1993 saat astronom mendeteksi komet baru yang dinamai Shoemaker-Levy-9. Sejumlah astronom memprediksi tak akan terjadi apa-apa, tetapi ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Akhirnya, Shoemaker-Levy-9 itu menabrak Jupiter. Tabrakan Shoemaker-Levy-9 itu membuat astronom memiliki pengetahuan baru tentang pecahan komet, materi es pembentuknya hingga Jupiter dan atmosfernya. Pengetahuan baru itu juga akan didapat saat Apophis melintas di dekat Bumi pada delapan tahun mendatang. Tentunya, manusia juga berharap bahwa simpangan Apophis dengan Bumi itu tidak menimbulkan dampak yang mencelakakan bagi Bumi, khususnya bagi makhluk hidup di atasnya.

Bozem Penampung Air



Warga beraktivitas di sekitar Bozem Barata Jaya di Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/3/2021). Bozem merupakan waduk yang dibuat untuk resapan air dan mencegah banjir. Sedikitnya 72 bozem dengan total luas 147,5 hektar telah dibangun di Kota Surabaya.

EKOSISTEM INOVASI

Kolaborasi Riset Masih Jadi Tantangan

JAKARTA, KOMPAS — Kolaborasi riset antara peneliti dan dunia usaha masih menjadi tantangan utama dalam mendorong dan meningkatkan ekosistem inovasi di Indonesia. Penguatan kolaborasi perlu terus ditingkatkan agar terjadi alih teknologi dan menciptakan produk inovasi berkualitas.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengemukakan, kurangnya sinergi dan kolaborasi riset membuat banyak produk inovasi teknologi yang berhenti saat pengembangan. Ini pada akhirnya mematikan ekosistem inovasi karena ketidakmampuan dalam melaksanakan alih teknologi dan difusi ilmu pengetahuan.

"Untuk mengatasi jurang kematian inovasi ini, upaya komersialisasi dari industri dan semua elemen harus sejak awal diperhitungkan," ujarnya dalam konferensi pers pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro pun mengatakan

tantangan terbesar saat ini menjalankan sinergi antara tiga pihak, yakni peneliti, dunia usaha, dan pemerintah.

"Kuncinya adalah antara dunia penelitian dan dunia usaha harus saling berkomunikasi dan tidak boleh ada hambatan di antara kedua belah pihak tersebut. Pemerintah kemudian memfasilitasi dan menyiapkan regulasi untuk memastikan hubungan antara peneliti dan dunia usaha bisa berjalan lancar," katanya.

Bambang menyatakan, perubahan paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis inovasi penting dilakukan di tengah kondisi Indonesia yang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ekosistem inovasi perlu ditingkatkan guna mendorong dan mempercepat perubahan ini.

"Ketika kita berupaya membentuk ekosistem inovasi yang berlaku saat ini adalah teknologi revolusi industri keempat yang ditandai dengan teknologi digital. Jadi, apa pun inovasi yang akan diperkuat tidak boleh jauh dari teknologi paling maju saat ini baik *artificial intelligence*,

internet of things, *cloud system*, maupun lainnya," tuturnya.

Bambang juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas konten lokal dalam setiap produk yang dihasilkan, baik dari sisi penelitian maupun pengembangan maupun manufaktur. Sebab, produk yang dihasilkan baru bisa disebut inovasi jika ada kebaruan atau nilai tambah dibandingkan produk lainnya yang hampir serupa.

Lembaga akuisisi

Saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakernas BPPT, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa BPPT harus mencari inovasi dan teknologi untuk dikembangkan serta siap diterapkan. Presiden juga meminta BPPT menjadi lembaga akuisisi teknologi maju guna mempercepat proses pemulih-an dan pembangunan ekonomi nasional.

"BPPT harus menyiapkan strategi akuisisi teknologi dari luar yang sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan secara cepat. Jangan sekedar membeli mesin jadi, tetapi kita harus membuat kerja sama produksi teknologi di Indonesia," katanya. (MTK/INA)

KEBUTUHAN GIZI

Salah Kaprah Diet Menurunkan Berat Badan

Memiliki tubuh dengan berat badan ideal menjadi impian sebagian besar orang. Beragam alternatif diet untuk menurunkan berat badan pun dicoba. Tidak sedikit yang akhirnya memilih cara diet yang instan dengan target penurunan berat badan yang ekstrem.

Apa pun dilakukan agar cepat kurus, sekalipun itu harus menyiksa diri. Namun, apakah baik menjalankan diet yang bisa menurunkan berat badan sampai puluhan kilogram dalam waktu singkat? Lantas, apakah ada dampak jika melakukan diet yang salah?

Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan diet yang dijalankan artis Tya Ariestya. Lewat buku berjudul *The Journey of #FitTyaAriestya*, ia menyampaikan kiatnya bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Namun, cara dietnya itu menimbulkan kontroversi terutama di kalangan ahli gizi.

Dalam bukunya, Tya menyampaikannya, sayur bisa menghambat penurunan berat badan. Selain itu, ia juga menerapkan diet super rendah kalori, yakni di bawah 500 kalori per hari.

Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association Rita Ramayuli mengatakan penurunan berat badan dengan cara defisit energi tidak boleh dilakukan secara ekstrem. Jika sangat ekstrem, kebutuhan energi basal tidak terpenuhi dan membuat organ tubuh yang bertugas mempertahankan fungsi basal metabolisme tubuh bekerja lebih keras.

"Fungsi ginjal dan hati termasuk yang paling terdampak karena proses absorpsi (penyerapan) meningkat dalam waktu yang singkat. Organ hati juga akan mempercepat kerja pemecahan zat gizi," kata Rita, Jumat (5/3/2021).

Dampaknya kelelahan pada organ ginjal dan hati karena bekerja melebihi batas ke-

mampuannya. Selain, otot pun juga harus merelakan simpanan energi untuk mempertahankan kebutuhan basal. Fungsi otot pun dapat melemah.

Keseimbangan

Pola diet juga perlu memerhatikan keseimbangan komponen dalam tubuh, seperti otot, tulang, lemak, dan air. Apabila menghilangkan salah satu sumber gizi, seperti sayur mayur, berbagai kebutuhan nutrisi untuk mempertahankan keseimbangan komponen tubuh itu tidak akan terpenuhi.

Sayur mengandung banyak serat serta zat gizi, seperti kalsium, kalium, dan magnesium. Kandungan ini dibutuhkan untuk mendukung kerja pembuluh darah dan otot, serta membentuk kepadatan tulang.

Rita menyampaikannya, kebutuhan gizi itu tak bisa digantikan dengan konsumsi suplemen makanan. Konsumsi su-

plenn yang terlalu banyak justru bisa berbahaya karena zat gizi yang diterima menjadi berlebihan dan tubuh berisiko mengalami peradangan. "Peradangan dapat membuat sistem imun tubuh bekerja lebih berat dan akhirnya berdampak pada penurunan imunitas," katanya.

Pada prinsipnya, diet untuk menurunkan berat badan dilakukan dengan mengurangi kalori dari makanan, tetapi tetap dengan kandungan gizi seimbang. Ini bisa didapatkan dari makanan beragam.

Berbagai dampak baik dari diet yang sehat ini dirasakan Intan Aprilia (26). Pegawai swasta di Tangerang Selatan ini menurunkan berat badan sampai 22 kilogram dari 86,2 kilogram dalam waktu 9 bulan.

Dalam sehari ia membiasakan konsumsi makanan sebatas 800 kalori. Pemilihan menu-punya pun sebelumnya dikonsultasikan ke ahli gizi terlebih dahulu. (DEONISIA ARLINTA)

KESEHATAN REPRODUKSI

Angka Kematian Ibu dan Bayi Meningkat

JAKARTA, KOMPAS — Angka kematian ibu dan bayi pada 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kejadian putus pakai alat kontrasepsi menjadi salah satu penyebabnya. Karena itu, perlu intervensi untuk mencegah putus pakai alat kontrasepsi, termasuk edukasi terkait kesehatan reproduksi.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Eni Gustina menyampaikan, angka kematian ibu meningkat 300 kasus dari 2019 menjadi 4.400 kematian pada 2020. Selain itu, peningkatan signifikan terjadi pada kasus kematian bayi.

"Kematian bayi pada 2019 sekitar 26.000 kasus, naik hampir 40 persen menjadi 44.000 kasus pada 2020. Jika dikaitkan masa pandemi, ini terjadi karena putus pakai KB pada pasangan usia subur," ujarnya di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Terkait hal itu, petugas di

tiap wilayah berupaya mencegah pasangan usia subur putus pakai alat kontrasepsi (KB). Peraturan Kepala BKKBN menyatakan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) boleh memberikan pil dan kondom untuk mencegah kejadian putus pakai KB.

Berbagai intervensi dilakukan agar pasangan usia subur tetap memakai alat kontrasepsi, baik suntik, kondom, pil, implan, dan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Itu dilakukan melalui kegiatan peringatan hari besar, seperti Hari Keluarga Nasional yang menargetkan satu juta akseptor.

"Masalah lain, yaitu tingginya angka *unmet need* (kebutuhan ber-KB tak terpenuhi) serta kehamilan tak diinginkan. Dari target 17,5 persen, kejadian naik menjadi 20,3 persen," tuturnya.

Merencanakan kehamilan

Melania Hidayat, Assistant Representative UNFPA (Badan Kependudukan Perserikatan

Bangsa-Bangsa), mengatakan, mutu layanan kesehatan reproduksi belum optimal sehingga memicu tingginya angka kematian ibu dan bayi. Lemahnya posisi perempuan di masyarakat pun menimbulkan kondisi yang meningkatkan risiko kematian ibu.

"Perempuan berhak mendapat akses layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian hak asasi manusia. Perempuan pun berhak merencanakan kehamilannya. Itu belum disadari warga. Karena itu, edukasi dan informasi ini harus lebih disebar lewat media," ujarnya. Edukasi

kesehatan reproduksi harus disampaikan sejak usia dini.

Ketika seseorang tahu risiko kesehatan saat hamil ataupun menikah di usia dini, dirinya menyadari pentingnya hamil di usia tepat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia perkawinan minimal 19 tahun.

Menurut Kementerian Agama, dari 2,2 juta pernikahan per tahun, 49 persen ialah pernikahan dengan perempuan usia di bawah 20 tahun. Pernikahan dengan usia melahirkan anak pertama di bawah 20 tahun berisiko pada kesehatan reproduksi serta meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, kesehatan perempuan harus dijaga. Apalagi perempuan berperan besar dalam keluarga. Dari survei BKKBN, 19 April-3 Mei 2020, perempuan punya proporsi lebih besar dalam urusan keluarga daripada pria. (TAN)



Tampilan akun media sosial milik usaha konfeksi Imajinasi Corp di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Akun media sosial menjadi salah satu upaya pemasaran usaha ini agar tetap bertahan pada masa pandemi Covid-19. Dengan menawarkan produk secara daring mereka dapat menjangkau pasar lebih luas.

Benahi Tata Niaga E-dagang

Pemerintah perlu segera membenahi tata niaga e-dagang, terutama dalam penentuan harga produk. Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi lonjakan impor melalui e-dagang.

JAKARTA, KOMPAS — Penguasaan ekosistem e-dagang oleh pihak dan kelompok masyarakat yang memiliki akses dan privilese memunculkan harga predator dan memperderas barang impor ke Indonesia. Akibatnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memproduksi barang-barang lokal tertekan dan kalah bersaing.

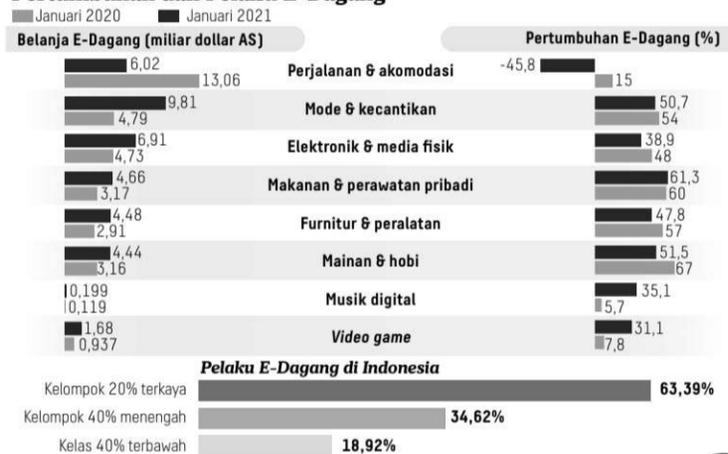
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development Economics and Finance (Indef) Media Wahyudi Askar mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Indef, mayoritas barang impor yang masuk ke sejumlah e-dagang di Indonesia berasal dari China. Investor pemain e-dagang tersebut juga merupakan perusahaan China.

Ada potensi investor mendorong vendor secara legal untuk menentukan harga dan menutup kesempatan bagi pesaing. "Hal ini menimbulkan predatory pricing (harga predator)" ujarnya dalam diskusi daring "Produk Asing: Benci tapi Rindu" yang digelar Indef di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Modus harga predator lainnya adalah memanfaatkan algoritma pada sistem e-dagang serta pembelajaran mesin yang dapat membatasi kompetitor. Sistem e-dagang dapat mendeteksi produk yang sering dibeli dan dilihat konsumen. Informasi itu digunakan untuk menciptakan produk serupa.

Hal ini terjadi pada Amazon, pemain e-dagang asal Amerika Serikat (AS). Mengutip Reuters, pada Februari 2019, Jerman, Austria, dan Komisi Eropa menginvestigasi Amazon yang dinilai berperan ganda sebagai penyedia wadah e-dagang sekaligus peritel. Regulator sempat menduga adanya praktik perdagangan tak setara, seperti penghentian akun penjual secara tiba-tiba, kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan

Pertumbuhan dan Pelaku E-Dagang



Sumber: Data Statista yang diolah dan dipublikasikan We Are Social dan Hootsuite, dan Indef.

harga pembelian, serta klausul yurisdiksi yang memperumit tindakan hukum.

Dari sisi penjual yang ada di e-dagang, media menekankan adanya potensi kesenjangan dan ketimpangan. Sebanyak 63,39 persen penjual e-dagang merupakan masyarakat di kelompok 20 persen terkaya. Proporsi masyarakat di kelompok 40 persen menengah dan golongan 40 persen terbawah masing-masing 34,62 persen dan 18,92 persen.

Dengan demikian, perkembangan e-dagang berpotensi memperlebar ketimpangan karena dikuasai masyarakat kelas atas yang memiliki akses terhadap keran barang impor. Itu menunjukkan, e-dagang belum inklusif bagi UMKM ataupun kelompok masyarakat rentan.

"Pengusaha lokal di sektor makanan-minuman, sepatu, tekstil, furnitur, dan mainan

anak paling terdampak akibat produk impor yang dijual lewat e-dagang. Euforia e-dagang yang sarat dengan produk murah justru menghambat industrialisasi," katanya.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik Bab V menekankan tentang pengutamakan produk dalam negeri. Aturan itu mewajibkan pelaku usaha e-dagang mengutamakan perdagangan yang meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri.

Sementara itu, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri

Firdaus, menyoroti melonjaknya nilai impor barang konsumsi sejak adanya fenomena e-commerce booming (ledakan e-dagang) sejak 2015. Badan Pusat Statistik mendafta, nilai impor barang konsumsi sepanjang 2015 sebesar 10,87 miliar dolar AS, lalu memuncak hingga menyentuh 17,18 miliar dolar AS pada 2018. Sepanjang 2020, impor barang konsumsi bernilai 14,65 miliar dolar AS.

Kebijakan nontarif

Menurut dia, Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan nontarif untuk mengemulsi laju impor barang konsumsi guna memberikan kesempatan bagi UMKM agar dapat menyuplai produk-produk lokal.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat, Indonesia memiliki kebijakan nontarif yang berlaku untuk 325 produk. Jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan India yang seba-

nyak 839 produk, China 2.903 produk, dan AS 6.195 produk.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis pekan lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkomitmen menyusun aturan yang membentuk kesetaraan berbisnis dalam ekosistem e-dagang dan mencegah terjadinya harga predator. Aturan ini ditargetkan rampung pada Maret 2021.

Menanggapi proses penyusunan regulasi itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga belum dapat berkomentar. Namun, idEA memastikan akan bekerja sama dengan pemerintah dalam proses penyusunan berbagai kebijakan untuk kemajuan industri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin, mengatakan, ekonomi digital di Asia Tenggara tumbuh selama pandemi. Nilai aktivitas ekonomi berbasis internet (gross merchandise value/GMV) tumbuh 5 persen atau setara 105 miliar dolar AS selama pandemi di 2020. Hal itu sesuai dengan laporan e-Conomy SEA oleh Google, Temasek, dan Brain and Company. Adapun nilainya diprediksi tumbuh 309 miliar dolar AS pada 2025.

"Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital mencapai dua digit, di atas negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura. (Kita) hanya kalah dengan Vietnam (yang pertumbuhannya) 16 persen," ujarnya.

Luhut berharap e-dagang perlu terus ditumbuhkan melalui investasi. Selain itu, ekosistem yang mumpuni juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi digital. Itu sebabnya literasi digital bagi pelaku usaha menjadi penting. Belum lagi ekonomi digital diperkirakan terus berkembang setelah pandemi.

(JUD/SKR)

E-DAGANG

Jokowi dan Era "Mr Hu"

Masih ingat "Mr Hu"? Sosok pedagang yang ramai dibicarakan warganet pada medio Februari 2021 ini melahirkan tagar #SellerAsingBunuhUMKM. Sosok ini menjadi tenar di Indonesia setelah beberapa konsumen mengunggah gambar produk yang dibeli di e-dagang dengan kemasan paket bertuliskan nama pengirim "Mr Hu" dari Guangdong, China.

"Mr Hu" boleh dikata menjadi simbol semakin begitu mudahnya produk-produk impor masuk ke sebuah negara, termasuk Indonesia, melalui e-dagang. Produk-produk impor itu bahkan banyak yang dijual dengan harga murah. Predatory pricing atau harga predator, begitu istilah yang kerap digaungkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi belakangan ini. Bayangkan, membeli sebuah topi impor di e-dagang seharga Rp 10.000 dan bebas ongkos kirim. Sementara harga sebuah topi sejenis karya pelaku usaha kecil menengah dalam negeri Rp 30.000-Rp 50.000. Cukup jauh bukan selisih harganya?

Perdagangan daring atau e-dagang Indonesia boleh dikata tengah memasuki era "Mr Hu". Sebuah era perdagangan lintas batas, yaitu pedagang besar, bahkan menengah-kecil, bisa menjajakan produk-produknya ke beberapa belahan dunia hanya dengan duduk manis di rumah. Di era ini pula, kesadaran dan gerakan mencintai produk dalam negeri terus bertumbuh.

Era ini juga semakin memperkuat sistem perdagangan beli dan jual lagi (reseller). Pedagang atau bahkan non-pedagang bisa membeli produk-produk dari luar negeri dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih menguntungkan di dalam negeri secara luring dan/atau daring. Apalagi di kala pandemi Covid-19 ini, kans reseller sangat besar mengingat banyak masyarakat membutuhkan tambahan pemasukan dan mengalami pemutusan hubungan kerja.

Selang tiga pekan tenarnya "Mr Hu", Presiden Joko Widodo melontarkan kegelisahannya tentang perdagangan yang tidak adil dalam e-dagang dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, 4 Maret 2021. Presiden menyebut ada yang tidak benar dalam perdagangan digital di Indonesia sehingga bisa membunuh UMKM. Presiden memperingatkan para raksasa digital dunia agar tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan bangsa Indonesia.

Ia juga menginstruksikan Kementerian Perdagangan untuk membangun ekosistem yang adil sekaligus kondusif. Presiden juga menegaskan, Indonesia bukan bangsa yang menyukai proteksionisme. Namun, Indonesia juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia (Kompas, 4 Maret 2021).

Kisah produk impor dengan harga kompetitif yang merugikan pelaku usaha dan industri dalam negeri memang merupakan kisah klasik Indonesia. Dahulu ancaman produk impor hanya datang dari perdagangan luring, sekarang ancaman itu datang dari lini luring dan daring.

Dalam ranah e-dagang, pedagang dalam negeri mendapatkan porsi lebih banyak. Namun, produk-produk yang dijual di laman pemasaran itu didominasi produk-produk impor. Pada 2017, Kompas pernah mencatat, jumlah produk e-dagang lokal dan asing di sebuah laman pemasaran tak berimbang. Di salah satu pasar digital, misalnya, jumlah dari beberapa jenis barang lokal yang dijual 60.439 unit, sedangkan barang impor 1.319.268 unit.

Berdasarkan dokumen impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kegiatan e-dagang berupa impor barang kiriman meningkat dari 6,1 juta paket pada 2017 menjadi 48,69 juta paket pada 2019. Adapun nilai impor barang kiriman naik dari 290 juta dolar AS menjadi 673,87 juta dolar AS.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan agar pelaku e-dagang wajib mengutamakan produk lokal dan turut meningkatkan daya saing dan promosi produk. Selain itu, pemerintah juga menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS. Barang impor dengan harga di atas 3 dolar AS dikenai bea masuk 7,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.

Bahkan, pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu, dan garmen. Ketiga produk itu tetap diberikan batasan bea masuk 3 dolar AS dan selebihnya diberikan tarif bea masuk normal (MFN) untuk tas 15-20 persen, sepatu 25-30 persen, dan produk tekstil 15-25 persen. Ketiga barang itu juga dikenai PPN 10 persen, dan Pajak Penghasilan 7,5-10 persen.

Kini pemerintah tengah menggodok regulasi untuk mengatasi harga predator. Kendati demikian, cukupkah melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan-kebijakan berbasis regulasi itu? Tentu saja tidak. Peningkatan kualitas produk dalam negeri dibutuhkan, pengawasan perlu lebih ditingkatkan, serta kesadaran mencintai dan membeli produk dalam negeri perlu terus digaungkan.

Lagi-lagi, hal ini kembali ke soal pilihan untuk menjaga iklim sehat usaha. Proteksi perdagangan bukan satu-satunya jalan. Setiap pemain mesti memiliki tingkat berbisnis yang setara (level of playing field) dan jangan saling banting-membanting harga. Selamat menyelami era "Mr Hu".

(HENDRIYO WIDD)

EKONOMI KERAKYATAN

Pengadaan Barang dan Jasa Sasar Produk Mikro, Kecil, dan Koperasi

JAKARTA, KOMPAS — Belanja Kementerian dan lembaga terhadap produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dioptimalkan. Salah satunya melalui pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, potensi paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta koperasi pada tahun 2021 senilai Rp 478 triliun.

Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen pengadaan barang dan jasa bagi usaha mikro dan kecil serta koperasi. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Tahun ini target kami bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan belanja Kementerian dan lembaga meskipun tak ada sanksi bagi Kementerian dan lembaga yang tidak memenuhi ketentuan ini," kata Menkop UKM Teten Masduki saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Teten mengatakan, selama ini muncul keluhan UMKM terkait pelaksanaan belanja pemerintah. Standar persyaratan kualitas, misalnya, masih dianggap terlalu berat bagi pelaku UMKM untuk bisa masuk katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.

Pengajuan pengadaan Kementerian dan lembaga juga masih harus lebih detail. "Hal

ini agar pelaku UMKM dari jauh-jauh hari bisa menyiapkan diri supaya dapat memasok kebutuhan Kementerian dan lembaga," kata Teten.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berpendapat, pemerintah perlu menginventarisasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dapat dipasok UMKM. Cara ini akan memancing UMKM produsen barang, terutama skala industri, memproduksi barang dengan baik.

Persepsi mengenai aspek harga dan kualitas produk perlu disamakan. Hal ini karena terkait keberpihakan terhadap UMKM dalam proses pengadaan.

Menurut Ikhsan, ajakan Presiden Joko Widodo agar mencintai produk dalam negeri dan



Teten Masduki

membenci produk asing harus sejalan dengan praktik yang dijalankan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Evaluasi berkala mesti dilakukan untuk merealisasikan potensi nilai paket pengadaan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta koperasi.

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indo-

nesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo, berpendapat, produk UMKM dalam negeri yang terbaik mesti disiapkan untuk menubstitusikan produk yang selama ini masih diimpor.

"Misi menggerakkan ekonomi rakyat tetap harus dibarengi penyediaan kualitas produk UMKM yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan produk impor," katanya.

Menurut dia, pemerintah juga perlu mendorong UMKM bertransformasi dengan cara memproduksi barang dan jasa berbasis ramah lingkungan. UMKM juga bisa diberdayakan melalui asosiasi atau kluster serta didorong berkolaborasi. Semangat koperasi dibangkitkan agar antar-UMKM tidak saling mematikan.

"Potensi nilai pengadaan yang ratusan triliun itu harus berdampak berganda dalam

konteks kesempatan kerja atau ekonomi, lingkungan, nilai tambah, dan juga jejaring kerja sama antara UMKM," ujar Tri.

Menurut Tri, potensi pengadaan pemerintah dioptimalkan agar dapat dirasakan pelaku UMKM dan koperasi di Indonesia. "Pengadaan jangan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok kecil. Kelompok harus dibesarkan agar kue ekonomi lebih terbagi secara adil," katanya.

Optimalisasi realisasi belanja pemerintah terhadap produk UMKM dapat menjadi modal untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam menggarap pasar yang lebih luas. Dengan cara ini, kepercayaan pasar terhadap produk barang dan jasa UMKM akan semakin tumbuh.

Praktik tak adil

Teten menyampaikan, peme-



SUPRIYANTO

SP/21

10 | Ekonomi&Bisnis

Indikator Perdagangan di Bursa Efek Indonesia

DATA SENIN, 8 MARET 2021

KOMPAS 100

Kode	Nama Emiten	Seb	Ttg	Trd	Pnt	+/-	Vol	PER
ACES	Acia Hardware Indonesia Tbk	1.565	1.560	1.560	1.565	-	29.676.300	38
ADRO	Adaro Energy Tbk	1.180	1.200	1.170	1.175	-5	73.786.900	17,28
ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	1.440	1.800	1.450	1.800	360	96.234.100	89,59
APLN	Asung Podomoro Land Tbk	173	176	172	172	-1	15.891.800	-6,81
AKRA	AKR Corporindo Tbk	3.400	3.740	3.460	3.720	320	61.019.700	16,83
ANTM	Aneka Tambang Tbk	2.420	2.500	2.270	2.280	-140	476.947.100	49,17
AALI	Astra Agro Lestari Tbk	10.850	11.225	10.900	11.175	325	2.078.600	27,69
ASII	Asia International Tbk	5.500	5.625	5.475	5.550	-50	55.652.900	12,02,60
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk	3.650	3.770	3.660	3.760	110	3.470.300	42,35
BBCA	Bank Central Asia Tbk	34.000	34.750	33.600	33.600	-40	18.176.600	30,7
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk	1.095	1.170	1.095	1.130	35	34.129.500	176,3
BDMM	Bank Danamon Indonesia Tbk	3.130	3.190	3.120	3.130	-	882.700	15,38
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.475	6.575	6.375	6.425	-50	27.040.000	15,67
BNNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.000	6.100	6.000	6.000	-	12.368.900	19,22
PNEB	Bank Pan Indonesia Tbk	1.120	1.130	1.050	1.095	-25	16.434.900	8,46
BABR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.575	1.585	1.550	1.560	-15	5.106.800	9,5
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	835	850	815	830	-5	51.435.200	8,42
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.770	4.820	4.730	4.730	-40	63.560.400	31,6
BBSI	Bank Syariah Indonesia Tbk	2.480	2.740	2.630	2.680	50	35.881.600	104,41
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.110	2.170	2.120	2.150	40	39.819.600	15,1
BRPT	Barito Pacific Tbk	1.025	1.050	1.025	1.025	-	35.510.300	426,27
BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	155	159	155	156	1	14.768.300	-10,5
BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk	665	705	660	685	20	70.428.600	15,76
BINA	Buana Lintas Lautan Tbk	305	310	302	304	-2	294.640.900	4,62
BPTA	Bukit Asam Tbk	2.710	2.740	2.680	2.680	-40	18.341.300	13,3
BUMI	Bumi Resources Tbk	60	61	58	59	-1	345.630.000	-1,61
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	1.205	1.235	1.200	1.210	5	18.068.100	40,92
DOBD	Bank Dunia Sembada Tbk	258	264	256	258	-4	35.512.400	16,17
TRSA	Chandra Asri Petrochemical Tbk	6.425	6.425	6.425	6.425	0	937.400	490,71
CPIN	Chandra Pileghand Indonesia Tbk	6.350	6.400	6.225	6.300	-50	7.353.300	33,97
POWR	Ciaraan Lestari Tbk	700	715	695	700	-	21.474.000	11,64
CROD	Cipta Development Tbk	1.130	1.195	1.135	1.160	30	42.519.800	69,55
DAOD	Dafta Dunia Makmur Tbk	302	308	294	296	-4	35.512.400	-34,73
ELSA	Elasa Tbk	384	406	388	398	14	823.215.200	11,65
ERAA	Erata Sempadana Tbk	2.740	2.800	2.680	2.680	-40	19.643.500	21,72
GGRM	Gudang Garam Tbk	36.600	37.100	36.550	36.575	-25	1.204.700	9,35
HMSF	H.M. Samporna Tbk	1.445	1.475	1.420	1.435	-10	46.150.800	18,12
INOP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	12.100	13.025	12.150	12.375	275	11.653.900	11,64
INDY	Indira Energy Tbk	1.460	1.490	1.405	1.420	-45	12.140.000	-7,88
ITMG	Indo Tambora Energy Tbk	11.675	11.875	11.600	11.650	-25	2.089.700	16,55
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	13.275	13.475	13.050	13.250	-25	1.092.600	32,76
KBP	Indodiponegoro Sakes Makmur Tbk	8.500	8.550	8.325	8.375	-125	12.971.400	18,49
INDF	Indodiponegoro Sakes Makmur Tbk	6.125	6.250	6.150	6.175	50	8.327.900	10,84
SDIO	Indosat Tbk	790	800	780	785	-5	9.846.600	27,56
WOOD	Integra Industri Tbk	4.125	4.250	4.100	4.125	-15	10.246.400	14,99
PSAB	J. Resources Asia Pacific Tbk	230	235	222	230	-	21.439.700	-69,84
JFPA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.645	1.715	1.660	1.695	50	45.827.000	57,96
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	4.050	4.340	4.070	4.300	250	17.813.000	148,51
KLBF	Kalbe Farma Tbk	1.555	1.570	1.550	1.555	-	31.401.200	29,21
KASE	Karya Farma Tbk	1.240	1.320	1.250	1.290	40	1.643.200	363,96
LNK	Link Net Tbk	3.310	3.370	3.300	3.340	-70	3.047.800	9,96
LPKR	Lippo Karawaci Tbk	202	206	200	202	-	54.960.100	-4,99
MAIN	Malindo Feedmill Tbk	700	720	700	715	15	10.384.900	-16,56
LPFF	Malhari Department Store Tbk	1.285	1.335	1.285	1.285	-	10.175.300	-4,23
MYOR	Mayora Indah Tbk	2.730	2.780	2.680	2.740	10	6.118.000	29,52
MEDE	Medika Energi Internasional Tbk	655	685	660	670	15	87.710.900	-6,48
MWON	Media Nusantara Citra Tbk	1.090	1.105	1.040	1.070	-20	45.483.800	8,33
MOKA	Mendoloka Copper Gold Tbk	2.600	2.640	2.600	2.600	-	79.253.300	51,02
MTDL	Mentawai Electronics Tbk	1.635	1.650	1.625	1.645	10	1.833.100	31,12
MIWA	Mitra Adijasa Tbk	950	980	965	960	-10	25.826.600	-14,69
MWKA	Mitra Kaligayuh Karasubuh Tbk	2.720	2.820	2.720	2.910	190	28.499.200	99,18
MPMX	Mitra Praisathika Mustika Tbk	540	540	530	535	-5	10.513.500	-13,28
MPTV	MNC Vision Networks Tbk	278	280	270	276	-2	18.841.300	38,07
TKM	PTK Kertas Tjiwi Kimia Tbk	13.050	14.200	13.125	13.275	225	8.173.300	12,35
APIC	Pacific Strategic Financial Tbk	785	785	770	780	-5	10.654.300	66,6
PKCN	Paksiway Jati Tbk	465	580	465	540	75	37.912.600	37,04
PNLF	Parisi Financial Tbk	234	234	226	228	-4	39.306.300	1,6
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk	1.400	1.430	1.405	1.410	10	47.164.900	32,27
PTPP	PT (Persero) Tbk	1.535	1.575	1.530	1.540	5	24.565.300	271,99
LSPP	PT Lantai Sumatra Indonesia Tbk	1.320	1.370	1.330	1.355	35	40.780.000	25,03
PPRE	PT Presia Tbk	210	214	208	208	-2	6.214.500	97,8
DAMS	Puandita Lestari Tbk	236	236	234	236	-	72.611.200	28,21
RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	760	820	765	810	50	72.656.800	536,07
RAJA	Rutan Rahajati Tbk	195	220	199	208	13	58.028.500	78,03
SIMP	Sahlin Komasa Pratama Tbk	458	478	458	478	20	24.612.400	-32,26
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk	1.175	1.225	1.155	1.135	-10	55.655.900	23,76
CLEO	Sarjana Pramatita Tbk	468	472	462	464	-4	6.840.900	44,29
SSMS	Savit Sumbermas Sarana Tbk	990	1.030	995	1.025	35	13.447.100	27,63
SMSM	Selamat Sempurna Tbk	1.350	1.350	1.305	1.305	-45	1.036.400	37,69
SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	995	985	940	945	-10	7.772.500	-62,52
SMGR	Semen Indonesia Tbk	11.200	11.550	10.950	10.975	-225	7.743.100	59,8
SOCL	Seelich Lines Tbk	204	212	204	206	-2	17.788.300	27,94
SRII	Sri Rejeki Iman Tbk	230	234	226	226	-4	21.744.600	3,15
SMRA	Sunmarecon Agung Tbk	870	900	870	875	5	28.708.500	-77,27
SOAA	Surya Citra Media Tbk	1.805	1.830	1.770	1.785	-20	3.354.600	21,94
SSIA	Surya Semesta Intermasa Tbk	486	494	482	482	-4	22.289.100	56,2
TUMI	Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.320	3.400	3.330	3.340	20	80.944.900	14,88
TINS	Timah Tbk	1.890	1.965	1.780	1.790	-100	121.704.100	-39,19
TBKG	Tower Bersama Infrastructure Tbk	2.070	2.110	2.030	2.060	-10	37.325.000	44,2
TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk	920	955	930	945	25	4.695.000	9,35
UNWR	Unilever Indonesia Tbk	6.725	6.800	6.625	6.650	-75	10.143.900	34,99
UNTR	United Tractors Tbk	21.800	22.400	22.100	22.325	125	11.950.900	12,22
VALD	Valde Indonesia Tbk	2.150	2.275	4.800	4.830	-30	77.938.000	14,88
WSPS	Waskita Beton Precast Tbk	250	256	246	248	-2	46.574.300	-4,29
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	1.405	1.460	1.400	1.410	5	43.503.000	-5,4
WIRA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.725	1.770	1.705	1.715	-10	19.074.500	229,27
WISG	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	240	230	222	228	-4	13.472.800	12,5
WYON	Wijaya Karya Beton Tbk	352	356	346	350	-2	7.477.300	41,66
WIM	Wimikol Inti Makmur Tbk	825	870	810	825	-	21.555.900	11,95
EXCL	XI Aviation Tbk	2.190	2.220	2.160	2.180	-10	20.290.100	8,42

Sumber: Lirts

KILAS EKONOMI

Penjualan SRO14 untuk Biayai Infrastruktur

Sejak masa pemesanan dibuka pada 26 Februari 2021 hingga akhir pekan lalu, pemesanan masyarakat terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk ritel SRO14 mencapai Rp 5,35 triliun. Pemerintah menargetkan penjualan hingga 18 Maret 2021 cukup 10.000 WIB sebesar Rp 10 triliun. Kepala Subdirektorat Peraturan dan Analisis Hukum SBSN Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Nana Riana mengatakan, hasil penjualan SRO14 akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air. "Membeli sukuk artinya turut serta membangun negeri," katanya dalam webinar terkait SRO14 bersama Citi Indonesia, Senin (8/3/2021). Citi Indonesia Retail Banking Head Steven Suryana mengatakan, Citi Indonesia menjadi salah satu mitra distribusi SRO14. (DIM)

Bank Permata Miliki 4 Juta Nasabah

Setelah menuntaskan proses akuisisi dengan Bangkok Bank pada Desember 2020, per akhir 2020 PT Bank Permata Tbk memiliki 4 juta nasabah yang tersebar di 300 cabang di 62 kota. Bank yang sejak 20 Januari 2021 masuk jajaran bank umum kegiatan usaha IV dengan modal Rp 43 triliun itu menyalurkan kredit Rp 118 triliun per akhir 2020. Penyaluran kredit yang tumbuh 9,2 persen secara tahunan ini didukung pengalihan aset Bangkok Bank Indonesia melalui proses integrasi sebesar Rp 17,3 triliun. "Permodalan dan likuiditas kami terjaga kuat," kata Direktur Utama Bank Permata Ridha DM Wirakusumah dalam siaran pers, Senin (8/3/2021). Ridha yang telah dilantik sebagai CEO Lembaga Pengelola Investasi ini akan menjabat Direktur Utama Bank Permata sampai dengan 17 Maret 2021. (C/IDR)

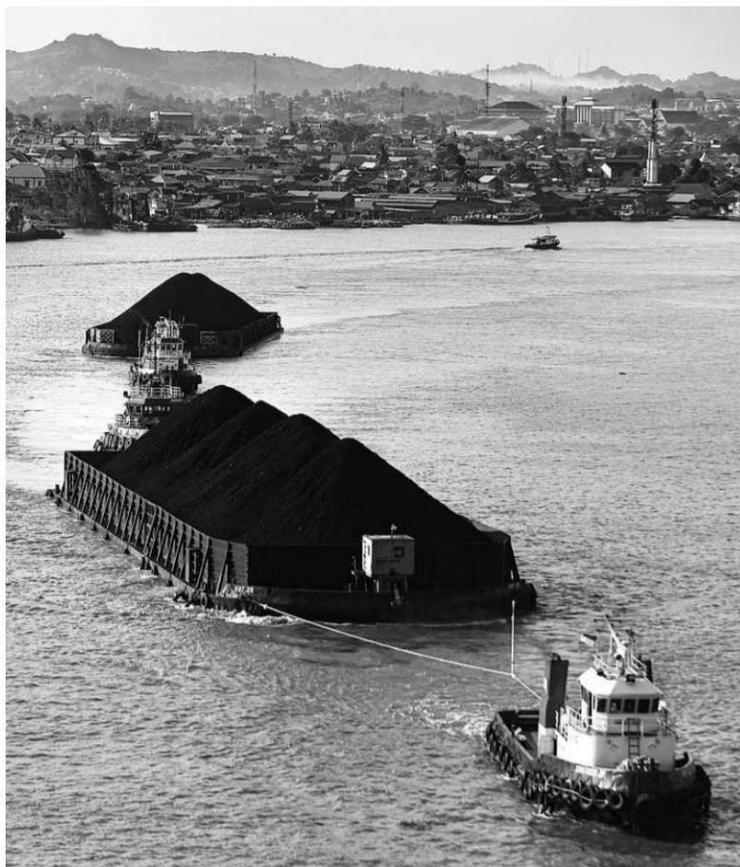
Olahan Kayu Sengon



KOMPAS/P. RADITYA MAHENDRA VASA

Pekerja menyusun hasil olahan kayu sengon sebagai bahan dasar pembuatan kayu lapis di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (7/3/2021).

Mengangkut Batubara



KOMPAS/PRIYOMBODO

Tongkang-tongkang bermuatan batubara melintasi ruas Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (8/3/2021). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batubara Indonesia per 8 Maret 2021 sebanyak 9505 juta ton atau setara 17,28 persen dari target produksi yang sebanyak 550 juta ton pada tahun ini.

Hati-hati Lakukan Privatisasi BUMN

Swastanisasi BUMN dapat mendorong perusahaan menjadi lebih sehat dan kompetitif. Namun, pelaksanaannya harus hati-hati agar tak mengganggu sektor kepentingan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah memprivatisasikan sejumlah perseroan yang memiliki pendapatan kecil perlu disikapi secara selektif dan saksama. Swastanisasi badan usaha milik negara jangan sampai menyentuhkan sektor-sektor strategis yang menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak.

Peneliti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LMFEBUI) Toto Pranoto, Senin (8/3/2021), mengatakan, swastanisasi perusahaan pelat merah pada dasarnya dapat mendorong BUMN menjadi lebih sehat dan kompetitif. Namun, pelaksanaannya harus ekstra hati-hati agar tidak mengganggu sektor yang berkaitan dengan kepentingan publik.

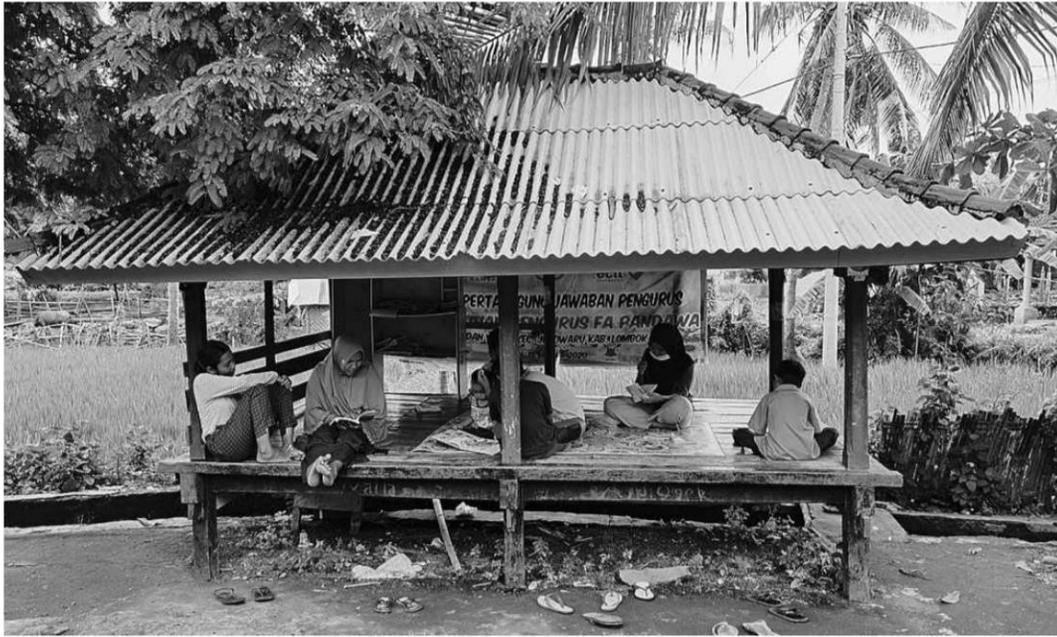
"Langkah privatisasi ini tentu membutuhkan telaah yang lebih komprehensif dan saksama agar dampaknya di jangka panjang tidak sampai merugikan kepentingan publik atau kepen-

tingan nasional," ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Toto mencontohkan, kasus pelepasan sebagian besar saham PT Indosat Tbk pada 2002 ke perusahaan Singapura yang berkembang menjadi sengketa karena dianggap sebagai industri yang relatif strategis.

Ada pula berbagai pengalaman privatisasi BUMN di negara lain yang menunjukkan bahwa ketika sektor strategis yang penting bagi hajat hidup diambil alih swasta, dampaknya dapat merugikan masyarakat. Itu karena swasta cenderung mengejar keuntungan, berbeda dengan BUMN yang juga bertanggung jawab melayani publik.</

Anak-anak Pekerja Migran



Anak-anak pekerja migran mengisi waktu dengan membaca buku di Sekretariat Forum Anak Pandan Wangi di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (3/3/2021). Forum itu aktif mendorong pemenuhan hak anak-anak pekerja migran yang sudah ditinggal orangtua mereka sejak kecil.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kisah Pilu Pekerja Migran

Kisah pilu masih saja menimpa pekerja migran Indonesia di negeri jiran. Mereka berharap skema perlindungan yang lebih komprehensif sejak berangkat dari daerah asal hingga kembali lagi.

Abdullah Filki Ashri dan Melati Mewangi

Belasan tahun mengadu nasib di Malaysia. Umaya (59) akhirnya pulang ke rumahnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak lama, ia meninggal, membawa semua kisah pahitnya.

Rabu (3/3/2021) adalah hari ke-40 perginya Umaya. Meskipun lama kerja di Malaysia, ia tidak menyimpang jutaan rupiah seperti pekerja migran lainnya. "Waktu pulang 10 bulan lalu, kakak saya hanya membawa Rp 40.000. Penglihatannya terganggu. Tiga bulan berikutnya, dia enggak bisa jalan karena diabetes," kata Afifah (50), adik Umaya.

Umaya berangkat ke Malaysia tahun 2005 tanpa dokumen melalui Medan, Sumatera Utara. Sesampainya di Malaysia, dia bekerja sebagai buruh cuci di warung. "Ternyata, temannya itu menjual kakak saya. Dia berpindah-pindah majikan. Gajinya juga enggak dibayar penuh," katanya.

Ketika keluarga Umaya dirundung duka, keluarga Mei Harianti (26), pekerja migran asal Cirebon di Malaysia, terus memperjuangkan haknya. Mei korban kekerasan majikannya. Padahal, dia baru 13 bulan bekerja di sana dan berangkat sesuai prosedur.

Kasus Mei terungkap berkat advokasi lembaga swadaya masyarakat pembela hak pekerja migran di Malaysia, Tenaganita. Aktivistanya melapor ke polisi dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur untuk menyelamatkan Mei dari rumah majikannya, Selasa (24/11/2020). Polisi pun menangkap majikan Mei. "Mei masih di Kuala Lumpur untuk sidang. Sidang pertama selesai, tetapi masih ada kelanjutannya," ujar Gunawan (31), kakak Mei.

Perlawanan juga masih dilakukan Sukara (57), warga Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jabar. Akhir Desember 2017, dia pun berangkat ke kebun nanas dengan janji gaji Rp 210.000 per hari dan akomodasi terjamin. Setelah di Malaysia, Sukara bekerja 11 jam sehari dan hanya bergaji separuh dari janji. Dia akhirnya pindah kerja ke peternakan sapi sampai kemudian berusaha pulang dan berakhir di tahanan imigrasi setempat.

Tiga bulan ditahan dan kehilangan semua tabungannya sebelum akhirnya pengadilan memutuskan Sukara bersalah dan dideportasi. "Cukup saya saja yang merasakan ngernya bekerja di sana," kata Sukara.

Sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia Karawang Karyono mengatakan, pihaknya mendampingi Sukara dan mantan pekerja migran lainnya di Desa Sukamulya. Hingga kini, kasus ini masih ditangani Polres Karawang. "Ada juga sejumlah penyintas masih merasakan trauma karena ditipu dan mengalami kekerasan," katanya.

Regulasi daerah

Ketua Pelaksana Harian Yayasan Salman Karawang Wiharti Ade Permana menilai, pemerintah daerah harus lebih aktif menyosialisasikan prosedur penempatan pekerja migran. Ketidaktahuan mereka dalam mencari informasi sponsor atau agen bisa mengantar mereka pada langkah yang salah. Yayasan Salman Karawang, organisasi yang kerap mendampingi buruh migran terdampak masalah, mendorong agar rancangan peraturan daerah tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Karawang segera disahkan untuk melindungi warganya.

Kisah pilu pekerja migran Indonesia bagai tak pernah usai. Selebrasi foto lawas menjadi satu-satunya kenangan bagi Tri Subekti (44), warga Desa Kedungwuluh Kidul, Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terhadap Purwanti, al-

marhum ibunya. Purwanti merantau ke Malaysia selama 23 tahun. Dia pulang ke Tanah Air tahun 2014 dalam keadaan linglung dan meninggal dua hari kemudian. Tri dan keluarganya tak bisa banyak menggali kisah sang ibu. Menurut Tri, ada satu luka atau bekas jahitan di perut Purwanti, tanpa ada yang tahu penyebabnya. "Kami tahu ibu telantar di tepi jalan dari postingan Facebook teman di Notog," tutur Tri di rumahnya di Desa Kedungwuluh Kidul, Jumat (5/3).

Keinginan hidup sejahtera adalah tekad sebagian warga Jawa Timur yang menjadi pekerja migran dengan segala risikonya. Dalam kesaksian di forum buruh migran di Surabaya, Dwi Wulandari, warga Blitar, menyatakan, terlalu percaya teman membuatnya mendekam di penjara lebih dari 7 tahun di Filipina atas tuduhan terlibat sindikat narkoba internasional. Dwi dinyatakan tidak bersalah dan akhirnya bebas untuk melanjutkan hidup dalam dunia pariwisata di Bali.

Asep Maulidi, pegiat perburuhan dari Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, mengatakan, wilayah di Laut Jawa yang jauh di utara daratan Jatim ini juga menjadi kantong pekerja migran. Setidaknya 70 persen lelaki Pulau Bawean merantau ke Malaysia, Singa-

pura, Australia, dan Taiwan. Pulau tersebut dijuluki "Pulau Putri" karena nyaris hanya di-tempati perempuan.

Menurut catatan Bank Indonesia, pengiriman uang dari luar negeri (remitansi) ke Jatim pada 2020 mencapai Rp 6,58 triliun dengan 1,071 juta transaksi. Nilai itu turun akibat pandemi Covid-19 dibandingkan 2019, yang Rp 6,74 triliun melalui 1,035 juta transaksi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Hiwan Estu Bagijo mengatakan, pekerja migran mutlak punya pengetahuan, kompetensi, dan kewaspadaan sebagai bekal bekerja di mancanegara.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani juga mendorong pemerintah segera meninjau ulang Nota Kesepahaman Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Domestik Indonesia yang ditandatangani tahun 2006 dan sudah habis masa berlakunya tahun 2016. Dengan begitu, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bisa ditingkatkan.

Perlindungan negara seharusnya tidak mengenal batas geografis. Pendampingan sebelum pergi jauh lebih baik ketimbang menyelesaikan masalah setelah pulang.

(DKA/KOR/BRO/ETA/HAM/TRA)

KILAS DAERAH

29.250 Benih Lobster Berkedok Paket Makanan

SIDOARJO — Upaya penyelundupan benih lobster terus terjadi. Senin (8/3/2021), sebanyak 29.250 benih lobster diselundupkan melalui terminal kargo Bandara Juanda dengan kedok paket makanan menggunakan Lion Air tujuan Batam, Kepulauan Riau. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya Muhlin mengatakan, dari 29.250 benih itu, 29.000 ekor jenis mutiara dan 250 ekor jenis lobster pasir. Total nilai hampir Rp 3 miliar. "Ini mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia," ujar Muhlin, kemarin. Tahun 2020, ada empat kali upaya penyelundupan digagalkan, dua di antaranya melalui Bandara Juanda. Penyelundupan benih lobster juga digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (5/3), sebanyak 23.942 benih melalui kargo Garuda Indonesia tujuan Tanjung Pinang. Selama ini tujuan penyelundupan ke Singapura dan Vietnam, yang juga dikirim ke negara lain. (NIK)

Ribuan Hektar Hutan untuk Bendungan Sultra

KENDARI — Pembebasan lahan Bendungan Pelosika seluas 5.949 hektar di Konawe dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, mulai dilakukan. Pembebasan lahan bendungan ketiga terbesar di Indonesia itu menelan anggaran Rp 937 miliar, diawali dengan pembebasan 2.127 hektar kawasan hutan. Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari Agung Permana menyatakan, pada 2021 pihaknya fokus pada pembebasan lahan, khususnya kawasan hutan yang masuk dalam area pembangunan bendungan. Pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Pembebasan lahannya kami sudah mulai, tetapi masih fokus ke kawasan hutan. IPPKH perlu pengurusan yang tidak cepat, jadi kami awali dengan hal tersebut. Untuk lahan masyarakat belum kami lakukan," ujar Agung di Kendari, Senin (8/3/2021). (JAL)

Dua Meninggal dalam Rekrutmen UKM Silat

BATU — Polisi menyelidiki meninggalnya dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saat kegiatan penerimaan anggota unit kegiatan mahasiswa (UKM) Silat, Pagar Nusa. Keduanya meninggal pada Sabtu (6/3/2021) sore, yakni Miftah Rizki Pratama mahasiswa semester II Jurusan Tadris Matematika, asal Bandung, Jawa Barat, dan Faisal Lathiful Fakhri, mahasiswa semester II Jurusan Ekonomi Syariah, asal Lamongan, Jawa Timur. Rizki dibawa ke RS Karsa Husada Kota Batu, sedangkan Faisal dilarikan ke Puskesmas Karangploso, Kabupaten Malang, Jatim. Polisi telah memeriksa 11 saksi, baik panitia maupun pihak kampus. "Untuk menentukan unsur pidananya, pemeriksaan sedang kami dalam," ujar Kepala Polres Batu Ajun Komisaris Besar Catur Cahyono Wibowo, Senin (8/3). Pembantu Rektor III UIN Maulana Malik Ibrahim, Isroqunnajah, di sela-sela pemeriksaan mengatakan, panitia kegiatan tidak meminta izin ke kampus. Polisi dan satuan tugas Covid-19 juga tidak diberi tahu. (WER)



SUPRIYANTO

PEMBANGUNAN DAERAH

Wali Kota Palu Pastikan Berbasis Mitigasi Gempa

PALU, KOMPAS — Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memastikan rencana pembangunan Kota Palu, Sulawesi Tengah, ke depan akan selalu memperhatikan mitigasi gempa dan bencana ikutannya. Gempa yang diikuti tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2019 menjadi pelajaran luar biasa. "Kami berusaha untuk menyiapkan cara-cara yang baik untuk menghadapi kondisi kegempaan. Kita harus beradaptasi dengan keadaan itu. Saya pastikan Pemerintah Kota Palu akan memperhatikan itu (kerawanan gempa)," kata Hadianto di Palu, Senin (8/3/2021).

Hadianto menegaskan, pembangunan berbasis pengurangan risiko (mitigasi) akan menjadi bagian penting dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sedang disusun. "Beri kami kesempatan agar menyiapkan langkah-langkah teknis terkait mitigasi itu," ujarnya.

Hadianto menyebut hal-hal teknis mitigasi, antara lain aturan atau panduan mendirikan bangunan, baik rumah maupun gedung. Ia mencontohkan rumah atau hunian tetap penyalang gempa yang direlokasi berspesifikasi tahan gempa. "Seusai dilantik pada Jumat (26/2), Hadianto menyatakan, dirinya telah meminta dukungan besar dari segi anggaran untuk program mitigasi. Ini agar upaya-upaya mitigasi berjalan dengan baik.

Hadianto dan Reny Lamadjidjo memimpin Kota Palu setelah memenangi pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Hadianto mengalahkan petahana Hidayat. Ketidaksiapan Palu menghadapi bencana tampak pada 28 September 2018 saat daerah itu bersama dengan Kabupaten Donggala dan Sigi diguncang gempa bermagnitudo 7,4 yang menelan sedikitnya 4.000 korban jiwa.

Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi yang harus direlokasi karena kawasan permukiman lama mereka ditetapkan sebagai zona merah atau dilarang ada pembangunan hunian baru.

Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandrajita yang meminta tak ada lagi pembangunan infrastruktur baru di Palu, Hadianto mengatakan, hal itu bentuk peringatan dari pemerintah pusat. Luhut dalam rapat koordinasi kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kamis (4/3), meminta tidak ada lagi pembangunan infrastruktur baru di Kota Palu karena tanah di Palu sangat labil.

Dua fase

Pegiat literasi kebencanaan, Neni Muhidin, menjelaskan, kunci mitigasi pada dasarnya pada dua fase penting, yakni prabencana dan pascabencana. Dua fase itu saling mengisi dan melengkapi dalam konteks pengurangan risiko bencana. Satu fase lainnya, tanggap darurat, juga penting, tetapi tetap harus dipersiapkan pada dua fase lainnya.

Neni berharap pemerintah fokus pada dua fase itu. Di fase tersebut mitigasi struktural (teknik bangunan) dan non-struktural (edukasi, sosialisasi, simulasi, dan regulasi) harus diimplementasikan secara nyata di masyarakat.

"Kami terutama fokus mitigasi nonstruktural dengan harapan edukasi, sosialisasi, dan simulasi menghadapi gempa dan bencana lainnya harus menjadi kebiasaan baru ke depan," ujarnya. Untuk itu, tidak boleh ada anggapan bahwa warga masih mengangap gempa sebelumnya sehingga tidak perlu sosialisasi mitigasi bencana. Warga harus selalu dibekali pengetahuan praktis terkait tanggap bencana. (VDL)

PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Sejumlah Daerah Kejar Target Vaksinasi bagi Guru

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah daerah mengejar target penuntasan vaksinasi Covid-19 bagi guru. Hal itu dilakukan demi memenuhi target pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal tahun ajaran mendatang.

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menargetkan penuntasan vaksinasi bagi guru pada April 2021. Vaksinasi dimulai terhadap 825 guru dalam dua hari ke depan. Total ada 17.000 tenaga pengajar yang menjadi sasaran vaksinasi.

"Kalau semua tenaga pengajar sudah divaksin, kemungkinan Juli 2021 pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan," kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda sesuai memantau vaksinasi untuk guru, Senin (8/3/2021).

Yusnita (55), pengajar di Taman Kanak-kanak Mutiara Palembang, berharap pembelajaran tatap muka dapat segera direalisasikan. "Dengan mengajar secara langsung, kita bisa menyalurkan kasih sayang kepada anak didik, tidak terbentur layar komputer atau telepon genggam," ujarnya.

Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, berencana memulai sekolah tatap muka pada awal April 2021 untuk SD dan SMP. Untuk itu, semua guru dan tenaga kependidikan ditargetkan rampung divaksinasi pada akhir Maret.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palu Asnyar Sutiaji menyatakan, diperlukan pengaturan terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Beberapa hal yang bakal

diatur antara lain jumlah rombongan belajar, waktu pembelajaran, serta tempat cuci tangan dan alat ukur suhu tubuh.

Pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap, untuk penyesuaian dan pembiasaan penerapan protokol kesehatan. Harapannya, semua komponen pendidikan terbiasa mengelar pembelajaran tatap muka lagi.

Keberatan orangtua terkait pembelajaran tatap muka akan tetap didengarkan. Siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Penutupan sekolah juga akan dilakukan jika muncul kasus penularan baru.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Husaema mengatakan, lebih kurang 4.500 guru pendidikan usia dini, SD, dan SMP bakal segera divaksin.

Meski belum ada vaksinasi bagi guru, Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berencana memulai kegiatan belajar-mengajar tatap muka tingkat SD dan SMP hari ini. Sekolah yang diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka hanya yang berada di desa yang berstatus sebagai zona hijau.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Achmad Taufiq menyatakan, pembelajaran tatap muka dilakukan terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Hanya sekolah-sekolah yang berada di desa zona hijau. Peserta didik dan pengajar yang boleh ikut belajar tatap muka juga hanya yang berasal dari desa zona hijau," kata Taufiq.

Sedianya pembelajaran tatap muka digelar kemarin. Rencana

itu ditunda karena masih ada sekolah yang menyediakan sarana pendukung protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dengan sabun dan masker cadangan.

Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kluster penyebaran Covid-19 di pondok pesantren muncul lagi. Sebanyak 169 santri, pengurus, dan pengasuh dari dua ponpes, yakni Pesantren Tahfidz Abdurrahman Basuri dan Pesantren Al Urwatul Wutsqo, terpapar.

Percepatan

Pemkab Cirebon, Jabar, mempercepat vaksinasi Covid-19 melalui vaksinasi massal dan menambah jumlah petugas. Percepatan antara lain dilakukan dengan vaksinasi massal sekitar 3.500 pegawai di lingkungan Pemkab Cirebon, Senin-Rabu (8-10/3), di GOR Ranggajati. Sekitar 100 petugas bersiaga, dari meja pendaftaran, skrining, penyuntikan vaksin, hingga observasi.

Pemerintah Provinsi Jateng juga mendorong percepatan vaksinasi. "Manajemennya saja (yang didorong untuk percepatan). Nanti kami juga akan menambahkan pada laman Covid-19 terkait vaksin sehingga publik bisa tahu. Percepatan juga tergantung dari berapa vaksin yang dikirim," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Hingga kemarin, terdapat 158.396 kasus positif kumulatif di Jateng. Sejumlah 142.326 orang sembuh, 6.091 orang dirawat, dan 9.979 orang meninggal. (RAM/XTI/VDL/DIT/IKI)



KOMPAS/P. RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas menenangkan salah satu peserta vaksinasi tahap kedua yang memiliki ketakutan pada jarum suntik di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (8/3/2021). Vaksinasi Covid-19 terus berjalan dan bertahap bagi sebagian warga dan profesi dengan kerentanan tertular Covid-19 yang tinggi.

12 | Metropolitan

KILAS METRO

Tersangka, Dirut Sarana Jaya Dinonaktifkan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Jumat (5/3/2021). "Gubernur langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi dalam keterangan tertulis, Senin (8/3). Yoory diduga terlibat dalam keterangan tertulis, Senin (8/3). Yoory diduga terlibat dalam keterangan tertulis, Senin (8/3). Yoory diduga terlibat dalam keterangan tertulis, Senin (8/3).

Belasan Anggota Geng Motor Serang Diperiksa

Belasan anggota geng sepeda motor All Star Serang Timur, Banten, Senin (8/3/2021), diperiksa polisi sesuai video viral konvoi sembari mengacungkan senjata tajam di persimpangan Cicri, Jalan Ahmad Yani, Sabtu (6/3) dini hari. "Kami masih melakukan pengembangan. Kemungkinan jumlah yang kami amankan terus bertambah," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Komisaris Besar Martri Sonny, Senin pagi. Diperkirakan ada 100 peserta konvoi. Kejadian itu menggejutkan karena selama ini Kota Serang jauh dari aksi-aksi merebak. Untuk mencegah aksi serupa, aparat keamanan diharapkan mengencangkan patroli. Selain itu, pemerintah juga mewartakan aktivitas remaja dan anak muda yang masih mencari jati diri, di antaranya menambah ruang publik. (JOG)

Hari Libur di Rumah Saja

Jabodetabek kembali bersama-sama memperpanjang pembatasan mikro. Upaya tersebut diimbangi imbauan agar warga di rumah saja saat libur nasional dan libur akhir pekan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Ibu Kota diperpanjang sampai 22 Maret 2021. Langkah ini diiringi dengan kebijakan yang sama di Tangerang Raya, Banten. Sebelumnya, Bogor, Depok, dan Bekasi di Jawa Barat telah terlebih dulu menyatakan melanjutkan PPKM mikro.

Pemerintah daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabek sepakat bahwa PPKM mikro terbukti mampu menekan laju penularan dan penambahan kasus positif Covid-19.

Secara garis besar, kasus positif Covid-19 di Jakarta tampak menurun. Namun, masyarakat belum bisa menarik napas lega. "Akhir pekan ini adalah *long weekend*. Makanya, kami masih agak khawatir," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika dihubungi, Senin (8/3/2021).

Pemerintah pusat telah memutuskan tidak ada kebijakan cuti bersama. Namun, penda tetap menyiapkan diri menghadapi kemungkinan pergerakan warga secara masif.

Ini berkaca pada pengalaman libur Imlek pada Februari lalu dengan kondisi tanpa lonjakan kasus positif Covid-19. Meskipun begitu, harus ada kepastian bahwa pergerakan masyarakat dari Jakarta ke luar kota bisa ditekan saat libur Isra Miraj dan hari raya Nyepi agar tidak terjadi penambahan kasus.

Perpanjangan PPKM ini diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 213 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Jangka Waktu dan Pembatasan aktivitas Luar Rumah. Menurut Anies, PPKM di Pulau Jawa dan Bali berhasil menurunkan perkembangan kasus Covid-19 di Ibu Kota. Sebelumnya, pe-



Kendaraan yang didominasi milik pribadi terjebak kemacetan di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro selama dua minggu ke depan dimulai dari 9 Maret hingga 22 Maret 2021. Meski dalam ketentuan PPKM mikro itu di antaranya mengatur aktivitas perkantoran sebanyak 50 persen kerja dari rumah, kepadatan arus lalu lintas saat jam berangkat dan pulang kerja terasa seperti saat normal sebelum pandemi.

ngendalian kasus sukar meskipun Jakarta menjalankan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jika kabupaten/kota satelit tak menerapkan pembatasan yang ketat.

Dalam waktu yang berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Widyastuti menjelaskan, saat ini ada 7.209 kasus Covid-19 aktif atau pasiennya tengah menjalani pengobatan dan isolasi. Persentase kasus positif di bulan Maret juga menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan, yakni menjadi 11,6 persen. Pada bulan Februari, persentase kasus positif mencapai 18 persen. Meskipun begitu, tingkat ini masih dua kali lipat batas aman

5 persen yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Tingkat penularan virus juga turun dari 1,04 di bulan Februari kini menjadi 1,02," tutur Widyastuti. Para ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat menyatakan pandemi dikategorikan terkendali apabila tingkat penularan virus korona baru di bawah 1.

Ganjil genap

Di Kota Bogor, baru sepekan peniadaan kebijakan ganjil genap, mobilitas warga dan kendaraan bermotor pada Sabtu-Minggu (6-7/3) terpantau ramai. Kondisi itu membuat Wali Kota Bogor Bima Arya

Sugiarto mempertimbangkan kembali pemberlakuan ganjil genap pada pekan ini.

"Saat tidak ada ganjil-genap terjadi peningkatan kendaraan yang masuk ke Kota Bogor. Kami akan rapat evaluasi untuk merumuskan kebijakan penanganan Covid-19. Juga untuk antisipasi libur panjang pekan besok," kata Bima, Senin.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, berkat PPKM mikro, saat ini tidak ada lagi RW zona merah. Adapun RW berstatus zona oranye tersisa tiga wilayah, zona kuning 310 wilayah, dan zona hijau 488 wilayah. Namun, saat mobilitas warga meningkat kembali, kondisi yang makin stabil

itu bisa memburuk.

Di sisi lain, peniadaan kebijakan ganjil genap pada akhir pekan kemarin mampu meningkatkan kunjungan hotel dan restoran. "Rata-rata tingkat hunian hotel mencapai sekitar 70 persen dari sebelumnya 40-50 persen. Sementara restoran meningkat 35 persen," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay.

Meskipun demikian, kesehatan publik tetap yang utama. PHRI pun tetap mendukung kebijakan pemerintah.

Di Tangerang Raya, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wali Kota Tangerang

Arief R Wisnansyah turut mendukung perpanjangan PPKM mikro. Hal ini terutama bertujuan menekan mobilitas antarwilayah di Tangerang dan Jakarta. Publik diimbau menahan diri dan di rumah saja saat ada tanggal merah berdekatan dengan akhir pekan.

Di Bekasi, pemkot memperketat PPKM mikro di lima dari 12 kecamatan. Kelima kecamatan sasaran PPKM mikro yaitu di Jatiasih, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara, dan Mustikajaya. "Lima keluhan untuk menegatkan di tingkat RT dan RW. Nanti delapan hari kami evaluasi lagi," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Evaluasi di akar rumput

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Wilayah Jakarta Baequni Boerman mengatakan, kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, kesadaran ini belum menyeluruh karena masih banyak anggota masyarakat, terutama di akar rumput, seperti kampung kota dan pasar tradisional, yang belum tekun menerapkannya.

Menurut Baequni, setahun pandemi, secara umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak ada gerakan berarti dalam mendidik komunitas akar rumput. Pola informasi tetap kaku dan bersifat dari atas ke bawah, termasuk pembentukan satuan tugas Covid-19.

"Sejauh ini belum ada evaluasi tentang benar tidaknya informasi diterima dan dipahami masyarakat. Sesudah itu harus ada pula evaluasi jika informasi diterima masyarakat dan mau melakukan protokol kesehatan," ujar Baequni.

(DNE/GIO/IGA/VAN)

KLASIFIKASI IKLAN

Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh tim iklan Kompas. Informasi pada iklan merupakan tanggung jawab pemasang iklan.

KARIER

Sekaranglah Waktunya

Kita tidak bisa pasif menunggu krisis berakhir dan berharap akan muncul pelangi dengan sendirinya. Sekaranglah waktunya kita bangkit. Setiap orang perlu berdiri di atas keadaan dengan segala kekurangannya dan mulai menghidupkan semangat serta menjalankan organisasi.

Simak penjelasannya di bit.ly/kla0903

IKLAN BARIS & KOLOM

OTOMOTIF	13
PROPERTI	13
RAGAM	13
KARIER	13

PINDAI QR CODE INI UNTUK CARA MUDAH PASANG IKLAN

HOTLINE
(021) 2567 6000

PASANG IKLAN
bit.ly/pasangikl

10 Makanan Rendah Kalori yang Nikmat untuk Diet

Mumpung masih awal tahun, kini menjadi saat yang tepat untuk memulai diet. Berikut ini, sejumlah makanan rendah kalori yang bisa Anda santap selama program diet berlangsung.

- Ikan salmon**
Selain rendah kalori, salmon juga kaya akan protein, lemak sehat dan tentunya juga omega 3.
- Ikan kod**
Ikan yang satu ini juga mengandung vitamin B12, niasin atau vitamin B3, dan selenium. Cara mengolahnya terserah Anda. Namun, akan lebih optimal jika tidak menggorengnya.
- Telur**
Makanan yang tergolong universal ini hanya perlu direbus untuk dinikmati bersama sejumput garam dan merica.
- Kentang**
Kentang yang rendah kalori ini juga kaya akan vitamin dan mineral. Selain direbus, Anda juga bisa memanggangnya atau menggoreng menggunakan *air fryer*.
- "Oatmeal"**
Makanan yang satu ini sangat membantu program diet. Agar terasa nikmat, kreasikan menjadi *overnight oat*.
- Avokad**
Kandungan serat dan lemak sehatnya membuat buah ini baik disantap siapa pun, termasuk oleh bayi sekalipun.
- Salad sayur**
Untuk menikmati salad sayur, campurkan selada dan tomat ceri dengan minyak zaitun dan perasan jeruk lemon. Jangan lupa taburkan sejumput garam untuk menambah kenikmatan.
- Dada ayam**
Diet tetap nikmat dengan menyantap dada ayam. Hanya saja, hindari kulit ayam dan bagian tubuh lainnya. Agar lebih sehat, dada ayam ini bisa dipanggang dengan resep favorit.
- Yoghurt**
Selain nikmat disantap langsung, yoghurt bisa dijadikan *smoothie* bersama buah kesukaan Anda, seperti buah naga atau stroberi.
- Buah**
Buah selalu nikmat dijadikan makanan diet. Sebut saja apel, pir, melon atau semangka yang kaya akan air.

Pindai QR Code Simak artikel menarik lainnya di Klasika.kompas.id

Klik!

KLINIK FOTOGRAFI



FOTO-FOTO: KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga yang berada di kawah Gunung Bromo (foto kiri) berusaha menangkap sesaji yang dilempar warga Tengger dalam rangkaian Yadnya Kasada di Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (6/7/2020). Warga Tengger berjalan menuju puncak Gunung Bromo untuk berdoa dan melemparkan sesaji (foto tengah dan bawah) dalam rangkaian Yadnya Kasada, Senin (6/7).



Persiapan Membuat Pemotretan Perjalanan Lebih Gampang

Ada anggapan foto yang bagus itu sudah ada sejak dalam pikiran. Kalimat itu benar adanya. Hal yang pasti, foto bagus sulit didapat jika tidak ada persiapan yang matang.

Bahana Patria Gupta

Derasnya arus informasi membuat banjir visual juga tidak terelakkan. Di dunia maya kita bisa melihat foto apa pun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari keindahan Gunung Bromo di Jawa Timur hingga keindahan cahaya aurora borealis di langit Kutub Utara.

Siapa yang tidak ingin berada di suatu tempat eksotik lalu membungkainya ke dalam sebuah foto? Semua orang ingin menghasilkan karya yang baik,

dan itu bisa dimulai dari sekitar tempat kita berada. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memotret perjalanan. Bisa tentang wisata, bisa juga tentang aktivitas manusia.

Foto perjalanan, saat ini sedang digandrungi banyak pegiat fotografi. Tumbuhnya eksistensi pribadi dalam media sosial membuat foto perjalanan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.

Alam yang indah dari Sabang hingga Merauke membuat ne-

geri ini seolah tiada habisnya untuk dieksplorasi. Ragam budaya yang ada menantang siapa saja singgah ke satu daerah dan mengabadikannya.

Hal biasa yang dialami seseorang terkait foto adalah hasil akhirnya. Mereka biasanya takjub dengan karya yang dilihat, tapi sering kali lupa bahwa buah dari persiapan matang dan percobaan berkali-kali sang fotografer.

Persiapan memotret

Sejumlah hal perlu disiapkan secara matang sebelum pergi ke suatu lokasi pemotretan.

Hal pertama sebelum mengurus segala hal terkait proses perjalanan adalah riset. Riset menjadi penting untuk memberikan gambaran seperti medan yang akan ditemui. Jika terkait satu peristiwa budaya,

setidaknya terkait detail runtutan acara yang akan dilihat. Hal ini berpengaruh pada manajemen waktu di lokasi.

Riset ini terkait dengan apa yang perlu disiapkan. Hal itu, misalnya, apakah perlu membawa jas hujan? Apakah perlu membawa lensa tele? Berapa banyak bodi lensa yang harus disiapkan?

Riset ini bisa dilakukan dengan membaca buku atau mencari informasi melalui mesin pencari di Internet. Hasil riset itu perlu dicatat sebagai penanda foto apa saja yang nanti diperlukan.

Dari informasi kegiatan, bisa ditentukan bagian mana yang akan difoto. Sebagai contoh, dalam perayaan Yadnya Kasada Suku Tengger di Gunung Bromo, ada beberapa peristiwa penting yang dapat difoto dalam perayaan penghormatan

kepada leluhur yang dilaksanakan setahun sekali itu. Hal itu adalah pengambilan air suci di Goa Wigodaren, penasbihan dukun, dan pelarungan sesaji ke kawah oleh warga Tengger.

Jika baru pertama kali menuju tempat itu, berarti sebelumnya perlu mengetahui medan yang akan dilalui. Jalan menuju kawah yang dipenuhi tanjakan akan menentukan alat apa saja yang perlu dibawa dan bagaimana membawanya. Menjadi penting menentukan tas yang cocok dengan alat yang dibawa.

Hal lain yang perlu disiapkan adalah kemampuan berkomunikasi. Ini karena di lokasi pemotretan akan bertemu dengan orang-orang lokal, dan bertanya langsung kepada narasumber yang

tepat untuk memperdalam pengantar foto yang dibuat.

Pastikan semua kebutuhan foto yang telah dicatat tersebut dapat terpenuhi, dan saat memotret usahakan selalu melakukan pendekatan yang berbeda dari foto-foto yang dihasilkan fotografer sebelumnya. Selain sebagai pembeda, hal itu juga bisa menciptakan gaya foto tersendiri. Selain sebagai portofolio pribadi, foto itu juga bisa dijual di sejumlah laman jual beli foto yang kini banyak tersedia di internet.

Akhirnya, lebih baik sibuk di awal daripada sibuk saat berada di lokasi pemotretan. Sibuk di awal dapat membuat semua kebutuhan tercukupi, sementara sibuk di akhir akan menyebabkan kesesakan atau malah tidak jadi melakukan pemotretan.

OTOMOTIF

- MOBIL DICARI**
A-A abad21 *Akan Beli Mobil* Tahun 1997-2020 Hub: Mas Tio : 0812. 890. 7676 / 0877. 8186. 1225. Tangerang
- MOBIL DIJUAL**
- LAIN-LAIN**
Cherokee 4.0 LTD 95 Simpanan 61R Tgn 1, Antik Airbag Full Standar IG: @dashautomobil; 081233518680
- AUDI**
Q7 4.2 10/11 w. Hitam, Full Body Kit Q5 2.0 Turbo 11/12 Putih Full Option Hp 08.7878.555255 - 0811.970214
- MERCEDES**
C-200 Avantgarde 2010 Silver Km 46rb antik simpanan TDP.49jt/6,3jt @OTO568.COM # 081.380.568.888
- C200CGI 11 simpanan km23 spt baru** CLS63AMG13 F.Opt F.Ori Hitam TG1 SLK230K amg04(17R)081233518680
- E250 Avantgarde 14/15 Putih Mutiara** Full Option dari baru, Km 50rb Antik Hub 08.7878.555255 - 0811.970214
- GLA 200 AMG th 2015 Hitam Km 4500** 40rb Full Option, seperti baru antik hp 08.7878.555255 - 0811.970214
- S400L A/T th 2016 Hitam Km 4500** Jln Tanah Abang II no 66 ph 34835051-08128775687 Libur buka
- BMW**
X5 Diesel '17 hitam met, orisinil cat 100%, km low 19rb. Tgn 1 dari baru. Jrg Ada BU:819jt.0817806684 jakbar
- HONDA**
All Promo Spesial awal tahun semua type Honda Ready stock Dp ringan kredit s/d 6 tahun Honda Permata Serpong 021-29000123
- All Promo Spesial awal tahun semua** type Honda Ready stock Dp ringan kredit s/d 6 tahun Honda Permata Hijau 021-5332566
- MAZDA**
CX7 th 2011 htm plat B full ori,msn, body mls, hrg Rp.150jt Jl Kawi no 1/ B2 Pjayakarta Jakpus 08179101020
- TOYOTA**
Alphard 52.Acc 2011 + Q3.5cc 2012 Hitam TDP.7/7,6jt + 47/7,9jt Mulus2 @OTO568.COM # 081.380.568.888
- LC VX100 LTD'00 Simpanan Km 97** Antik No.Pol:P-1-N, Full.Option 599 IG: @dashautomobil; 0812-33518680
- Lcruiser VX200 ATPM Full Spec 2014** Hitam 5 camera cool box 2 TV KM 45 rbu ors cat prima skl 085105111732

PROPERTI

- Jln Jaha Simatupang 1050 m**, masuk smg Trakindo, SHM, 21 kmr cocok wisma instansi.2.Pndok Labu Garden Shm 600 m pool 3.Jl.Gaharu 3, rumah br HM,400m,4.JlPurnama HM 400m. Hitss Property 0811181065
- Keb Baru: Tmn Brawijaya 943/505**, Birah II 341/250 SHM cck utk office 08119590420-087885069711
- Mrh, Jgkrsa Lt 1694/500, 9KT 5KM** kmr kos 18pntu,lok strgs,hook*Agus RWComm 081280012384/29185234
- Pd Indah***Kencana Indah, Lt 750** /500m SHM, Prime Loc. dekat Golf. Full Cepat Murah. hub 0816780788
- Pondok Indah ***** Jual Cepat** Lt.300/ltb.250 ** 2Lt ** harga NJOP 9,4M ***** 082 1155 74 886 *****
- JAKARTA UTARA**
Di jual rumah tua 280-400 Sunter Jalan 3 mobil Harga NJOP Apau 08129778799 Goldland 65308989
- Dijual Cepat Bagus Rumah 3,5 lantai** Full Furnish Kelapa Gading Cenkir Timur 9x18 Lb 480m. 0811837166
- RUMAH DIKONTRAKKAN**
Jl Banyumas 21, Menteng, Jak Pus. Lt 732/Lb 750. KT+2, KM4+2.Garasi 4mbl. Carport 2. Spool :0816-292929
- RUANG USAHA**
Agung Perkasa 9 Blok K Sunter Depan Carefour Gudang 40x66=2640m². 2Kav.Toko.0817862805
- Dijual murah Gudang Sunter dkt** McDonald. Lt.2700, Lb.2268, posisi msh tersewa smp Nop. 2022. Hub:08159858525
- Dijual Pakrib Cibinong Lt. 18.000/ LB.** 10.000 KM 40,5 masuk 100m Jl.Aspal Tembus Depok. Harga 68M-Nego sampai Jadi. Harus Terjual. Hub: 0815-991-9999
- Hrs Terjual Gudang di Sunter JakUt**, Lt: 1105m/ Lb: 1400m2. PBB 34M, Jual 29M Nego sampai jadi. Hubungi 0815-991-9999
- Ruko Golden Plz Ftmwati 2 Gandeng** 8,5M. 1 Ruko 4,3M. Plaza 3 Pondok Indah 4,6M.Grand Wijaya Center 2 Ruko 10,5M Melawal Ry 10,5M.IDP Prop/Sri 750-7504, 0813-11185329
- JAKARTA BARAT**
Kebon Jeruk, Komp Perumahan, LT. 1100m, SHM, cocok rumah tinggal / Cluster, Bentuk Kontak. 0818997176
- JAKARTA PUSAT**
Dijual Tanah Jl Letjen Suprpto No.19 Sumurbatu Jakpus. Luas tnh 194m2. hub Bp Ery 0812-8090-9220
- JAKARTA SELATAN**
Dijual tanah Luas 340 mtr, SHM. Jl.Cilandak Dalam IV No.48 rt8/1 Cilandak. 0851-0091-5474
- Jl.Radio, Kby Baru***, Lt 441 m2 & *Jl.Durian,Jagakarsa,* Lt 550 m2, cck Rmh tinggal,tenang 0817.385158
- Ruko 2lt, Citra Raya Cikupa**, full furnished, siap pakai, LT/LB : 87/45m² akses mudah. Hub : 082114120593
- Ruko 3 lantai Dewi Sartika Bogor**, LT/LB : 48/144m², dekat jalan raya, bagus, murah. Hub : 082114120593
- Unit Kantor Sahid Sudirman Center** 1Floor L2900M2 Hrg 33jt/m2 (harga *sudah* termasuk PPN & BPHTB Pembeli). Hub 0818-888-011
- DISEWAKAN**
Gudang 360m2&450m2,Kws Ind manis,Jl.Manis Kiri no.88 bitung - Tangerang Hub:085211723456788
- TANAH DIJUAL**
Cikande Serang jln utama jual cpt/ murah 30% dari hrg pasaran Tnh industri luas 35ha. Sertifikat SHM. hrg 550/m. Hp. 081905678234
- Cikupa Tangerang J.Cpt/murah 30% dr** hrg pasaran Tnh industri luas 13 ha (bs 40ha)1.3jt/m 0812123456788
- Ciseeng, Bgr,Tanah ktk, pgr jln prop** SHM, tersewa 80jt/thn, 1600m², 1,6jt/m; Hub: 0822 1060 1177
- Karawang Tanah 30Ha Jatisari pnggr** Jl.Pantura arah Patimban Subang pelabuhan baru.Sumano 0817862805
- Ps Kms,Tgrg, Tanah ktk pgr jln,shm** 3400m², sdg disewa 5th, 50jt/th, 1,5jt/m nego. Hp. 0822 1060 1177
- Ray White Intercon (021) 587 1212** tnh13.5ha Ciawi,mnj Tapos jl.Karakal murah,View bgs. Lilian 08111957718
- JAKARTA BARAT**
Kebon Jeruk, Komp Perumahan, LT. 1100m, SHM, cocok rumah tinggal / Cluster, Bentuk Kontak. 0818997176
- JAKARTA PUSAT**
Dijual Tanah Jl Letjen Suprpto No.19 Sumurbatu Jakpus. Luas tnh 194m2. hub Bp Ery 0812-8090-9220
- JAKARTA SELATAN**
Dijual tanah Luas 340 mtr, SHM. Jl.Cilandak Dalam IV No.48 rt8/1 Cilandak. 0851-0091-5474
- Jl.Radio, Kby Baru***, Lt 441 m2 & *Jl.Durian,Jagakarsa,* Lt 550 m2, cck Rmh tinggal,tenang 0817.385158
- JAKARTA TIMUR**
Tnh Kosong Bilg Arion Plaza Rwmangun LT: 1543m2, SHM, Bentuk L, hrg 17jt/m. 0815-991-9999 Nego Sampai Jadi, Harus Terjual
- JAWA TENGAH & DIY**
Jual murah kebun MusangKing, di Yogya, ada 25 pohon. SHM 2015. Telp/WA: 085100600996
- ALAT KESEHATAN**
Produk lab PCR utk Fasyankes : alat & reagen PCR, ekstraksi, VTM, filter tips, Rapid tes Antigen & antibodi, harga murah, Hub : 081289948274, www.setiamedika.com
- HOTEL/PENGINAPAN**
Hotel Fas AC, TV, Air Panas mulai 180ribuan Bogor 0251-8338899, 0251-8378658, Jakarta 021-3906800 Belakang Plaza Indonesia, Puncak 08176868028.www.hotelpapaho.com
- MESIN & ALAT BERAT**
Dijual Murah Genset Open Mitsubishi 20 M, 1,5jt/m nego. Hp. 0816-123-880
- MUSIK**
Jual Cpt 1 Piano Yamaha LU80CPE Rp.18 jt suara baik Jl.Mandala Sltm X/6 Tomang Hp:087.886.510.482
- PEMBORONG/BIRO TEKNIK**
Terima Bangun rumah/ ruko / kos? an/ gudang + IMB hub Jk -kontraktor 087885689396 Johnny
- PERHIASAN**
Beli Arloji Rolex & Berlian dll. King Arloji 0817115416 jl.Kyai Maja no.1B dpn psrMayestik trm jual sementara
- SERVICE PREPARASI**
AC.AC.Cool, Frezer, K.Gas, Kulkas M.Cuci, Slntr, P.Air *Teknik Cool* 085100481084 - 085101457718

RAGAM

- TELEPON**
Jual+Serv.Telp.PanasonicHT824(308) Rp3.250rb,N5300(618)rp6,8jt,garans i 1th.Hub:021-630 5050/6060.
- DAERAH-DAERAH**
DENPASAR
Jual Villa Mewah 5 KT, 5 KM, POOL, Exotic View, Samping GWK, Ungasan Kuta, WA 087839410497.
- Rumah Lux Baru, Lok Elite Jimbaran** Ls 400/240, IMB/SHM, 3kt, Kitchen, Kolam, Full Furnish, Murah, Harga Covid 3,4M. 0818-771-962
- YOGYAKARTA**
Jual Tanah Hak Milik 309m2, Lokasi Terbaik & Nyaman Tengah Kota di Jl Mawar, Baciro, WA 087839410497.
- Jual Tnah Hak Milik 140m2 ditengah** kota, Baciro, Strategis cck u/kantor/ usaha/R tinggal, WA 087839410497
- PERLUANG USAHA**
Dengan Modal Rp100jt,Profit ±Rp1M /Tahun**Usaha Bagus dan Aman** *Diawasi Bersama* 0812 1240 0800
- Dicari principal / pengelola kantor** untuk agent properti Jakpus yang sudah berjalannya. Hub 085780606768
- Dijual Usaha Aktif Penginapan + Food Court**, Pasar Minggu. 20 M. 088212781978
- KEHILANGAN**
BPBK R2 Kawasaki ZX250F 2020, Hitam, F-2958-FEI An. Sukardi ttd. Benedictus
- Hilang BPBK Mazda2 No.J06877487** Nopol B135VCS, NR: MM6DE10YD022301, a/n Trini Gunarti. Hub: 087873328332
- Hilang BPBK Sepeda Motor Honda** Warna Putih, Th. 2013, No.Pol : F 2354 ZL, an. Andy Rachmat
- Hilang BPBK Toyota Avanza Warna** Hitam Metalik. Th.2011 No.Pol : F 88 Y, an. Heri Kurnia, SE
- PINJAMAN DANA TUNAI**
Butuh dana tunai jaminan SHGB, SHM,BPKB.Kami solusinya.BPR CAR (021)5385170-75 proses cpat&aman
- JAWA BARAT**
Hilang BPBK M14020832 Nopol : D-1591-AEQ An. Abdullah Mustappa Ttd. Abdullah Mustappa
- Hilang BPBK No:49943876 Nopol :** D-1564-U An.H.Hilmi Aminudin Ttd. Andri Firniandi
- Hilang BPBK No:A2067038H Nopol :** D-1282-XE An.U Rustandi Ttd.Dede Samiah
- Hilang BPBK No:M08395827 No.Pol:** D-1348-UAB a/n:Abdul Azis W. Ttd: Abdul Azis Wiriadidjaja,Dr
- JAWA TENGAH & DIY**
KEHILANGAN
Hilang BPBK H-1726-KN an. Ronawati. Brumbung Rt6/2 Mranggen Demak
- Hg BPBK dan STNK H-1636-LP an** Mulyono. Kp Dempel Lor RT 04/023, Pedurangan, Semarang
- Hg BPBK H-1612-TW an Sudiarto.** Kedungpane RT 02/05, Mijen, Semarang
- Hg BPBK H-6612-TQ an. Moh Ali** Imron. Mangunharjo RT5/3 Tugu Semarang
- Hg STNK H-4013-NA an. Ferri** Oktardin. Jl Purwosari Perbalan 3-F No.12 Rt4/5 Semarang
- Hg STNK H-5065-LF an. Surya** Bagus Prasetyan. Batan Miroti I/496-P RT2/2 Semarang
- KARIER**
- LOWONGAN**
ADM & KEUANGAN
Bth Sgr : Bagian ACC & Fin/Auditor Syrt:Wanita Singel 25-30th,Min.S1 Pnglrm 5thn,Bisa Pajak Dom.Bekasi, Email: job_accounting20@yahoo.com
- MARKETING & SALES**
Butuh Marketing bisa komputer, media online & website.pengalaman 1thn. Hub rika 0852-1888-7870

PROPERTI

- APARTEMEN**
- DIJUAL**
Apart Pearl Garden Semanggi CBD. 2Br+1. Jl.Gatot Subroto sbh Hotel Crown Plaza.0817862805
- Apart The Mansion Golf Kemayoran** Bougenville Tower Gloria, Ls.49m², 2Br.Andy 0817862805
- Apt ParkRoyale Gatsu,Penthouse FI** 147m², 3+1, 200m dr Semanggi,loks kls 1 Hrg Spc Hub:0816 932 800
- RUMAH DIJUAL**
Area Mulawarman, Kby Baru, hit tnh luas T/ ± 800m², SHM, Lok tenang RW Barito 7399607- 0858 80904228
- Kbyrn-Baru Jln.Pete *Open House*** Lt 219/200m, SHM, Jual Cepat. Murah jalan lebar hub 0816780788
- JAKARTA SELATAN**
Area Mulawarman, Kby Baru, hit tnh luas T/ ± 800m², SHM, Lok tenang RW Barito 7399607- 0858 80904228
- Kbyrn-Baru Jln.Pete *Open House*** Lt 219/200m, SHM, Jual Cepat. Murah jalan lebar hub 0816780788

NAMA & PERISTIWA

SOFJAN WANANDI

Susah "Pensiun"

Memasuki usia 80 tahun, pengusaha senior Sofjan Wanandi merasa tak pernah bisa sepenuhnya menuruti permintaan istrinya, Riantini Wanandi, untuk "pensiun". Selama diberi kesehatan, Sofjan takkan pernah mau berhenti memberi tenaga dan pemikirannya untuk memperbaiki situasi bangsa dan negara ini.

"Saya begitu cinta Indonesia. Hal yang terpenting memasuki usia 80 tahun, saya mencoba merefleksikan diri, apa yang selama ini sudah saya kerjakan dan berikan untuk bangsa ini?"

Kata Sofjan, sesuai menyelenggarakan perayaan misa syukur di Kapel Kanisius, Menteng, Jakarta, Minggu (7/3/2021), yang digelar secara virtual melalui media YouTube.

Pria kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, 3 Maret 1941, ini harus mengurungkan niat menggelar ulang tahun meriah bersama para kerabat dan sahabatnya akibat pandemi Covid-19. Biasanya, kata Sofjan, setiap usianya bertambah 10 tahun, pesta ulang tahun dirayakan besar-besaran sebagai ungkapan berbagai syukur.

Namun, kemajuan teknologi virtual diyakini dapat menggantikan pesta ulang tahun secara fisik. Semua ini harus dilalui karena pandemi belum juga usai.

Sofjan sempat menceritakan, ketika memasuki usia 70 tahun, sebuah buku kiprah dirinya yang diberi judul *Aktivistis Sejati* garapan wartawan Kompas, Abun Sunda (alm), menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Kini, Sofjan tetap ingin memberi semangat kepada generasi muda untuk tidak hanya bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. (OSA)



KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Surip

Menjaga Nyala Irama "Pat Im"

Surip (29) setia melestarikan *pat im*, musik khas China, meskipun ia bukan keturunan Tionghoa. Warga Cirebon, Jawa Barat, ini tak peduli cibiran orang dan beban ekonomi yang mengimpit hidupnya. Baginya, keberadaan kesenian berusia lebih dari seabad itu penting. Iramanya mulia, mengalunkan senandung keberagaman.

Abdullah Fikri Ashri

Dari pelosok Desa Dukuwidara, Kecamatan Pabedian, Cirebon, Surip dan empat anggota grupnya menikmati musik *pat im* yang mereka mainkan, Senin (8/2/2021). Terdengar tiupan terompet. Ada juga senar *kong ayan* dan *teh yan* (mirip rebab). Lantunan iramanya kian ramai diiringi tabuhan gambang dan gendang.

Seharusnya latihan itu untuk persiapan pentas saat Imlek 2572 di Wihara Dewi Welas Asih, Cirebon. Hampir setiap tahun, mereka duduk melantai beralaskan tikar di wihara tersebut sambil membawakan musik *pat im* ditemani asap dupa pada malam Imlek. Lalu, 15 hari kemudian, mereka kembali ikut meramaikan perayaan Cap Go Meh bersama.

Akan tetapi, pandemi Covid-19 membayarkan semuanya. *Pat im*

harus absen pada tahun ini. Untuk sementara, tiada musik khas yang mengiringi jemaah beribadah. "Kami latihan untuk menghormati Imlek," kata pimpinan grup Pat Im Langgeng itu.

Surip tidak menyesal batal tampil. Toh, sejak awal, dia tidak mengejar rupiah dari musik yang juga dikenal sebagai cokerik itu. Bertahun-tahun pentas di Wihara Dewi Welas Asih, sekitar 38 kilometer dari rumahnya, tak ada patokan tarif. "Bayar seikhlasnya. Ini sudah perjanjian dengan buyut saya. Alhamdulillah, selalu dapat rezeki lumayan," ungkapnya.

Lagi pula, pemasukan utama Surip bukan dari meniuip terompet di grupnya yang tampil setidaknya tiga kali dalam setahun itu. Pria lulusan sekolah dasar ini lebih banyak meraup uang jika meniuip suling di grup tarling (gi-



KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

tar-suling) dangdut. Sayangnya, penghasilan dari tarling sebesar Rp 150.000-Rp 400.000 sekali pentas itu lenyap juga karena pandemi Covid-19. Tahun lalu, empat pentas tarlingnya dibubarkan. Padahal, jika musim hajatan, ia bisa tampil nyaris sebulan penuh.

Hasil dari manggung itu ditabung untuk mengganti alat musiknya yang menua dan berkarat. Tetesan air dari atap rumahnya yang bocor mempercepat alat-alat itu rusak. Ia gamang membeli alat baru. Selain harga perlengkapan baru yang mencapai jutaan rupiah, rumahnya seluas 50 meter persegi juga sudah sesak diisi sembilan orang.

Pada, sesuai artinya dalam bahasa China, *pat im* adalah alat musik yang dimainkan delapan atau sembilan orang. Namun, minatnya regenerasi dan kesulitan membeli alat baru membuat anggota kelompok Surip hanya enam orang.

"Saya siap mengajarkan cokerik ini kepada siapa pun. Pokoknya, musik ini jangan sampai punah. Itu pesan buyut saya," kata Surip yang lebih memilih pentas *pat im* jika jadinya bantrol dengan pentas tarling dangdut.

Dari buyut

Buyut yang ia maksud ialah Wastar Rucita. Wastar merupa-

kan anak Warcita, yang memulai kesenian itu sekitar pertengahan abad ke-19. Warcita mengenal tradisi ini dari Babah Heng Liam, orang Tionghoa asal Semarang yang menetap di Cirebon.

Biasanya, *pat im* hadir dalam pentas potehi, wayang tradisional Tionghoa. Belakangan, *pat im* berdiri sendiri, bahkan termasuk untuk mengamen di jalanan. Cokerik berkembang saat masa Wastar. Kala itu, ada empat grup serupa yang para anggotanya masih satu darah. Satu grup berisi enam sampai delapan orang. Tidak ada satu pun keturunan Tionghoa. Semuanya juga beragama Islam.

Surip masih ingat, ia mencururi waktu menggesek senar *teh yan* atau menabuh gambang. Ia belajar dengan melihat grup buyutnya bersama kakeknya latihan. Saking tertariknya dengan musik China itu, ia merengek ikut buyutnya pentas. Namun, dia dilarang. Hingga suatu hari, ketika usianya masih 8 tahun, Surip mulai memainkan *teh yan*.

Buyutnya kaget. Surip ternyata terampil. Ia pun diajak tampil. "Usia *segitu* saya sudah manggung. Saya merasa ini sudah titisan. Seolah-olah hati saya langsung bicara," tutur Surip yang mengaku kerap izin tidak masuk sekolah untuk tur ke sejumlah kelenteng di Cirebon, Indramayu,

Slawi, dan Tegal.

Awal tahun 2000, Wastar berpulang di usia hampir 100 tahun. Tidak lama kemudian, kakek Surip, Taryo, juga pergi untuk selamanya. Surip lalu melanggengkan grup Pat Im Langgeng bersama ayahnya, Akmad (65); adiknya, Sekhudin (21); dan keponakannya, Wanto (24); serta Ki Amad (70-an). "Hanya kami yang meneruskan musik *pat im* ini di Cirebon," ucapnya.

Surip mengaku beberapa kali merasa jenuh ketika tak ada panggung pentas. *Pat im* kalah tenar dengan kesenian lain, seperti tari topeng yang acap kali tampil dalam acara pemerintahan.

Bahkan, tidak sedikit orang-orang yang mencibirnya. "Orang Jawa, kok, main musik China? Kamu itu agamanya apa? Kok, masuk kelenteng," kata Surip menirukan ucapan orang lain kepadanya.

Mendengar itu, ia hanya terseenyum. Baginya, kelompoknya bukan beribadah di kelenteng, tetapi menghormati budaya Tionghoa yang merayakan Imlek.

Ketika konflik pecah di Losari, kampungnya, pada akhir masa Orde Baru, pengurus kelenteng di Tegal meminta grup Pat Im Langgeng berunding sementara. Mereka diberi tempat menginap dan makanan. Buyut dan kakeknya juga acap kali berobat gratis ke Pak Sutan yang merupakan seorang dokter di kelenteng di Tegal.

Kini, Surip tetap berhubungan baik dengan pengurus kelenteng. "Terus terang, saya kagum dengan Pak Surip dan grupnya yang melestarikan kesenian ini. Ini modal menjaga keberagaman di Cirebon," ucap Sungkono (78), Sekretaris Wihara Dewi Welas Asih.

Surip dan kelompok Pat Im Langgeng bisa jadi sudah jauh melampaui batas-batas kehidupan di negeri ini. Tidak hanya ikut melestarikan kesenian khas China, mereka juga ikut menyemai indahinya buah keberagaman

Surip

Lahir: Cirebon, 11 Februari 1992
Pendidikan: SDN Dukuwidara (Julus 2004)
Profesi: Pimpinan Grup Musik Pat Im Langgeng

PRIME INSPIRING YOU

RUBRIK INI DI SAJIKAN OLEH KEMENTERIAN PERTAHANAN RI BEKERJA SAMA DENGAN TIM KOMPAS

Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Kembangkan Alutsista dan Teknologi Bidang Pertahanan

Dalam upaya meningkatkan sistem pertahanan nasional dan mewujudkan kemandirian produksi senjata, Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah mengembangkan beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) dan sejumlah teknologi di bidang pertahanan.

Pada beberapa kesempatan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kemhan berperan melaksanakan tugas pembangunan kekuatan. Berbagai peralatan tempur maupun alutsista yang mumpuni pun diperlukan untuk mengemban tugas tersebut.

Kemampuan produksi alutsista secara mandiri, kata Menhan, perlu ditingkatkan agar kelak Indonesia tidak bergantung pada negara lain. Selain itu, diharapkan ke depannya kekuatan Indonesia juga cukup diperhitungkan, baik di level regional maupun internasional.

Terkait kemandirian persenjataan, tahun ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan) akan fokus membangun beberapa prototipe alat peralatan pertahanan. Dengan demikian, diharapkan pada 2024 Indonesia mampu memproduksi senjata yang berkualitas, setara dengan produk luar negeri.

"Ini merupakan langkah strategis bagi sistem pertahanan Indonesia, terlebih dalam hal kemandirian," ujar Kepala Balitbang Kemhan Marsekal Muda TNI Julxi

Tambayong dalam presentasi mengenai prototipe alutsista TNI di kantor Balitbang Kemhan, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Lebih lanjut, soal kemandirian Alutsista, Sekretaris Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani menyampaikan bahwa pada 2021 akan menjadi momen bagi Balitbang Kemhan untuk fokus membangun prototipe alutsista. Dengan begitu, diharapkan, pada 2024, Indonesia akan mampu memproduksi senjata secara mandiri yang berkualitas, bahkan bisa setara dengan produk alutsista dari luar negeri.

Pengembangan alutsista

Balitbang Kemhan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai perusahaan, baik BUMN maupun BUMS, telah berhasil membuat beberapa prototipe alutsista untuk memaksimalkan sistem pertahanan nasional. Di antaranya, radar pasif, kendaraan peluncur roket R-HAN 122B, dan Mobile Command Control Vehicle (MCCV).

Radar pasif berfungsi mendeteksi target dengan memanfaatkan gelombang elektro magnetik yang dipancarkan oleh target itu sendiri dengan metode *passive location*.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Alpalhan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rosidin MSi (Han) MSc mengatakan, kelebihan radar pasif ini antara lain adalah mampu mendeteksi keberadaan "pesawat siluman" yang tidak dapat dideteksi oleh radar aktif.

Pengembangan radar pasif ini merupakan bagian dari program kebutuhan radar nasional dan rencana kebutuhan radar pasif untuk Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Rencananya, radar pasif ini dapat digunakan untuk mengisi celah (*gap filler*) yang tidak tercakup oleh radar aktif di area perbatasan NKRI.

Prototipe lain yang berhasil dikembangkan adalah kendaraan peluncur roket R-HAN 122B. Roket R-HAN 122B direncanakan dapat memperkuat Kendaraan Peluncur Roket 122 MM RM70 GRAD 40 buatan Cekooslovakia yang saat ini digunakan TNI AL yaitu Satuan Marinir.

Rosidin menambahkan, kendaraan peluncur roket R-HAN 122B menggunakan 40 laras dan daya luncurnya sejauh 30 kilometer, lebih unggul dibandingkan kendaraan peluncur roket dari Cekooslovakia yang hanya memiliki jarak luncur 18 kilometer.

Alutsista ketiga yang berhasil dikembangkan adalah Mobile Command Control Vehicle (MCCV), kendaraan berteknologi modern dan multifungsi. MCCV dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi dan komando pengendalian terintegrasi antara komando operasi dengan prajurit atau personel di lapangan, baik di medan pertempuran maupun perkotaan.

Rosidin menjelaskan, MCCV adalah terobosan di dalam dunia militer. Sebab, saat ini, TNI belum membuat kendaraan khusus untuk sarana pusat komando dan pengendalian operasi yang berperan sebagai Mobile Ground Control Station (MGCS).



FOTO-FOTO DOK KOMPAS.COM

MCCV juga telah didukung dengan perangkat *drone* yang pengendaliannya bisa dilakukan secara langsung dari kendaraan tersebut.

Sebagai proteksi, MCCV juga dilengkapi dengan perlindungan balistik, sensor antitermal, *radio jammer*, dan *multispectral camouflage net*. Untuk mobilitas, MCCV menggunakan roda berjenis *run flat type* yang memiliki kemampuan menahan tembakan proyektil.

Dengan ketangguhan tersebut, MCCV bisa pula digunakan untuk segala jenis operasi. Misalnya, pengamanan saat demonstrasi, manajemen penanggulangan bencana alam, posko taktis (*poskotis*) bagi kegiatan penelitian, atau *special force operations* lain.

Teknologi bidang pertahanan

Balitbang Kemhan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pertahanan (Puslitbang Iptekhan) juga tengah mengembangkan beberapa teknologi di bidang pertahanan.

Kepala Puslitbang Iptekhan Balitbang Kemhan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Oki Yanuar ST mengatakan, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja TNI. Beberapa teknologi yang dikembangkan diantaranya adalah Combat Swimmer Vehicle (CSV), pembangkit daya berbasis torium, dan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA).

CSV atau kendaraan khusus penyelam

berfungsi meningkatkan kemampuan penyelam pasukan katak TNI AL dalam melakukan infiltrasi dan pengawasan ke teritorial musuh. Baterai yang menjadi sumber penggerak ini mampu bertahan selama 4 jam. Kendaraan ini memiliki kecepatan sampai 5 knot saat dikendarai di permukaan laut dan 3 knot ketika melakukan penyelaman.

Teknologi lainnya yang dikembangkan adalah pembangkit daya berbasis torium untuk bidang perbekalan, komunikasi, dan elektronik. Torium merupakan sumber energi baru terbarukan (EBT) dari senyawa kimia golongan radiokatif alam, seperti halnya uranium.

Karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, pemanfaatan torium dinilai akan lebih dapat menjamin ketahanan energi nasional dan kepentingan pertahanan pada masa depan. Ke depannya, Puslitbang Iptekhan berencana mengembangkan reaktor garam cair.

Kemhan juga sedang mengembangkan Pesawat Terbang tanpa Awak (PTTA) atau pesawat siluman jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE). Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan NKRI.

Pengembangan alutsista serta teknologi sistem pertahanan tersebut adalah langkah yang signifikan. Kita berharap hal ini dapat memberi kontribusi besar dalam bidang pertahanan RI. [NOV]





Problematika Anak di Tengah Pandemi Covid-19

Yayasan sosial kemanusiaan Wahana Visi Indonesia melakukan penelitian dampak aspek kehidupan anak akibat pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan pada Mei 2020 terhadap 900 rumah tangga di 251 desa di sembilan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jatim, Bengkulu, Sumut, Kalbar, Sulteng, Papua, Maluku Utara, dan NTT.

Permasalahan Psikososial*

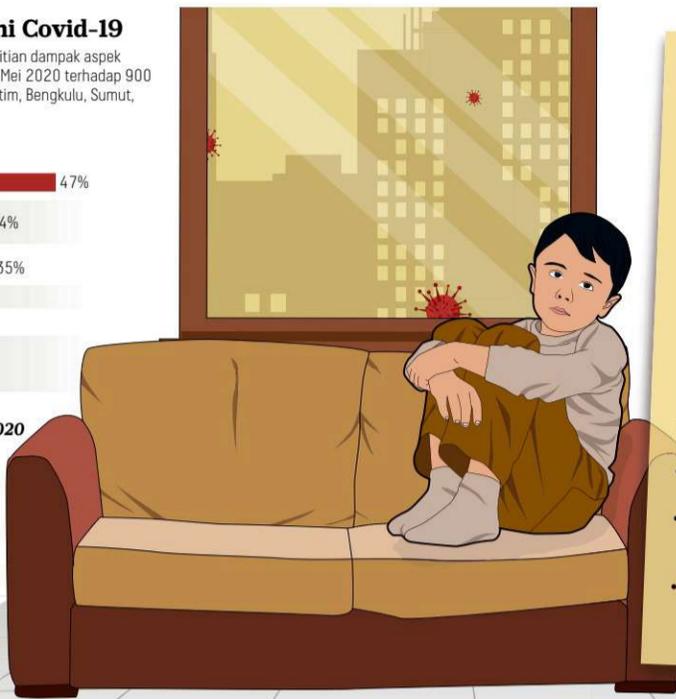


*Responden dapat menjawab lebih dari satu jawaban

Kasus Perlindungan Anak yang Ditangani KPAI Tahun 2020



Sumber: Kementerian Sosial, Wahana Visi Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dilipang Litbang Kompas/YGS.



Kebijakan Kementerian Sosial dan Rekomendasi dalam Menangani Anak Pekerja Migran

Internal Kementerian Sosial

- Mengoptimalkan program kesejahteraan sosial anak pada kantong-kantong pekerja migran.
- Melakukan pemberdayaan ekonomi dan penyuluhan hak-hak anak.
- Mengatkan peran pengasuh melalui peningkatan kapasitas pengasuhan bagi anak-anak.
- Menyiapkan sistem dan panduan pengasuhan anak secara lengkap yang diimbangi pelatihan.

Eksternal Kementerian Sosial

- Pemerintah daerah melakukan upaya pelatihan terhadap pengasuh anak.
- BP2MI membuat kebijakan integrasi jaminan pengasuhan anak.
- Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlindungan anak mengembangkan pengasuhan anak berbasis komunitas.
- Kemenaker menyiapkan pengasuh profesional dan pengasuh alternatif berbayar yang bukan dari lingkungan keluarga.



BEBAN BERLIPAT ANAK PEKERJA MIGRAN DI TENGAH PANDEMI

Pandemi Covid-19 berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali anak. Risiko penularan, penurunan daya beli keluarga, hingga kekerasan anak membuat perlindungan anak pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan menyeluruh terhadap anak.

YOESAP BUDIANTO

Infeksi virus korona baru (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19 tak mengenal batasan usia. Semua kelompok umur memiliki peluang terpapar Covid-19. Hingga 4 Maret 2021, tercatat 1,36 juta kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, persentase kasus positif pada anak-anak remaja mencapai 12 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dari warga lansia (10,7 persen).

Data tersebut menunjukkan rentannya anak terhadap penularan Covid-19. Faktor risiko terinfeksi virus korona baru terhadap anak tidak terbatas pada kelainan individu, tetapi peran orang terdekat atau keluarga yang tinggal bersamanya, apakah mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Kegiatan di luar ruangan tentu berpotensi besar menyebabkan infeksi terhadap keluarga di rumah.

Selain rentan tertular, dampak langsung situasi pandemi menyebar ke berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari akses pendidikan, jaminan kesehatan, perlindungan anak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar akan makanan bergizi. Daya adaptasi anak dituntut lebih kuat saat ini mengingat adanya ancaman gangguan psikologi karena keterbatasan kegiatan dan permasalahan lain di rumah.

Kerentanan kesehatan anak-anak di masa pandemi Covid-19 terekam dalam penelitian oleh Wahana Visi Indonesia di 251 desa yang tersebar di sembilan provinsi di Indonesia. Survei dilakukan pada 900 rumah tangga dan terdiri atas 943 anak. Penelitian ini turut merekam situasi di wilayah pekerja migran, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kemampuan pemenuhan kecukupan gizi dan konsumsi makanan menjadi tantangan separuh rumah tangga yang ditemui. Setidaknya 53 persen keluarga tidak mampu menyediakan makanan bergizi atau empat

kelompok sumber makanan gizi seimbang.

Lebih miris lagi, 97 persen bayi dua tahun tidak terpenuhi kebutuhan minuman dan makanannya berdasarkan frekuensi dan variasi makanan. Kondisi tersebut adalah imbas dari penurunan pendapatan sehingga rumah tangga mengurangi kualitas dan kuantitas makanan.

Keterbatasan akses makanan bergizi mengancam kesehatan anak-anak, seperti malnutrisi akut dan anak balita pendek (*stunting*). Usia anak paling terbatas akses makanannya adalah 6-9 bulan. Kondisi lebih parah tentu dialami oleh anak pekerja migran yang secara ekonomi terbatas.

Secara ekonomi, sepertiga proporsi pengasuh anak pekerja migran tidak memiliki pekerjaan tetap. Sementara pengasuh yang bekerja, jenis pekerjaannya dominan sektor informal, seperti petani (40,8 persen), buruh (26,2 persen), dan pedagang (11,5 persen).

Jaminan kesehatan keluarga, khususnya anak, makin rentan dengan frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan yang turun drastis hingga 30 persen. Sementara rumah tangga yang tidak mengakses layanan kesehatan ibu dan anak mencapai 54 persen.

Situasi tersebut diperparah dengan fakta bahwa 1 dari 5 rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan. Petugas posyandu juga tidak datang ke desa-desa di masa pandemi Covid-19, kecuali dihubungi terlebih dahulu oleh warga.

Disrupsi pandemi memaksa keluarga lalai terhadap kesehatan dasar anak, seperti imunisasi dasar lengkap. Apabila tidak diantisipasi, rendahnya cakupan imunisasi mampu menimbulkan wabah penyakit, seperti campak, difteri, atau tuberkulosis.

Kementerian Kesehatan dan Badan Persekutuan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) mencatat 84 persen layanan imu-

nisasi anak terganggu selama pandemi. Padahal, dalam situasi normal cakupan imunisasi dasar lengkap anak hanya 58 persen di Indonesia.

Putus sekolah

Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak signifikan terhadap meningkatnya jumlah anak putus sekolah. Catatan dari Unicef menunjukkan bahwa 938 anak atau proporsi 1 persen dari anak berusia 7-18 tahun mengalami putus sekolah selama pandemi, mayoritas karena keterbatasan ekonomi.

Tentu banyak faktor yang dapat menyebabkan anak berisiko putus sekolah, seperti lebih memilih bekerja untuk mendapat upah, membantu merawat adik, tidak ada pengawasan dari pihak sekolah, hingga orangtua yang memilih menghentikan pendidikan anaknya.

Salah satu faktor utama dari putusnya sekolah anak adalah faktor sosial-budaya yang merujuk pada persepsi keliru tentang pendidikan. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa pendidikan tidak terlalu penting.

Kesulitan ekonomi turut memaksa orangtua lebih memilih anak bekerja daripada sekolah. Kondisi tersebut tentu menguat di tengah tekanan pandemi saat ini. Kerentanan anak putus sekolah turut mengancam anak pekerja migran mengingat sebelum pandemi sudah ada anak pekerja migran yang tidak bersekolah.

Riset yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2018) menunjukkan, terdapat 25 persen anak pekerja migran yang ditemui dalam kondisi tak bersekolah.

Potret sulitnya akses pendidikan anak pekerja migran nyata terjadi di Indonesia. Apabila secara umum anak berisiko putus sekolah, maka anak pekerja migran memiliki risiko jauh lebih besar untuk berhenti atau sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah.

Selain akses kesehatan dan pendidikan yang semakin terbatas di tengah pandemi, perlindungan anak pekerja migran terhadap tindak kekerasan harus mendapat perhatian khusus. Banyak kasus kekerasan, penganiayaan, atau dipekerjakan secara paksa yang dialami anak-anak tersebut.

Seorang anak berusia 16 tahun dan tiga saudaranya di Nusa Tenggara Timur mendapat perlakuan kasar oleh pamannya setelah ditinggal orangtuanya bekerja di Malaysia. Mereka juga dipekerjakan di ladang dan jarang diberi makan.

Dua bersaudara di Lampung berusia 6 tahun dan 10 tahun diracun oleh ayahnya yang mencoba bunuh diri setelah ditinggal istrinya menjadi pekerja migran. Seorang anak usia 5 tahun bahkan mengalami pelecehan seksual oleh kakeknya setelah ditinggal oleh orangtuanya ke Taiwan.

Kasus-kasus tersebut adalah gambaran rentannya anak pekerja migran menjadi korban kekerasan oleh orang lain, bahkan keluarganya sendiri, yang terjadi sebelum pandemi Co-

vid-19. Kasus serupa mungkin terjadi dan dapat meningkat selama pandemi ini.

Perlindungan anak

Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2020. Dari laporan tersebut, pengaduan paling tinggi terjadi di kluster keluarga dan pengasuhan alternatif (24,9 persen).

Hasil serupa ditunjukkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana tercatat 7.190 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 7.868 jiwa. Korban paling banyak adalah kasus kekerasan seksual yang mencapai 4.540 anak.

Pandemi memicu banyaknya kekerasan di skala rumah tangga. Tekanan ekonomi yang kuat mampu menimbulkan gesekan di antara anggota keluarga dan berujung tindak kekerasan. Tantangan perlindungan anak pekerja migran menjadi lebih berat, karena dibutuhkan pengawasan ekstra, sebab bisa saja perlakuan kasar tersebut sudah berlangsung lama dan anak menjadi takut melapor.

Anak pekerja migran menjadi salah satu kelompok yang rentan saat ini, bahkan sebelum situasi pandemi Covid-19. Banyak dari mereka yang tumbuh tanpa orangtua sejak usia kurang dari satu tahun. Saat ditinggalkan oleh orangtuanya, kehidupan mereka bergantung pada pengasuhannya.

Nasib kurang baik banyak dialami oleh anak pekerja migran. Catatan Kementerian Sosial menyebutkan bahwa anak-anak tersebut rentan kurang gizi sehingga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan di usia emas. Bahkan, hak atas air susu ibu (ASI) turut tidak terpenuhi.

Di tengah situasi pandemi saat ini, anak pekerja migran tentu perlu mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan yang lebih layak. Sebagaimana anak-anak lainnya di seluruh Indonesia, mereka dihadapkan pada beberapa risiko besar, yaitu tertular Covid-19 karena minimnya pemahaman tentang pandemi, ancaman putus sekolah, dan kehilangan pekerjaan.

Karena itu, perlindungan anak pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan menyeluruh terhadap anak. Di masa vaksinasi Covid-19, anak-anak tersebut juga bukan merupakan kelompok prioritas penerima vaksin. Kondisi ini menjadi tantangan terbaru yang dihadapi anak-anak Indonesia yang bakal lebih lama beradaptasi dengan keberadaan Covid-19 di sekitarnya.

Untuk menjamin perlindungan bagi anak di masa pandemi, langkah konkret perlu diambil oleh pemerintah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dan akses kesehatan, serta memberikan perlindungan dari tindak kekerasan. Khusus bagi anak pekerja migran, kebijakan pendampingan perlu diberikan untuk memberikan motivasi meraih kehidupan yang lebih baik.

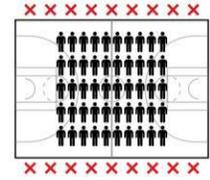
(LITBANG KOMPAS)

"Gelembung" Cisarua

Jumlah: Gelembung diisi total 474 orang. Terdiri dari panitia, kemudian pemain, ofisial, wasit, termasuk petugas pelayanan di kawasan



Pengaturan Keterisian



Kapasitas lapangan: Maksimal 50 orang saat bersamaan (tidak ada tribune penonton)



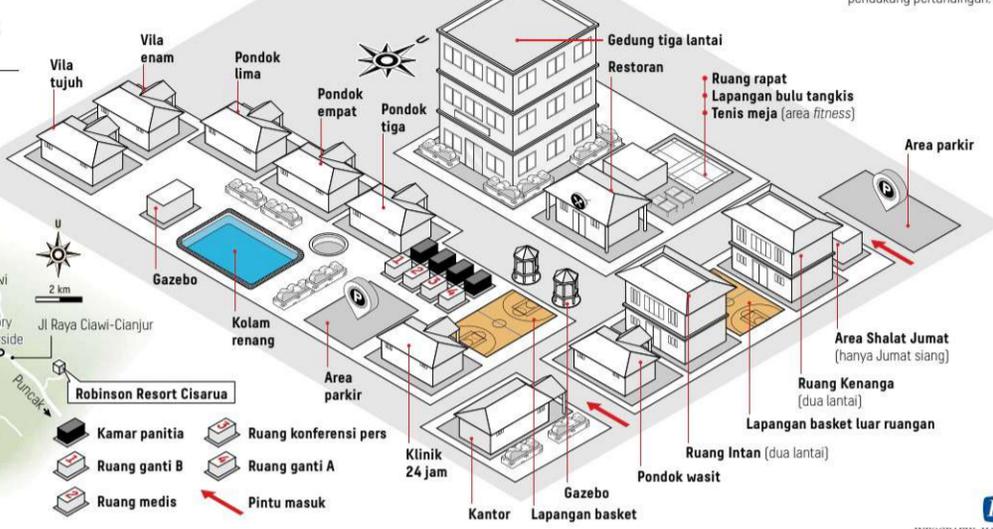
Lokasi "Gelembung" Robinson Resort Cisarua

Pengawas Protokol

Terdapat sekitar 150 orang dalam tim pengawas protokol kesehatan, atau 1:3 dari jumlah dalam gelembung. Tim pengawas terdiri dari panitia, wakil pemain, ofisial, wasit serta pengangkatan duta.

Beberapa Protokol Kesehatan

- Sebelum masuk gelembung wajib 3 kali tes usap PCR (negatif Covid-19).
- Setiap seri atau seminggu sekali, akan dilakukan tes usap PCR.
- Sebelum memasuki lapangan latihan/pertandingan, seluruh personel wajib mencuci tangan dan melalui pemeriksaan suhu tubuh.
- Jeda waktu antarpertandingan selama satu jam untuk sterilisasi seluruh fasilitas dan peralatan pendukung pertandingan.
- Botol minuman handuk digunakan hanya oleh satu orang, tidak bergantian/pinjam.
- Seluruh ofisial yang bertugas wajib mengenakan masker selama bertugas.



Sumber: IBL, Diolah Kompas/KEL

MERASAKAN "GELEMBUNG" DISNEY DI CISARUA

"Gelembung" IBL di Cisarua memperhatikan dua aspek penting dalam satu waktu, seperti cerita "gelembung" NBA di Walt Disney World Resort, Lake Buena Vista, Florida, pada *playoff* 2020. Aspek itu adalah kesehatan dan psikologis orang di dalamnya.

KELVIN HIANUSA

Tepat dua bulan lalu, pebasket Liga Bola Basket Indonesia (IBL), Andakara Prastawa, merasa agak khawatir. Bintang klub Pelita Jaya ini gamang karena akan menjalani karantina sebulan lebih dalam "gelembung" di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Tanpa hiburan dan fasilitas cukup, karantina ditakutkan menghantam psikologis pemain.

"Lebih *concern* ke psikisnya pemain. Karena, kita sebulan di *bubble*, cuma hotel dan lapangan nanti. Kalau NBA, di Disney, kan, berbeda fasilitasnya. Misal ada tempat buat bermain. Beberapa pemain sempat membahas ini, bagaimana setidaknya ada hiburan," kata *guard* andalan tim nasional itu.

Beberapa hari setelah wawancara, rencana IBL memulai kompetisi pada 15 Januari 2021 dibatalkan. Pembatalan ini menjadi musibah sekaligus berkah dari sisi lain. Karena rencana di Mahaka Square dua kali batal akibat terkendala izin, IBL memulai agenda baru untuk mencari lokasi alternatif di luar Jakarta.

Hasilnya, muncul Robinson Cisarua Resort, yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penginapan seluas 3 hektar ini dengan berbagai pertimbangan resmi dijadikan lokasi "gelembung" baru IBL. Setelah absen setahun penuh, IBL akan memulai fase pertama musim baru di Cisarua, Bogor, pada 10 Maret-10 April 2021.

Fasilitas Robinson Cisarua Resort, sebagai tempat liburan, jauh lebih lengkap dari Mahaka Square. Di dalamnya tidak hanya ada lapangan bola basket standar FIBA. Fasilitas hiburan juga lengkap, seperti lapangan futsal, bulu tangkis, kolam renang, hingga ruang karaoke. Semua fasilitas juga dilengkapi udara sejuk khas Cisarua.

Jelas, Robinson bukan dan tidak selengkap Disney. Namun, ini merupakan wujud Disney terbaik yang bisa dihadirkan di dalam negeri. "Sudah cukuplah (fasilitasnya). Kami butuh tempat yang

fresh. Di sana ada pemandangan bagus, bisa berenang, memancing, banyak aktivitas untuk pemain. Di Kelapa Gading kan keluar masuk hanya menatap tembok lagi," kata Manajer klub IBL, Amarta Hangtuah, Ferri Jufry.

Problem psikologis ini akan sangat krusial menentukan performa pemain. Rasa frustrasi membayangi pemain karena harus dikurung dalam karantina. Pada fase pertama, misalnya, mereka tidak bisa bertemu keluarga dan kerabat selama 32 hari.

Ditambah lagi, setiap tim akan dihadapkan dengan jadwal sangat padat. Mereka bertanding sebanyak 4 kali per minggu. "*Kebayang* kan kalau istirahat dan suasana tidak bagus. Nanti jadinya seperti apa para pemain ini," tambah Ferri.

Mahaka Square masih akan digunakan musim ini. Namun, penyelenggaraannya hanya untuk fase kedua atau *playoff*, 23 Mei-6 Juni. Rentang waktunya lebih pendek. Jumlah tim pun lebih sedikit karena sudah memasuki babak *playoff*.

Sebab itu, fase pertama di Cisarua paling penting dalam hal mengantisipasi kondisi psikologis peserta. Apalagi, fase itu akan menjadi adaptasi baru bagi mereka berkompetisi di tengah pandemi.

Bagi pemain Satria Muda, M Sandy Ibrahim, kompetisi musim ini memang tidak ideal. Selain karantina, mereka juga akan bermain tanpa penonton. Namun, dengan fasilitas lengkap yang ada di "gelembung" Cisarua, dia merasa akan sangat terbantu.

"Bisa membantulah. Kayak mengisi waktu luang. Karena seminggu saja bosan kalau tidak bisa ke mana-mana. Tetapi kami kan belum *ngerasain* dan berada di situasi itu. Semoga saja tidak sampai terkekang, apalagi stres," ucap Sandy.

Merasakan Disney

Kondisi psikologis memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah kesehatan seluruh peserta. Berkaca dari "gelembung"

"NBA di Disney World Orlando, Amerika Serikat, mereka berhasil mengeksekusi dua faktor tersebut nyaris sempurna.

Karena itu, IBL sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam "gelembung". Semua 474 orang yang terlibat, mulai dari pemain, ofisial, wasit, dan petugas pelayanan, tidak akan bisa lagi mengakses dunia luar hingga fase berakhir.

Salah satu contoh ketatnya karantina bisa dilihat dari peraturan terhadap petugas pelayanan. Para pekerja, mulai dari tukang masak, cuci, dan bersih-bersih lapangan, semua akan menetap dalam "gelembung".

Bahkan, bahan mentah untuk konsumsi tidak dibeli langsung oleh tukang masak. IBL sudah menyiapkan seseorang di luar untuk berbelanja. Bahan itu kemudian akan dititipkan di konter logistik. Dalam situasi ini, tidak ada kontak antara pembeli bahan dan tukang masak.

Semua orang dalam "gelembung" juga akan diawasi ketat. Setidaknya terdapat 150 pengawas yang diambil dari perwakilan pemain, ofisial, wasit, dan panitia. Artinya, akan ada satu pengawas untuk setiap tiga orang.

Keberadaan pengawas ini sangat krusial. Mereka akan menjaga agar protokol kesehatan tetap dipatuhi. Jika dilanggar, IBL sudah menyiapkan berbagai hukuman. Dari denda uang sampai dikeluarkan dari "gelembung".

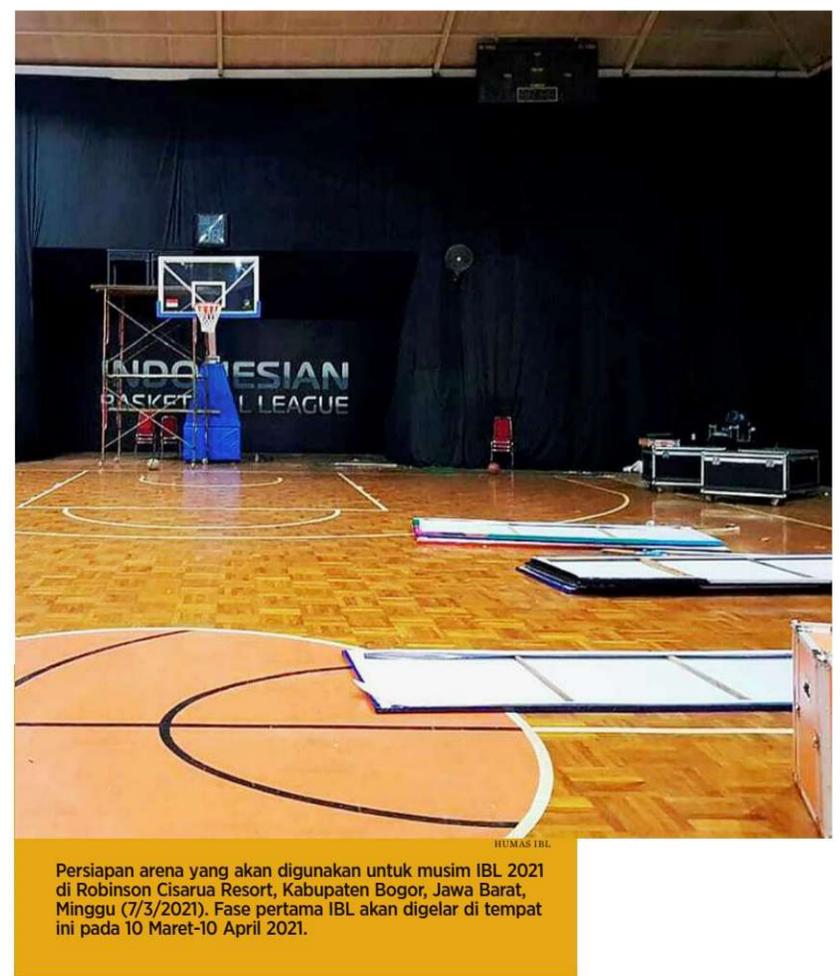
Deteksi dini

Deteksi dini juga dilakukan untuk terhindar dari kasus positif Covid-19. Sebelum masuk "gelembung", semua yang terlibat harus menjalani tiga kali tes usap PCR. Dalam setiap seri, atau setiap minggu, juga akan ada tes usap PCR rutin. Jika ada yang positif, pemain langsung diisolasi dan ditangani oleh Satgas Covid-19 IBL.

Menurut Direktur IBL Junas Miradiansyah, semua upaya dilakukan untuk membuktikan sistem "gelembung" paling cocok diterapkan saat ini. Pembuktian ini sangat penting agar bisa membuka jalan bagi kompetisi dari cabang lain. Karena bola basket menjadi cabang olahraga pertama di Indonesia yang memutar kembali kompetisi profesional di tengah pandemi.

"Gelembung ini mengurangi mobilitas. Di tengah pandemi, kan kuncinya bagaimana olahraga bisa jalan, tetapi mengurangi mobilitasnya. Biaya juga relatif rendah karena kita menghilangkan elemen biaya transportasi antarkota. Dengan gelembung, semua hanya berlagu di satu tempat. Yang paling berat hanya di biaya menunjang protokol kesehatan," jelas Junas.

Pada akhirnya, IBL berharap menghadirkan akhir kisah yang sama seperti "gelembung" Disney, yaitu sukses berkompetisi tanpa menjadi kluster baru pandemi. Tanda tanya di "gelembung" Cisarua ini akan terjawab dalam sebulan ke depan. Kisah manis sangat dinanti seluruh pelaku industri olahraga.



Persiapan arena yang akan digunakan untuk musim IBL 2021 di Robinson Cisarua Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/3/2021). Fase pertama IBL akan digelar di tempat ini pada 10 Maret-10 April 2021.



FOTO-FOTO: KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Buah alpukat paming milik petani di Dusun Krajan Timur, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, baru saja dipetik, Selasa (2/3/2021). Buah alpukat yang banyak ditanam di lereng Gunung Arjuno tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dari buah alpukat jenis lain, dengan daging buah yang tebal dan enak. Petani di desa itu tidak hanya menjual buah alpukat, tetapi juga bibitnya.

PAMELING, ALPUKAT JUMBO DARI LERENG GUNUNG ARJUNO

Alpukat, buah yang biasa disajikan dalam bentuk jus, mulai dari pedagang kaki lima sampai hotel berbintang, menjadi jalan sejahtera bagi warga di lereng Gunung Arjuno, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Teristimewa alpukat jenis paming di sana, membuat penikmatnya sulit melupakan ukuran buah yang jumbo dengan daging buah yang tebal dan enak.

DEFRI WERDIONO

Mendung menggelayut di lereng timur Gunung Arjuno, Selasa (2/3/2021) siang, Nando (23) bersama temannya, Tony (38), sibuk menyambungkan (stek) dua batang alpukat dari jenis berbeda. Mereka memanfaatkan alpukat lokal untuk batang bagian bawah, sedangkan batang atas memanfaatkan alpukat paming.

Nando merupakan petani muda di Dusun Krajan Timur, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun Tony tengah belajar bagaimana membudidayakan alpukat.

Sebagai petani muda, Nando tidak hanya terbiasa dengan masalah perbanyak tanaman menggunakan sistem vegetatif. Dia juga mengerti bagaimana membudidayakan alpukat.

Maklum, Wonorejo merupakan kawasan sentra alpukat dan buah lain berbatang pohon tinggi, termasuk durian. Berada di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, kawasan itu cocok untuk tanaman perkebunan.

Di tempat ini pohon alpukat bisa ditemukan hampir di setiap kebun dan halaman rumah warga. Dari beberapa jenis yang ada, paming menjadi maskot. Jika di keluarga durian, paming bisa disamakan dengan durian montong yang ukurannya besar, serta daging buahnya tebal dan enak.

Sebagai pembanding, satu buah alpukat lokal

Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang



memiliki berat 3-5 ons atau satu kilogram berisi 2-3 buah. Alpukat jenis paming memiliki bobot 1,5-2 kilogram (kg), bahkan lebih.

"Ukurannya lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa," kata Nando.

Oleh karena itu, tidak heran jika harga paming lebih mahal dibandingkan alpukat biasa. Di tingkat petani, harga paming biasanya Rp 30.000-Rp 40.000 per kg tergantung grade. Adapun alpukat biasa berkisar Rp 12.000-Rp 20.000 per kg di tingkat pedagang.

Disparitas harga yang tinggi membuat buah

unggulan tersebut kini terus dikembangkan. "Di tempat saya, satu pohon bisa menghasilkan Rp 2,3 juta dalam sekali panen. Padahal, paming tidak mengenal musim. Masa berbuahnya berkelanjutan," ujar Ahmad Ansori (60), salah satu petani.

Ansori mulai menggeluti alpukat paming sejak 2013. Saat itu istrinya masuk kelompok tani dan menanam dua batang bibit alpukat. Tiga tahun kemudian Ansori benar-benar melepaskan pekerjaan sebelumnya sebagai perajin sandal untuk kemudian banting setir menjadi petani alpukat.

Saat ini Ansori memiliki 12 batang pohon yang sudah berbuah dengan produktivitas 2 kuintal per pohon dalam sekali panen. Setahun, dia bisa panen dua-tiga kali. Bahkan, Ansori pernah menghasilkan buah seberat 2,7 kilogram.

"Saat ini harga alpukat paming tengah turun Rp 25.000 per kilogram akibat bencana banjir di banyak tempat. Ini menghambat pengiriman. Biasanya Rp 30.000 per kg. Semua hasil panen ditampung oleh PT Paranusa (Paming Raja Nusantara)," katanya.

Pengembangan bibit

Tidak hanya tanaman produktif, Ansori juga membuat penangkaran alpukat di lahan seluas 20 meter x 30 meter. Saat ini ada sekitar 5.000 batang bibit yang siap dikirim ke tempat lain.

Petani di Krajan Timur mulai serius mengembangkan alpukat paming sejak 2016, termasuk mengurus sertifikasi. Awalnya, di tempat itu sudah banyak varietas dan dikembangkan begitu saja. Pengembangan jenis paming dilakukan karena respons konsumen positif, termasuk pemangku kepentingan, mulai dari tingkat daerah sampai pusat.

Pengembangan paming pun tidak hanya dilakukan di Krajan Timur, tetapi juga ke desa-desa tetangga.

"Saat ini mereka mulai *sharing* kepada kami bagaimana budidayanya. Sebelumnya, belum dikembangkan," ujar Ketua Kelompok Tani Karya Makmur II, Dusun Krajan Timur, Dadang Pramudiya.

Jumlah petani alpukat paming di Krajan Timur lebih dari 100 orang. Dari jumlah tersebut, 50-an orang di antaranya juga menjadi penangkar bibit. Bibit dari Krajan Timur dikirim ke sejumlah daerah, termasuk luar Jawa, seperti Nusa Tenggara

Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.

"Sekarang kami fokus kirim ke daerah Ngantang dan Pujon di Kabupaten Malang. Kalau tidak dikembangkan di wilayah sendiri, khawatirnya nanti kalah dengan daerah lain," kata Dadang.

Dia membenarkan jika pada Desember lalu petani setempat mengirim 1 kuintal alpukat ke Istana Negara di Jakarta.

Untuk mengantisipasi banjir alpukat di kemudian hari yang bisa berdampak pada turunnya harga, menurut Dadang, pihaknya telah membentuk koperasi dan unit usaha. Di sana ada pengelola yang bakal menangani masalah pemasaran.

"Sebelumnya memang ada kekhawatiran di kalangan petani. Namun, sekarang mereka tenang karena sudah ada yang mengelola," kata Dadang. Siang itu ia tengah menggelar rapat bersama anggota kelompok terkait kebutuhan pupuk dan mengurus determinasi blok pengada mata tempel guna pengajuan bibit berlabel.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan, paming merupakan varietas asli Kabupaten Malang. Selain ukuran pupuk dan mengurus determinasi blok pengada mata tempel guna pengajuan bibit berlabel.

Adapun produktivitas alpukat paming, berdasarkan data DTPHP Kabupaten Malang, berkisar 5-7 kuintal per pohon per tahun. Saat ini luas lahan 350 hektar di beberapa lokasi.

Menurut Budiar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah membantu proses sertifikasi dengan nama alpukat paming yang berarti *dieling-eling* (diingat). Proses sertifikasi sukses dilaksanakan tahun 2018-2019.

"Pemkab juga membantu pengembangan kawasan. Selain itu, juga peralatan kendaraan untuk mengangkut hasil panen. Kami juga mengadakan sekolah lapangan tentang alpukat bagi para petani," ujarnya.

Upaya dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengembangan kawasan alpukat paming ini mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian. Yang tak kalah penting dari penghargaan itu adalah petani alpukat bisa hidup sejahtera.





AFP/SAM YEH

DARI PS5 HINGGA CHEVROLET TERSANDERA KRISIS CIP

Produksi mobil dan gawai menghadapi tantangan dalam bentuk kelangkaan cip atau semikonduktor. Barang mungil berfungsi vital ini banyak diburu produsen seiring peningkatan permintaan cip untuk aneka peralatan elektronik selama pandemi. Berkurangnya pasokan cip ini menyebabkan gangguan produksi dari konsol gim hingga mobil.

SATRIO PANGARSO WISANGGENI/KRIS MADA

Lonjakan permintaan konsumen global terhadap barang elektronik di masa pandemi menjadi salah satu pendorong utama terjadinya krisis semikonduktor atau cip elektronik dunia. Kalkulator sederhana sampai mobil listrik terbaru membutuhkan semikonduktor. Benda yang kini ukurannya semakin kecil, 5 nanometer (nm), menjadi "otak" mesin karena menjadi tempat aneka perintah diolah. Semakin kecil semikonduktor, semakin mangkus kinerjanya dan bertambah mahal pula harganya.

Sebuah perangkat semakin banyak dibutuhkan jika kecanggihannya alat itu meningkat. Semakin mudah penggunaan suatu perangkat karena aneka otomatisasi, semakin besar pula kebutuhan semikonduktor. Ponsel, televisi, dan aneka perangkat elektronik di rumah tentu saja membutuhkan semikonduktor. Sepanjang 2020, meski di mana-mana ada keluhan soal penurunan perekonomian, penjualan aneka perangkat elektronik justru meningkat.

Pada Februari lalu, Chief Financial Officer (CFO) Sony Corp Hiroki Totoki meyakini bahwa peningkatan produksi konsol gim PlayStation (PS) 5 terhambat oleh krisis cip dunia. Padahal, PS5 tengah digandrungi publik. "Sulit bagi kami untuk meningkatkan produksi PS5 di tengah kelangkaan semikonduktor dan komponen lainnya," kata Totoki.

Head of Xbox Phil Spencer juga telah berusaha memproduksi konsol gim secepat dan sebanyak mungkin demi memenuhi permintaan masyarakat. Namun, gerak perusahaan ini juga terkendala keterbatasan suplai cip dari AMD.

"Saya baru berbicara dengan Lisa Su (CEO AMD) dan terus memin-

tanya mencari jalan agar kami bisa mendapatkan cip lebih banyak," kata Spencer dalam sebuah *podcast*.

CEO Apple Tim Cook juga menyampaikan hal senada. "Penjualan Mac, iPad, dan iPhone 12 menghadapi hambatan pasokan komponen. Semikonduktor sedang langka," kata Cook, akhir Januari lalu.

Adapun dampak terbesar dialami oleh para produsen mobil. General Motors (GM), produsen berbagai merek mobil, salah satunya merek Chevrolet, mengumumkan penghentian produksi mobil pada sejumlah pabriknya sekitar satu bulan hingga pertengahan Maret ini.

Penghentian itu karena cip yang dibutuhkan sistem elektronik pada mobil, untuk *power steering* misalnya, tidak tersedia. GM meyakini kelangkaan ini akan mengurangi profit tahunan GM hingga 2 miliar dollar AS (Rp 28,7 triliun).

Sepanjang 2021, sebagian produsen utama otomotif global akan kehilangan sedikitnya Rp 2,3 triliun per hari. Sementara produsen aneka elektronik gagal mendapatkan beberapa ratus miliar per hari sepanjang 2021. Penyebabnya sama, kekurangan pasokan semikonduktor.

"Meski ada upaya mitigasi kami, kekurangan semikonduktor akan berdampak terhadap produksi GM pada 2021," kata juru bicara GM, David Barnas, awal Februari 2021.

Rival GM, Ford, juga menyatakan bahwa hal ini akan mengurangi kemampuan produksinya hingga 10-20 persen. Produsen Jepang, Honda dan Nissan, menyatakan akan mengurangi target penjualannya pada 2021 sebesar 100.000 kendaraan dan 150.000 kendaraan.

CEO perusahaan pembuat cip merek AMD, Lisa Su, mengakui bahwa kelangkaan setidaknya akan terjadi hingga pertengahan 2021. Prosesor AMD di antaranya digunakan Sony dan Microsoft untuk kon-

Seorang pria melintas di depan logo perusahaan pembuat semikonduktor terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), di Hsinchu, Taiwan, 29 Januari 2021.

sol gim masing-masing. "Industri kami tampaknya harus meningkatkan kapasitas produksi secara keseluruhan," kata Su.

Produksi cip dunia memang sangat terbatas. Perusahaan semikonduktor seperti Qualcomm dan AMD hanya mendesain cip, tidak memproduksinya sendiri. Produksi cip dilakukan oleh perusahaan *foundries*, seperti TSMC Taiwan ataupun Samsung.

Akar persoalannya diyakini karena pandemi Covid-19. Di awal pandemi, banyak produsen mobil yang justru mengurangi pesanan cip. Di sisi lain, perusahaan teknologi membutuhkan cip lebih banyak akibat melonjaknya kebutuhan akan komputer dan gawai di masa pandemi.

Ketika permintaan meningkat, produsen mobil harus rela menunggu ketersediaan cip. "Saat peningkatan permintaan mobil muncul lebih cepat daripada yang diperkirakan, para produsen mobil ini harus antri," kata Gaurav Gupta, analis pasar semikonduktor Gartner kepada CNBC.

Penjualan komputer meningkat 4,8 persen pada 2020 menjadi 275 juta unit. Consumer Tech Association, asosiasi industri gawai di Amerika Serikat, menyatakan, 2020 adalah tahun terbesar bagi mereka; penjualan gawai mencapai 442 miliar AS.

Terjadinya kelangkaan cip dunia ini bahkan membuat Presiden AS Joe Biden mendesak Kongres untuk menyediakan dana 37 miliar dollar AS (Rp 531,7 triliun) untuk meningkatkan produksi cip di AS.

"Kami akan bekerja sama dengan para pemimpin industri semikonduktor untuk menyelesaikan kelangkaan ini. Kongres telah mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan produksi cip dalam negeri, tetapi tetap butuh dana 37 miliar dollar AS untuk menerapkannya. Saya akan mendorong hal ini," kata Biden, akhir Februari lalu.

Produk baru

Namun, krisis cip ini tidak membuat sejumlah perusahaan menahan mengeluarkan produk baru. Qualcomm Indonesia, misalnya, Senin (8/3/2021), memperkenalkan *chipset flagship* terbarunya, Snapdragon 888.

Senior Manager Business Development Qualcomm Dominikus Susanto mengatakan, *chipset* terbaru ini akan 25 persen lebih kencang dibandingkan dengan pendahulunya, yakni Snapdragon 865. Selain itu, produk Snapdragon 888 juga lebih irit konsumsi daya ketimbang 865.

Hal ini disebut Susanto karena Qualcomm sudah menggunakan teknologi fabrikasi 5 nm. "Dengan demikian, ini bisa membuat *performance* yang tinggi, tetapi dari sisi penggunaan daya itu lebih hemat," katanya.

Seperti diketahui, ponsel kelas atas, seperti Asus ROG Phone 3, Xiaomi Mi 10, dan Samsung Galaxy S20 versi global, menggunakan *chipset* ini.

Cip GPU Adreno 660 (*graphic processing unit*) pada Snapdragon 888 dijanjikan bakal 35 persen lebih cepat mengolah gambar ketimbang Adreno 650 pada Snapdragon 865. Cip GPU ini juga

akan lebih irit hingga 35 persen dibandingkan dengan pendahulunya tersebut.

Produsen prosesor dan GPU asal AS, AMD, pun pada pekan lalu mengumumkan kartu grafis terbarunya, Radeon RX6700XT. AMD merilis kartu grafis di tengah tingginya permintaan konsumen terhadap produk baru.

Saking tingginya permintaan ini, Nvidia dikabarkan akan memperkenalkan kembali produk generasi lama. PCWorld mengonfirmasi bahwa Nvidia akan kembali merilis GeForce RTX 2060 dan GTX 1050Ti. RTX 2060 diperkenalkan pada Januari 2019, sedangkan GTX 1050Ti diluncurkan pada Oktober 2016.

Proses adaptasi

Pasokan ke otomotif, sebagaimana dicatat Semiconductor Industry Association (SIA), sebenarnya hanya 3 persen dari produksi semikonduktor global yang bernilai rata-rata 400 miliar dollar AS setahun. Sisanya diserap industri elektronik, mulai ponsel, televisi, sampai penyjuk udara.

Karena permintaan menurun selama pandemi, produsen otomotif mengurangi pesanan semikonduktor. Tentu saja produsen semikonduktor tidak mau rugi membiarkan kapasitas produksi tidak terpakai di tengah penurunan pesanan dari salah satu sektor pelanggan. Mereka mengalihkan sumber daya ke sektor yang meningkat, yaitu elektronik.

Inilah salah satu pokok masalah yang dirasakan berbagai produsen otomotif. Karena mesin produksi semikonduktor telanjur diarahkan ke tempat lain, perubahan akan membutuhkan waktu dan hal itu berarti produksi tertunda.

AS memang mempunyai Intel sebagai produsen semikonduktor dengan pendapatan tertinggi di bumi. Masalahnya, Intel fokus pada komputer. Kebutuhan semikonduktor untuk otomotif dan aneka produk elektronik lain bergantung pada TSMC dan Samsung yang memproduksi aneka macam produk SIA mencatat, porsi AS dalam produksi semikonduktor global terpancang dari 37 persen di 1990 menjadi 12 persen pada 2020.

Di China, ada beberapa produsen, seperti SMIC. Masalahnya, teknologi di China tertinggal jauh dibandingkan Korea Selatan dan Taiwan, apalagi Eropa.

Dalam laporan Stiftung Neue Verantwortung, rantai pasok semikonduktor global bergantung pada Taiwan, Korea, Jepang, Eropa, dan AS. Dari AS terutama dipasok rancangan dan teknologi pengujian. Dari Eropa, untuk mesin pembuat kepingan tempat meletakkan aneka sirkuit ukuran mahakecil sehingga menjadi benda yang dikenal sebagai cip atau *integrated circuits* (IC).

Jepang memasok bahan kimia untuk produksi kepingan tersebut dan tahap lanjutan dari proses produksi semikonduktor. China berusaha mengejar, dan masih tertinggal sangat jauh, untuk menjadi perancang dan produsen.

Upaya China mengatasi keteringgalan ini terhambat perang dagang dengan AS. Washington melarang hak paten dan produknya dijual ke Beijing. AS juga mengajak mitra di Eropa untuk tidak memasok industri semikonduktor China.

Tanpa teknologi AS dan Eropa, nyaris mustahil China memajukan industri semikonduktornya. Sebab, teknologi dan perangkat pembuat dan pengujian keping semikonduktor dikuasai AS dan Eropa. Padahal, China bisa disebut pabrik global karena memproduksi aneka produk setengah jadi untuk pabrik di banyak negara. Gangguan produksi di China dirasakan dampaknya pada industri global. (REUTERS)

PANDEMI "HALLYU" BUDAYA KOREA

Drama Korea terus meningkatkan popularitasnya, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain. Selama pandemi Covid-19, gelombang budaya Korea lewat tontonan drama semakin populer.

AGUSTINA PURWANTI



STAR MAX/IPX/ZZ/JOHN NACION

Drama Korea bukan hal asing bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan oleh Statista tentang popularitas drama Korea di seluruh dunia tahun 2020.

Survei pada 24 September-4 November 2020 itu menunjukkan, pengetahuan dan pengenalan K-Drama cukup tinggi. Dari 8.500 responden, mayoritas mengenal drama Korea.

Dua dari sepuluh responden merasa drama Korea sangat populer dan mereka mengaku sangat menggemari drakor, sebutan lain untuk drama Korea. Bahkan, 13 persen responden yang merupakan masyarakat umum, bukan penggemar, juga merasa drakor sangat populer.

Adapun sekitar separuh responden mengatakan cukup mengetahui drama Korea meski bukan bagian dari penggemar. Hanya 12,4 persen yang tak mengetahuinya karena tidak mengonsumsi K-Drama. Survei dilakukan di 19 negara, salah satunya Indonesia, melalui panel dalam jaringan (daring).

Banyak peminat

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin banyak memiliki waktu luang di rumah dan mereka menonton drama Korea. Maka, tak mengherankan serial drama asal Korea semakin populer.

Indonesia, misalnya. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada awal pandemi menunjukkan bahwa jumlah penonton drakor bertambah dan lama waktu menonton menjadi 4,6 jam sehari, sebelumnya hanya 2,7 jam (*Kompas*, 7 Maret 2021).

Indonesia juga menjadi negara dengan minat menonton konten Korea lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dalam survei yang dilakukan Statista, 3 dari 10 responden di Indonesia

mengaku sangat sering menonton drakor.

Tiga dari sepuluh lainnya kadang-kadang menonton dan 24 persen jarang menonton. Hanya 16 persen responden yang tak pernah menonton drakor.

Negara lainnya ialah China, hanya 14 persen responden di negara itu yang tak pernah menonton drama Korea. Separuh lainnya mengatakan sangat sering dan kadang-kadang menonton. Sepertiga lainnya menyatakan jarang menonton.

Contoh lain yang menarik ialah India. Meski India memiliki serial drama yang diekspor ke negara lain, permintaan drama seri Korea di India cukup tinggi. Enam judul drama Korea masuk dalam daftar 10 judul teratas di Netflix India sejak Maret 2020 (*The Economic Times*, 10 November 2020).

Ketertarikan masyarakat India terhadap K-Drama juga tergambar dari *traffic climb up* pada Rakuten Viki di India, salah satu situs global penyedia video dan *music streaming*. *Traffic climb up* semacam lalu lintas situs, layaknya lalu lintas pengunjung di toko fisik.

Drama Korea dalam situs itu mendapatkan 1,1 juta klik pada Maret 2020 (36 persen), meningkat dari 3 persen pada Oktober 2019. Angkanya bertambah lagi menjadi 1,6 juta pada enam bulan berikutnya (46 persen).

Sejarah K-Drama

Di balik larisnya drama Korea di pasar global, K-Drama telah melalui perjalanan panjang untuk bisa populer seperti sekarang ini.

Merujuk publikasi Layanan Informasi dan Budaya Korea Selatan (KOCIS, 2015), era 1960-an menjadi titik ketika drama Korea dimulai. Judul pertama yang ditayangkan ialah *Backstreet of Seoul*, tahun 1962, disiarkan di televisi lokal. Pada

masa itu, TV masih menjadi barang mewah yang hanya dimiliki kalangan tertentu.

Konten drama pun masih di bawah pengawasan pemerintah yang sarat agenda politik. Judul kedua yang cukup populer ialah *Real Theatre*. Drama seri ini merupakan yang terpanjang dan tayang selama dua dekade, sekaligus menjadi alat gerakan antikommuniste pada masa itu.

Era 1980-an, variasi K-Drama meningkat. Drama romansa mulai diproduksi dan menasar kalangan remaja. Drama *Love and Ambition* yang tayang tahun 1986 menjadi ikon di era ini.

Era 1990-an menjadi awal saat drama Korea mulai diproduksi di luar negeri dan memakan biaya besar atau disebut *blockbuster*. Drama tentang sejarah Korea dari masa kolonial hingga perang Korea mulai disampaikan pada masa ini.

Drama romansa pun semakin diminati, bahkan dihubungkan dengan penjualan *merchandise* kepada penggemar K-Drama. *Jealousy dan Sandglass* menjadi dua judul drama yang populer saat itu.

Seiring kemajuan teknologi, K-Drama tak hanya bisa dinikmati di televisi. Pertumbuhan layanan video daring dan pesatnya perkembangan media sosial membuat drakor semakin dikenal luas. Tahun 2000-an menjadi titik awal drakor masuk ke pasar luar negeri dan kian diminati hingga saat ini.

"Hallyu"

Tidak hanya K-Drama, Korea juga memperkenalkan musik Korea kepada dunia yang kini dikenal sebagai K-Pop. Musik asal Korea ini berkembang sekitar tiga dekade setelah era K-Drama dimulai.

Dalam penelitian yang dilakukan Jungsoo Kim (2016) dari Seoul National University, disebutkan bahwa daya saing budaya populer Korea terlihat

Grup BTS tampil dalam sebuah konser di Times Square, New York City, Amerika Serikat, 31 Desember 2019. Twitter pada Februari 2021 memberi gelar pada BTS sebagai band yang paling banyak dicuitkan.

jajahan membuat produk bahkan budaya negara penjajah menguasai Korea.

Namun, ketidakcocokan penduduk Korea terhadap budaya asing membuat mereka mengembangkan budaya sendiri, baik musik maupun drama. Musik AS yang mendominasi kala itu mendorong penduduk Korea untuk mendukung kembali musik mereka.

Kedua, faktor eksternal. Tanpa penerimaan pihak luar, Korea tak akan mendunia seperti sekarang. Perkembangan ekonomi yang pesat, politik yang demokratis, dan liberalisasi di wilayah Asia Timur, secara alami meningkatkan permintaan konsumen akan budaya populer.

China memegang peranan besar atas keberhasilan popularitas Korea. Anak-anak muda China yang kaya menjadi lebih liberal dan terbuka dengan budaya asing. Kekuasaan budaya di China kemudian diisi Korea. Budaya Korea diadopsi masih menolak budaya Jepang yang dikaitkan dengan masa pahit kolonialisme.

Berikutnya ialah faktor individu. Beberapa tokoh Korea mengupayakan agar budaya negara itu populer. Pengusaha lokal, misalnya, memperkenalkan musik pop Korea, diawali dengan promosi ke China dan negara Asia lainnya.

Pemerintah juga menentukan keberhasilan budaya pop Korea. Tahun 1995, Pemerintah Korea mendirikan Biro Industri Budaya di Lingkungan Kementerian Kebudayaan. Pemerintah juga memfasilitasi promosi budaya Korea ke dunia melalui pameran musik.

Terakhir ialah teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan ekspansi jaringan global membantu Korea memperkenalkan budayanya, melalui mesin perambanan, kanal Youtube, dan media sosial. Keseriusan sejumlah pihak membuat Korea berhasil mendunia saat ini.

Korea telah menunjukkan kemampuannya bangkit dari penajahan dan menjadi salah satu raksasa dunia untuk saat ini. (LITBANG KOMPAS)

paling jelas melalui keberhasilan K-Pop. Tahun 1993, K-Pop mengalahkan popularitas musik dari Barat dan makin populer tahun 2004 hingga saat ini. Sebelumnya, musik Korea masih didominasi musik dari Amerika Serikat.

Sejumlah grup K-Pop yang populer antara lain Bangtan Boys (BTS), Super Junior, Blackpink, dan SuperM. Masih merujuk survei Statista, sembilan dari sepuluh responden mengaku mengetahui keberadaan K-Pop di industri musik global.

Kini K-Pop dan K-Drama menjadi teman sehari-hari para penggemar yang tersebar di banyak negara. Tak jarang, kecintaan pada budaya Korea dan kekaguman mereka pada idola mengubah gaya hidup mereka. Gaya rambut, *fashion*, dan makanan yang dikonsumsi ditiru penggemar.

Hal tersebut menunjukkan Korea cukup berhasil memengaruhi minat masyarakat luas. Pengaruh budayanya yang meluas sering disebut-sebut sebagai Gelombang Korea (Korean Wave) atau dalam bahasa Korea disebut *Hallyu*.

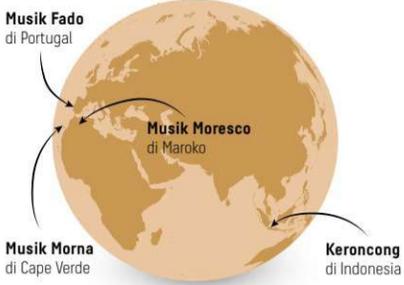
Faktor pendorong

Merujuk penelitian Jungsoo Kim, setidaknya ada lima faktor yang membuat Korea pulih dari penajahan dan bahkan menumbuhkan Gelombang Korea. Pertama, faktor internal. Histori Korea yang menjadi negara bekas

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin banyak memiliki waktu luang di rumah dan mereka menonton drama Korea.

Keroncong

Riwayatmu Kini



Musik keroncong memiliki kemiripan dengan musik Fado dari Portugal serta musik Morna dari Cape Verde. Semuanya memiliki akar yang sama, yakni melodi bernuansa melankolis khas Portugis, diiringi lantunan alat musik berdawai, seperti gitar, *cavaquinho*, atau ukulele sebagai instrumen utama.



Asal-mula Musik Keroncong

Keroncong pertama kali muncul di Batavia (kini Jakarta) sekitar akhir abad XIX; yaitu di Kampung Tugu. Akan tetapi musik ini sebenarnya memiliki asal-usul yang lebih tua, yakni dari pengaruh tradisi musik Portugis abad XVII, walau saat itu belum disebut sebagai keroncong. Cara bermusik ini dibawa ke Kampung Tugu oleh kaum Mardijker, yakni keturunan budak dan Mestizo (ras campuran) Portugis yang dimerdekakan.

Musik Portugis ini menjadi hiburan bagi budak milik Portugis yang berasal dari Afrika. Istilah *moresco* yang melekat pada musik keroncong merupakan pertanda bahwa ada pengaruh orang Moor dari Afrika Utara, masuk dan tertanam di Portugal antara abad VIII dan abad XIII. Budaya bermusik Moor dan Portugis ini kemudian dibawa oleh pelaut Portugis pada abad XVI berlayar ke timur sampai ke Goa di India, serta Malaka, Maluku, dan Flores di Nusantara.

Ketika VOC menaklukkan Portugis di Malaka pada 1641, orang Mestizo dan budak-budak Portugis dibawa oleh orang Belanda ke Batavia. Karena kemampuannya membantu administrasi kolonial, budak Portugis yang beragama Katolik ini kemudian dimerdekakan dengan syarat beralih memeluk agama Kristen Protestan. Mereka disebut Mardijker (berasal dari kata *merdeka*), kemudian mereka bermukim di Kampung Tugu, Jakarta Utara.

Jenis Keroncong

Keroncong Stamboel
Stamboel: Stamboel I, Stamboel II, dan Stamboel III dengan standar lagu panjang 16 birama. Tidak heran kalau cengkok dan irama menjadi cepat dan lincah. Banyak kelompok musik yang memainkan lagu stamboel.

Keroncong Asli/Langgam
Lagu keroncong mengikuti musik dansa asal Amerika, terutama dengan panjang 32 birama (Chorus: Verse-Verse-Bridge-Verse atau A-A-B-A).

Keroncong Pop/Beat
Manthous, musisi yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta, memperkenalkan musik campursari, yaitu keroncong dengan gamelan dan kendang, juga instrumen elektronik lainnya, seperti bass gitar (*electric bass*), organ, terompet, dan saksofon. Kepopuleran musik campursari ini terus diperkenalkan hingga ke mancanegara oleh Didi Kempot.

Gitar Akustik
Sebagai gitar melodi, dimainkan dengan gaya kontrapuntis (antimelodi).

Biola
Melodi pengiring yang melengkapai vokal. Berfungsi seperti rebab dalam orkes tradisional Indonesia.

Macina atau Ukulele Cak
Berdawai 4 (baja), urutan nadanya A, D, Fis, dan B. Jadi, ketika alat musik lainnya memainkan tangga nada C, cak bermain pada tangga nada F (dikenal dengan sebutan in F).

Suling
Suling sering dijadikan melodi intro atau pembukaan pada musik keroncong. Pada era Tempo Doeloe dipakai Suling Albert, yaitu suling kayu hitam dengan lubang dan klep, suara agak patah-patah, contoh orkes Lief Java. Sementara pada Era Keroncong Abadi telah memakai Suling Bohm, suling metal semua dengan klep, suara lebih halus dengan ornamen nada yang indah.

Prunga atau Ukulele Cuk
Berdawai 3 (nilon), urutan nadanya adalah G, B, dan E; sebagai alat musik utama yang menyuarakan "crong-crong". Awalnya keroncong memakai *cavaquinho*, tetapi beralih ke ukulele setelah instrumen ini diciptakan di Hawaii pada 1879.

Selo (cello)
Instrumen dawai, tetapi dalam keroncong dimainkan secara khas dipetik/*pizzicato* dan dibetot. Dalam orkes musik tradisional fungsinya mirip kendang dalam musik gamelan.

Kontrabas
Instrumen dawai yang dibetot atau dipetik, menghasilkan suara bas atau rendah. Dalam orkes musik tradisional, fungsinya mirip gong dalam musik gamelan.

Biduanita atau vokalis
sebagai penyanyi yang menyanyikan lagu yang biasanya bertempo lambat, lembut, dan melankolis.

Keunikan dari orkes keroncong adalah cara memainkan musik ini. Khususnya sepasang ukulele (cak dan cuk), yang saling mengunci dan bersahut-sahutan yang saling melengkapai, mirip dengan cara memainkan orkestra gamelan. Jelaslah bahwa tradisi musik vernakular Indonesia telah diterapkan pada orkestra alat musik Eropa. Inilah wujud persilangan seni musik Barat dan Timur.

Orkes Keroncong
● Irama dasar
● Melodi lagu



Melodi Lagu
"Di bawah sinar bulan purnama..."
Di atas irama dasar itu dimainkan melodi yang berasal dari vokal penyanyi, biola, suling, dan gitar melodi. Biasanya dengan tempo yang lebih lambat dan syahdu.

Irama Dasar
"chrong... kon... chrong..."

Ciri dan Bentuk Musik Keroncong

Keroncong terdiri atas irama dasar berbunyi "kon... chrong... kon... chrong..." yang dihasilkan dari permainan cepat ukulele cak (*macina*) dan cuk (*prunga*) yang bersahut-sahutan, serta dipadukan dengan selo dan kontrabas.

Istilah Keroncong

Menurut ahli etnomusikologi Rosalie Groos, istilah *keroncong* menunjukkan bunyi "chrong... chrong... chrong" dari alat musik ukulele (*cuk*). Namun, ada pula yang mengaitkannya dengan gelang keroncong, gelang emas atau perak berjumlah 5-10 buah yang dikenakan noni-noni Belanda dulu.

Periode Musik Keroncong

Keroncong Tempo Doeloe (1880-1920)

Berasal dari musik bangsa Portugis di Nusantara sekitar tahun 1600. Pada masa ini keroncong berkembang dari Desa Tugu (Cilincing, Jakarta sekarang) akhir abad XIX kemudian hijrah ke Kemayoran dan Gambir.

- Keroncong Stamboel I
- Keroncong Stamboel II
- Keroncong Stamboel III

Keroncong Abadi (1920-1959)

Berlangsung sejak setelah Perang Dunia I (1920) hingga setelah Kemerdekaan (1959). Pada waktu hotel-hotel di Hindia Belanda dibangun seperti Hotel des Indes di Batavia, Hotel Savoy Homann di Bandung, jaringan Grand Hotel di Cirebon, Yogyakarta, Solo, Madiun, dan Malang. Hotel-hotel tersebut memainkan musik dansa, maka keroncong pun mengikuti musik dansa asal Amerika.

- Keroncong Langgam
- Keroncong Stamboel
- Keroncong Asti

Keroncong Modern (1959-sekarang)

Pada masa ini keroncong mengalami banyak perubahan karena pengaruh musik pop dan musik rock 'n roll, sehingga dikenal dengan sebutan keroncong pop atau keroncong beat. Muncul pula kreasi memadukan musik keroncong dengan instrumen Jawa seperti gamelan dan kendang yang melahirkan musik campursari.

- Langgam Jawa
- Keroncong Beat
- Campursari
- Koes-Plus
- Keroncong Milenium